

EDISI 48 / 2018

EDUKASI

K E U A N G A N

LATIHAN DASAR CPNS KEMENTERIAN KEUANGAN

*Mendidik calon pengelola keuangan negara
berkelas dunia*



DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	14
PROFIL	20
SERAMBI ILMU	26
INFOGRAFIS	41
KUIS	42
TAHUKAH KAMU	43
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	46
CERITA ALUMNI	48
TIPS & TRIK	51
MATA AIR	54
KESEHATAN	56
<i>POINT OF INTEREST</i>	58
RESENSI	61
GALERI	62
KANG EDU	64

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI Sugeng Satoto

SEKRETARIAT Abdul Aziz Maghfur Dodi Septariza Naseh Iskandar Eko Supriyono Fitria Sri Wulandari

REDAKTUR Khalimi Andi Manaek Soderi Eko Prasetyo Tri Wibowo Muhammad Irfan Rio Suareski Agus Hekso Pramudijono Hartono Agung Darono Sintawati Kurniawan Inwan Hadiansyah Agus Sunarya R. Adhi Sutanto Eduard Tambunan Pilar Wirotama

EDITOR Sudrajat Ari Sandi Robert Retyan Laksita Mutiary Ardes Martua Sitanggang Yohana Tolla Ridwan Sidik Kurniawan Imam Asma Nur Alam Marbun Bima Lingga Sakti

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER Muhammad Fath Kathin Victorianus M. I. Bimo Adi Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI
Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>



Mini Office

Mini Office Pusdiklat Pajak merupakan tempat untuk melakukan simulasi pelayanan kepada Wajib Pajak. Mini Office dibangun sebagai salah satu sarana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar para peserta pelatihan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kemanggis



@pusdiklat.pajak

Pusdiklat Pajak
Jalan Sakti Raya No.1, Kemanggis, Palmerah, Jakarta Barat
Telepon (021)5481155, 5481476, 4584404, Faksimili (021) 4581394
Situs : www.bppk.kemenkeu.go.id/webpajak/
kode pos 11480



SALAM REDAKSI

Sebagai kawah candradimuka, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bertugas menyiapkan para pengelola keuangan negara sejak awal bergabung dengan Kementerian Keuangan, termasuk saat mereka masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Jika masa sebelumnya para CPNS wajib ikut dan lulus Diklat Pra Jabatan (Prajab) sebagai syarat pengangkatan PNS, kini para CPNS harus lulus yang namanya pelatihan dasar (Latsar). Apa bedanya Diklat Prajabatan dengan Latsar? Bagaimana Pusdiklat PSDM menyelenggarakan Latsar bagi ribuan CPNS Kemenkeu di seluruh Indonesia? Serta bagaimana tanggapan dari para peserta Latsar? Anda dapat membaca rubrik Liputan Utama yang kali ini khusus mengangkat topik Latsar.

Di rubrik liputan khusus, anda dapat menyimak cerita Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Kurniawan, yang berkesempatan hadir di acara *2018 WCO Knowledge Academy for Custom and Trade* di Brussel, Belgia. Acara ini bertujuan memberikan pelatihan intensif bagi praktisi, pelaku bisnis, manajer, dan administrator kepabeanan dan perdagangan, pejabat bea dan cukai, perwakilan organisasi internasional, serta akademisi yang akan mendapatkan keuntungan dari diskusi intensif dan interaktif pada topik yang paling relevan terhadap kepabeanan internasional.

Untuk rubrik profil, kali ini kami ajak anda untuk berkenalan dengan Ibnu Hidayat, seorang pegawai BPPK yang pada peringatan Hari Oeang tahun ini menerima penghargaan sebagai pegawai teladan Kementerian Keuangan. Bagaimana sosok dan kesehariannya?

Selain itu, bagi anda yang haus akan ilmu keuangan negara, beragam artikel di rubrik Serambi Ilmu bisa anda baca untuk menambah pengetahuan anda terkait isu keuangan negara terkini. Setelah membaca Serambi Ilmu, anda dapat lanjut membaca rubrik-rubrik khas Majalah Edukasi Keuangan diantaranya Mata Air, Resensi, Tips & Trik, serta Kang edu.

Selamat membaca!

PELANTIKAN WI UTAMA

Kepala BPPK, Rionald Silaban, melantik satu orang pegawai Fungsional BPPK, Drs. Rudy Widodo, M.A. menjadi Widyaiswara Ahli Utama.



MINISTRY GOES TO PKN STAN 2018

BPPK turut meramaikan pelaksanaan Ministry Goes To PKN STAN (MGTPS) 2018 yang merupakan pengenalan instansi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Negara lainnya kepada Mahasiswa PKN STAN.



WISUDA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2018

Wisuda Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN tahun 2018 yang diselenggarakan di Indonesia Convention Center, dihadiri oleh 5.633 wisudawan dan tidak kurang dari 16.800 pendamping. Penyelenggaraan prosesi wisuda kali ini mengambil tema "Karyadiartha" yang merupakan akronim dari mengabdikan tiada henti untuk tanah air.



FOTO : SENO ADI NUGROHO, DOK. ANTARA

IMF - WORLD BANK GROUP ANNUAL MEETINGS 2018

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dalam Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank Group Tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 8-14 Oktober 2018 di Kawasan Nusa Dua, Bali.



FOTO : SENO ADI NUGROHO
DOK. PANITIA MGTPS PKN STAN
DOK. ANTARA



KEMENKEU MENGAJAR 3

Kepala BPPK, Rionald Silaban, turut bergabung menjadi relawan mengajar di SD Negeri Pejaten Timur, Jakarta Selatan dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar 3.



SEMINAR BIJAK BERMEDSOS

Pusdiklat Keuangan Umum BPPK menyelenggarakan Seminar "Bijak Bermedsos" di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan CEO Net Mediatama, Wishnutama.

YOHANA TOLLA

LATSAR

PERSIAPKAN TUNAS MUDA KEMENKEU

FOTO : DOK. PESERTA LATSAR ANGKATAN III
WISMA DUTA WIYATA

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat vital bagi keberlangsungan organisasi. Menjadi hal yang lazim bagi setiap organisasi untuk menyiapkan investasi yang cukup tinggi bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Dimulai dari proses rekrutmen, organisasi akan menjangkau pegawai yang dinilai prospektif dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi di masa yang akan datang.

Setelah proses rekrutmen selesai, para pegawai baru tentu saja perlu dibekali dengan pengetahuan praktis mengenai organisasi. Ada banyak cara, salah satunya melalui program pelatihan. Program pelatihan ini dilakukan untuk memfasilitasi para pegawai baru yang direkrut untuk memahami bagaimana melakukan pekerjaan. Secara khusus, Simamora (2003) menyatakan bahwa pelatihan bermanfaat untuk menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas kerja, mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai standar kinerja, membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pribadi pegawai, serta memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia.

Begitu strategisnya manfaat pelatihan

pegawai, maka program ini dilakukan oleh semua organisasi, tidak terkecuali organisasi birokrasi. Dalam organisasi pemerintahan, program pelatihan pegawai baru biasa disebut Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau biasa dikenal dengan Latsar. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* yang didasari pada nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan pada setiap pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III menyebutkan bahwa pelatihan ini diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter, dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat.

Secara umum, kompetensi yang ingin dibangun melalui Latsar adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang diindikasikan dengan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Agar kompetensi tersebut dapat tercapai, maka telah disusun kurikulum pelatihan yang terbagi dalam dua bagian, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas.

Materi tentang pembentukan karakter PNS terdiri dari empat agenda, yaitu sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan habituasi. Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah agenda habituasi. Agenda habituasi ini diadakan untuk memfasilitasi agar peserta dapat melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui mata pelatihan yang telah dipelajari. Agenda pembelajaran ini membekali peserta untuk menyusun serta melakukan aktualisasi di unit kerjanya. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta

diwajibkan untuk mempersiapkan rencana pengembangan atau inovasi baru yang dapat membantu meningkatkan kinerja unit kerjanya. Rancangan tersebut kemudian dipresentasikan kepada mentor, setelah itu dilaksanakan pada unit kerjanya masing-masing. Peserta juga diwajibkan untuk melaporkan hasil aktualisasi mereka kepada para penguji.

Materi tentang penguatan kompetensi teknis bidang tugas dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi teknis umum/administrasi dan kompetensi teknis substantif. Dalam pembelajaran tentang kompetensi teknis umum/administrasi, peserta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, seperti tata naskah dinas, nilai-nilai organisasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kompetensi teknis substantif, peserta dibekali materi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Setelah disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap lembaga diklat ASN harus diakreditasi oleh LAN. "Kita boleh menyelenggarakan Latsar apabila sudah diakreditasi," ungkap Kepala Bidang Penjenjangan Pangkat Dan Peningkatan

Kompetensi Pusdiklat PSDM, Arif Rahmanto. Akreditasi ini dimaksudkan untuk menjamin mutu penyelenggaraan diklat. LAN akan mengeluarkan akreditasi atas hasil penilaian terhadap Dasar Hukum, Tenaga Kediklatan, Perencanaan Strategis, Fasilitas Diklat, Komite Penjamin Mutu, dan Manajemen Diklat.

Ada dua unsur yang dinilai pada akreditasi lembaga diklat pemerintahan. Yang pertama adalah untuk Organisasi Lembaga Diklat yang memiliki bobot 50%. Ada enam sub unsur yang diperhatikan, yaitu kelembagaan, tenaga kediklatan, rencana strategis, penjamin pembiayaan, fasilitas diklat, dan penjaminan mutu diklat. Dari keenam sub unsur tersebut, sub unsur tenaga kediklatan memiliki bobot yang paling tinggi, sebesar 40%. Unsur yang kedua adalah Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat dengan bobot 50%. Ada dua sub unsur yang dinilai, yaitu kurikulum dan pengelolaan. Di antara kedua subunsur tersebut, sub unsur pengelolaan yang memiliki bobot paling besar, yaitu 75%.

Hasil penilaian komponen akreditasi tersebut dikompilasi dan hasilnya dinyatakan dalam prosentasi dan skor A - C. Nilai A berada pada rentang 91 - 100 % dengan masa berlaku lima tahun. Nilai B berada pada rentang 81 - 90.99% dengan masa berlaku 3 tahun. Sedangkan nilai C berada pada rentang 71 - 80.99% dengan

masa berlaku 2 tahun.

Pelatihan Dasar CPNS merupakan langkah awal bagi para pegawai baru di lingkungan kerja. Pegawai baru ini merupakan masa depan organisasi yang telah diseleksi secara ketat melalui proses rekrutmen. Di Kementerian Keuangan, Latsar diselenggarakan oleh BPPK melalui Pusdiklat PSDM. Oleh karena itu, setiap organisasi, termasuk Kementerian Keuangan, memperlakukan pelatihan ini sebagai sarana untuk membentuk karakter para pegawainya, sehingga kedepannya, para pegawai baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan dan pengembangan organisasi.



ARIF RAHMANTO: LATSAR ITU “KAWAH CANDRADIMUKA” CPNS KEMENKEU

YOHANA TOLLA

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan dapat dipercaya maka diperlukan pegawai yang menjunjung nilai-nilai tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu setiap organisasi pemerintahan, tidak terkecuali Kementerian Keuangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru bergabung.

Kepala Bidang Penjurangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi Pusdiklat PSDM, Arif Rahmanto menjelaskan bahwa peraturan terkait penyelenggaraan pelatihan dasar (Latsar) dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada akhir 2016 dan harus mulai diimplementasikan oleh lembaga pelatihan terakreditasi mulai tahun 2017. “Aturan ini ekstrim bedanya dengan aturan yang lama,” ungkapnya. Salah satu perbedaan yang paling signifikan adalah dari sisi durasi. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya hanya berkisar 100 jam pelatihan (JP) bertambah menjadi 288 JP sehingga waktu penyelenggaraan bertambah, dari 15 hari menjadi 33 hari. Penambahan durasi tersebut tentu saja membuat penyelenggaraan pelatihan harus bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada termasuk pemanfaatan teknologi. Tahun 2017 Pusdiklat PSDM mulai mengajukan beberapa inisiatif strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

Inisiatif strategis tahun 2017 tersebut meliputi penghapusan *hardcopy*, penataan penjadwalan, dan pendekatan kedekatan geografis. Inisiatif penataan penjadwalan didasari karakteristik dari Latsar yang merupakan pelatihan pembentukan karakter dimana pengawasan dilakukan selama 24 jam serta membiasakan peserta akan kemungkinan tingginya tekanan pekerjaan yang mungkin dihadapi setiap harinya.

Pada tahun 2018, inisiatif strategi meningkat mengimbangi kenaikan jumlah peserta yang hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. “Di tahun 2017 jumlah peserta kita 3.914, tahun 2018 (sebanyak) 6.678,” jelas Arif. Oleh karena itu, ada

FOTO : DOK. PUSDIKLAT PSDM



beberapa inisiatif yang diajukan, yaitu penggunaan *e-learning* untuk agenda Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT), pelaksanaan ujian pelatihan dengan *computer assisted test (CAT)*, absensi *fingerprint*, dan tidak mempergunakan *hardcopy* untuk modul pelatihan. Implikasi dari penerapan inisiatif strategis adalah penghematan di berbagai sisi. Misalnya, penggunaan *e-learning* mampu menghemat anggaran dari beberapa komponen, yaitu akomodasi, honor dan *transport* pengajar.

Untuk penyelenggaraan Latsar tahun 2019 Pusdiklat PSDM kembali mengajukan inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas program. Penyelenggaraan Latsar direncanakan akan menggunakan metode *blended learning*, sehingga durasi pembelajaran *on campus* akan berkurang menjadi 20 hari. “Tapi pembentukan karakter tetap menjadi fokus,” tambah Arif. Selain itu, ujian dengan CAT akan diterapkan pada semua lokasi serta menghilangkan *form* cetak penilaian habituasi.

ZERO TOLERANCE

Latsar merupakan pelatihan pembentukan karakter sehingga *output* yang diharapkan adalah pegawai yang berperilaku baik, berkepribadian baik, serta mampu memahami dan mengimplementasikan semua budaya organisasi. “Pelatihan pembentukan karakter itu saringan yang paling *basic* untuk melihat apakah dia akan *perform* secara perilaku apa tidak. Karena ini pendidikan karakter, maka *zero tolerance* untuk pelanggaran disiplin,” ungkap Arif. Oleh karena itu, program pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi *output* yang diharapkan tersebut. Situasi pembelajaran tidak hanya dibangun oleh pengajar dan panitia penyelenggara, namun juga melibatkan pihak lain, seperti *cleaning service*, petugas *laundry*, tukang kebun, dan lainnya. Sebelum pelaksanaan pelatihan, semua pihak yang terlibat sudah dijelaskan tentang peran mereka dalam pembelajaran, bagaimana pola hubungan mereka dengan peserta, sehingga diharapkan dapat membantu membangun suasana pembelajaran yang kondusif bagi peserta.

Pembinaan kesehatan dan jasmani juga menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan Latsar. Hal ini didasari dengan ketentuan pengangkatan PNS, dimana salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Selama 30 hari mengikuti Latsar, para peserta dibiasakan untuk membangun kebiasaan baik dalam membentuk kebugaran jasmani. Misalnya, peserta dibiasakan untuk bangun pagi, ibadah pagi, kemudian olahraga pagi. Karena pelatihan bertujuan untuk pembentukan karakter, jadwal tidur pun diatur. “Kita juga tau nih siapa yang rajin belajar, tapi kalau belajar menggunakan waktu tidur juga salah,” jelas Arif.

Sepanjang penyelenggaraan Latsar tahun 2018, panitia penyelenggara tidak segan-segan melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta. Sanksi yang dijatuhkan berupa Surat Peringatan (SP) Sedang dan SP Berat. Sampai penyelenggaraan angkatan ketiga, sudah dua peserta yang terkena SP Berat dan dinyatakan tidak lulus Latsar. Ironisnya, ketidakhadiran Latsar di Kemenkeu lebih karena pelanggaran disiplin, bukan dari segi akademik. Panitia penyelenggara juga rutin melakukan sidak untuk melakukan pengecekan terhadap kedisiplinan peserta. “Ini merupakan salah satu bentuk ketaatan pada peraturan,” ungkap Arif. Ia menambahkan bahwa sebagai pegawai Kemenkeu, salah satu alat yang digunakan dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari adalah peraturan.

Sikap tegas panitia penyelenggara dalam menegakkan kedisiplinan mendapatkan apresiasi dan respon positif dari jajaran pimpinan unit asal peserta. Setiap penjatuhan sanksi ditembuskan ke unit asal, bahkan di beberapa unit ada yang melakukan penyidikan kedisiplinan kembali ketika peserta tersebut pulang ke unit asalnya. Untuk peserta yang terkena SP Berat saat ini sedang diproses pemberhentian sebagai CPNS Kemenkeu. “Jadi pada saat mereka tahu kalau aturan dan sanksi itu sejalan, maka peraturan akan lebih mudah untuk ditegakkan,” jelas Arif.

PELATIHAN UNTUK SEMUA

Mengingat padatny kegiatan dalam pelatihan Latsar, panitia penyelenggara berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan peserta dapat dipenuhi. Berbagai fasilitas pendukung disediakan untuk menjamin kenyamanan peserta karena hal itu berdampak pada proses pembelajaran. Sebagai bagian dari penerapan Pengarusutamaan Gender di BPPK, maka fasilitas untuk peserta yang berkebutuhan khusus juga diperhatikan. Panitia menyediakan kamar-kamar untuk para peserta yang membawa bayi dan pengasuhny, serta lemari pendingin untuk menyimpan ASI. Peserta yang menyusui juga diberikan jadwal khusus untuk melakukan *pumping*. Selain itu, panitia juga memberikan kemudahan bagi peserta yang melahirkan, yaitu dengan melakukan ujian pelatihan di rumah sakit. “Jadi kondisi melahirkan, menyusui itu tidak boleh menghambat peserta untuk ikut Latsar, kita panitia harus bisa memfasilitasi,” jelas Arif.

Perlakuan khusus juga didapatkan bagi para peserta difabel tanpa mengurangi esensi dari pelatihan. Panitia didampingi tenaga kesehatan dan pelatih juga sudah melakukan pengukuran mengenai kegiatan fisik bagi peserta difabel. Fasilitas khusus juga disiapkan untuk peserta difabel, seperti toilet duduk dan penyediaan kursi di tempat ibadah bagi peserta difabel kaki. Kemudian untuk peserta difabel mata mereka diperkenankan untuk merekam materi pembelajaran dan pelaksanaan ujian secara khusus, disiapkan petugas untuk membacakan soal dan petugas untuk melingkari jawaban.

TANTANGAN DALAM MENYELENGGARAKAN LATSAR

Menyelenggarakan pelatihan dengan jumlah peserta yang masif tentu saja memiliki tantangan tersendiri. Beberapa permasalahan sudah diatasi dengan adanya inisiatif strategis yang diprakarsai oleh Pusdiklat PSDM. Namun tentu saja masih ada ruang untuk pengembangan. Tantangan yang pertama adalah belum

adanya fasilitas akomodasi untuk pelatihan skala besar. Saat ini di beberapa lokasi, akomodasi untuk penyelenggaraan Latsar masih menyewa. Hal ini tentu saja berdampak pada ketersediaan fasilitas lain untuk mendukung inisiatif strategis yang diajukan. Misalnya untuk pelaksanaan ujian pelatihan dengan CAT. Mengingat lokasi penyelenggaraan yang berpindah-pindah, maka dibutuhkan lab komputer *mobile*. Selanjutnya, untuk mendukung absensi *fingerprnt* maka panitia wajib menyediakan mesin absensi khusus bagi peserta pelatihan. Dari sisi pembelajaran, ketersediaan video pembelajaran yang sesuai dengan tema-tema dalam pelatihan Latsar masih terbatas. Oleh karena itu, untuk setiap video pembelajaran yang diajukan oleh widyaiswara Pusdiklat PSDM harus divalidasi dan memiliki kesesuaian dengan tema-tema yang dibutuhkan.

Mengingat besarnya jumlah peserta Latsar setiap tahunnya, maka penyelenggaraan pelatihan ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan di satu lokasi saja. Tahun 2018 ini, penyelenggaraan Latsar dilakukan di 14 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah standarisasi penyelenggaraan di semua lokasi. Dibutuhkan kesamaan visi dan *passion* untuk menyelenggarakan Latsar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka PSDM dan BDK rutin melakukan rapat koordinasi via *video conference*. Pusdiklat PSDM juga sering melakukan *briefing* kepada pelatih dan panitia penyelenggara di daerah untuk menyamakan persepsi.

Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan Latsar di BPPK telah diakui oleh berbagai instansi. Hal ini dibuktikan dengan hasil akreditasi LAN dengan nilai A. Pusdiklat PSDM juga sering mendapatkan permintaan untuk menerima peserta pelatihan Latsar dari kementerian lain. Pada penyelenggaraan tahun 2018, ada tiga peserta yang berasal dari BPK. Tentu saja mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan peserta dari Kemenkeu.

ARIMBI PUTRI

PELATIHAN DASAR HABIS BERAT TERBITLAH KESAN



FOTO : DOK. PUSDIKLAT PSDM

Adanya formasi khusus disabilitas dan lulusan sarjana sedikit banyak mewarnai pelaksanaan latsar 2018. Heterogenitas latar belakang, budaya, dan pola pikir menjadi tantangan sekaligus kesan tersendiri baik bagi penyelenggara, pengajar, maupun siswa latsar itu sendiri.

Hari Sasmito menahan tangisnya ketika mengajar salah satu kelas di latsar periode V lalu. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pusdiklat PSDM tersebut merasa menjadi pribadi yang belum cukup bersyukur tatkala dihadapkan dengan siswa disabilitas yang diampunya. Meski tak lancar berbicara, siswa tersebut masih semangat menyampaikan pendapatnya ketika pembelajaran di kelas.

“Saya menangis dalam hati, saya merasa jadi orang yang kurang bersyukur. Begitu kita diberikan kesempurnaan ya, beliau yang diberikan kekurangan tetap bersemangat. Mungkin bagi kita orang tuh bisa minder ya, tapi ternyata dia enggak,” urai Hari saat ditemui di Gedung H Sekretariat BPPK.

Tak hanya pengajar, semangat tinggi yang dimiliki para penyandang disabilitas juga diutarakan salah satu rekan sesama siswa latsar. Andita misalnya, melihat Rio, siswa disabilitas lainnya, sebagai pejuang yang hebat. Andita menilai semangat Rio bahkan di atas rekan-rekan lainnya yang bukan penyandang disabilitas.

“Dia semangatnya luar biasa. Di antara kami sekelas, dia yang paling semangat. Enggak pernah sedih, enggak pernah mengeluh, suka *nolong* temennya. Pas makan komando pun dia yang paling banyak makan dan *nyemangatin* kami,” kenang Andita.

Semangat Rio dalam mengikuti latsar tak lain karena CPNS dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tersebut melihat banyak manfaat positif yang didapatkan dari latsar. Salah satunya, kedisiplinan yang dia dapatkan dari keseharian agenda latsar, sejak bangun tidur hingga tidur kembali.

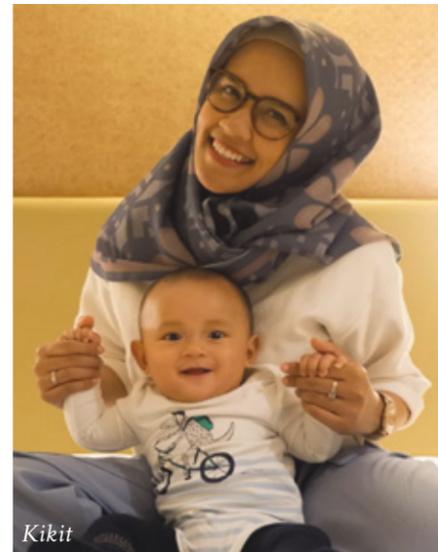
“Menariknya juga dilatih sama Kopassus ya, karena kan kita tahu disiplinnya mereka itu gimana. Makan aja harus teratur enggak boleh ribut, ya bagus lah. Cara menghadap yang *bener* dan sopan itu gimana. Itu berguna *bener* itu,” ungkap Rio.

Siswa yang hobi naik gunung itu juga merasa terbantu dengan fasilitas yang diberikan selama latsar. Menurutnya, penyelenggara sangat memerhatikan kebutuhannya selama latsar, misalnya dengan mengganti toilet jongkok menjadi duduk, dan juga menyediakan kursi di masjid untuk membantunya melakukan ibadah salat lima waktu.

Hal tersebut pun diakui penyelenggara sebagai salah satu momen menarik di latsar tahun ini. Perbedaan yang cukup signifikan dengan latsar tahun lalu mengakibatkan penyelenggara harus menyiapkan fasilitas tambahan dalam



Rio Kurniawan



Kikit

waktu yang cukup singkat. Ditambah, penerimaan sarjana yang rentang usianya 21-28 tahun itu pun membuat kebutuhan peserta menjadi sangat beragam.

“Langsung saja kita bilang ke penyelenggaranya gimana caranya biar satu kamar, disediakan khusus buat yang difabel, diganti toiletnya menjadi yang toilet duduk. Selesai dalam satu hari,” terang Irfan Ramdani, pelaksana Subbidang Penyelenggaraan PPSDM.

Irfan menambahkan, pihak penyelenggara juga harus memfasilitasi banyaknya siswa yang sedang mengandung dan menyusui. Jumlah siswa menyusui pun ternyata di luar perhitungan, sehingga kulkas untuk penyimpanan ASI tidak cukup untuk menampung kebutuhan peserta. Akhirnya, panitia harus menambah satu kulkas di lokasi latsar tersebut.

Adanya fasilitas untuk siswa yang mengandung dan menyusui juga sangat dirasakan Kikit, peserta dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siswi latsar yang memiliki anak berusia baru lima bulan itu, merasa sangat senang ketika mendapat kabar boleh membawa bayinya selama latsar. Sepanjang kegiatan pun disediakan waktu yang cukup untuk *pumping*.

“Dalam pikiranku, keren banget ya Kemenkeu mendukung program ASI eksklusif sampai seperti ini. Seneng banget karena selain tetap bisa belajar seperti temen-temen yang lain, aku juga tetep bisa merawat anak,” ucap dia.

Kikit mengaku tidak ada kendala berarti selama pelaksanaan latsar karena rekan-rekannya memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap ibu hamil dan menyusui. Teman sekelasnya selalu mempersilakan Kikit untuk absen duluan ketika sudah memasuki jadwal *pumping*. “Hehe, mungkin karena terlalu banyak sukanya, aku jadi ngerasa enggak ada dukanya,” tutup dia.

PULANG UNTUK KEMBALI

Sejumlah siswa latsar dari periode I-IV dipulangkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan. Para siswa yang dipulangkan tersebut harus mengikuti agenda latsar dari awal pada periode V. Wanda Dwi Ramadhan menjadi salah satu peserta yang dipulangkan karena terserang cacar di hari ke-17 latsarnya. Dengan berat hati, Wanda harus kembali ke unitnya pada hari ke-18 karena potensi penularan cacar 90 persen kepada lingkungannya.



Wanda Dwi Ramadhan

Rupanya tak hanya Wanda yang bersedih hati. Separuh perjalanan latsarnya ternyata sudah cukup membuat rekannya sangat dekat, bahkan *person in charge* (PIC) latsar di Balikpapan kala itu ikut menangis. “Sedih, tapi lihat yang lain sedih jadi enggak boleh ikutan sedih. Terima kasih banget pokoknya sama Bu Amel BDK Balikpapan, sampe dianterin ke RS sama diperhatikan terus waktu di sana,” papar Wanda.

Bersama sembilan orang lainnya, Wanda kembali mengikuti latsar pada periode V di Wisma Duta Wiyata, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Wanda mengaku awalnya sempat merasa berat, namun kesepuluh orang siswa tersebut saling menyemangati satu sama lain untuk bisa menyelesaikan seluruh kegiatan latsar. Pada akhirnya, mereka menjadi sangat kompak dan bahkan tak terasa sudah sampai pada penghujung kegiatan.

Meski harus dua kali merasakan latsar di tempat yang berbeda, siswa dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut mengaku senang karena di pusat bisa bertemu dengan sejumlah orang penting di Kemenkeu. “Baru tahu wajahnya Pak Anies Basalamah, biasanya cuma lihat tanda tangannya aja di surat,” kelakarnya.

Berada satu atap dengan orang yang sama selama lima minggu tentunya meninggalkan kenangan tersendiri bagi siswa latsar. Sejumlah siswa yang diwawancarai pun seluruhnya mengaku senang mendapatkan banyak teman baru lintas eselon. Mereka lah yang menjadi penguat satu sama lain untuk melewati susah dan senang sepanjang latsar.

Hal itu pula yang dirasakan dan diungkapkan pihak penyelenggara. “Terakhir ya mungkin kita bisa merasakan bagaimana seluruh peserta latsar itu satu komando yah pada akhirnya. Kompak, kemudian jiwa korsanya terlihat sekali. Minggu pertama itu mungkin buat mereka suatu cobaan. Di minggu terakhir, mereka tidak mau pulang,” ucap Irfan menyudahi.

Berada satu atap dengan orang yang sama selama lima minggu tentunya meninggalkan kenangan tersendiri bagi siswa latsar. Sejumlah siswa yang diwawancarai pun seluruhnya mengaku senang mendapatkan banyak teman baru lintas eselon. Mereka lah yang menjadi penguat satu sama lain untuk melewati susah dan senang sepanjang latsar.

KURNIAWAN
WIDYAISWARA MUDA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

2018 WCO KNOWLEDGE ACADEMY FOR CUSTOMS AND TRADE



SEBUAH AKADEMI INTENSIF YANG BERFOKUS
PADA PENGEMBANGAN KETERAMPILAN TEKNIS
PARA PRAKTISI BEA DAN PERDAGANGAN

World Customs Organization (WCO) *Academy* adalah sebuah pendidikan intensif jangka pendek (6 hari) yang berfokus pada peningkatan keahlian untuk para praktisi perdagangan dan kepabeanan. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2011, program ini diadakan untuk mempertemukan para ahli kepabeanan terkemuka dalam rangka memenuhi tuntutan sistem perdagangan internasional dan lintas perbatasan yang kompleks. WCO *Academy* di tahun 2018 diselenggarakan di kota Brussel Belgia selama enam hari, 2-7 Juli 2018, dengan tema “WCO Knowledge Academy for Customs and Trade”. Tujuan utama dari ini program ini adalah memberikan pelatihan intensif bagi praktisi, pelaku bisnis, manajer, dan administrator kepabeanan dan perdagangan, pejabat bea dan cukai, perwakilan organisasi internasional, serta akademisi yang akan mendapatkan keuntungan dari diskusi intensif dan interaktif pada topik yang paling relevan terhadap kepabeanan internasional saat ini.

Akademi ini dihadiri oleh 80 peserta dari 20 negara dan menampilkan sekitar 40 pembicara terkemuka, pelatih, dan fasilitator dengan profil dan latar belakang berbeda. Selain para ahli terkemuka dari WCO, peserta memiliki kesempatan untuk terlibat dengan spesialis dari administrasi Anggota WCO, organisasi internasional, sektor TI, komunitas Bea Cukai yang lebih luas, organisasi perdagangan, dan pihak lain yang terlibat dalam arena perdagangan global.

Program tahun ini mencakup dua jalur pembelajaran, keduanya terdiri dari interpretasi simultan dalam bahasa Inggris dan Perancis dan mencakup bidang kerja utama WCO, Kelas Kepatuhan dan Fasilitas berfokus pada semua aspek pekerjaan Bea Cukai. Untuk kelas tarif dan perdagangan, peserta mempelajari penerapan *Harmonized System* (HS) yang tepat dan seragam secara efisien untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan atau perundang-undangan fiskal dan perdagangan. Selain pelatihan di dalam kelas, peserta memiliki kesempatan mengunjungi pelabuhan Rotterdam, *Netherland Customs Training Centre*, dan Museum Bea Cukai.

Hari pertama, Senin, 2 Juli 2018 pelatihan dibuka dengan *welcome ceremony*, yang sambutannya disampaikan oleh Ricardo Treviño Chapa, selaku *Vice Secretary General* WCO. Dalam sambutannya, Chapa menekankan perlunya bagi pegawai Bea dan Cukai dan para profesional untuk tetap *up-to-date* dengan tren pekerjaan Bea Cukai dan WCO secara umum mengingat situasi perdagangan internasional yang senantiasa berubah. Dia menambahkan bahwa WCO, sebagai organisasi teknis, memiliki tugas untuk berbagi kekayaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dan untuk menciptakan *platform*



FOTO : DOK. PUSDIKLAT BC

dimana Bea Cukai, sektor swasta, dan spesialis perdagangan dari berbagai negara dapat bertemu untuk bertukar pandangan dan berinteraksi.

Setelah *welcome ceremony*, program dilanjutkan dengan materi tentang *The Harmonized System* (HS) yang disampaikan oleh Izaak Wind, *Former Deputy Director on Harmonized System*, WCO. Izaak menjelaskan latar belakang dan sejarah implementasi *Harmonized System*. Izaak juga menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan *Commodity description and coding system: Harmonized System*, Konvensi Internasional tentang *Commodity description and coding system: Harmonized System*, dan menyebutkan lampiran Konvensi: Nomenklatur HS, nomenklatur barang-barang yang bisa digunakan



atau berfungsi sebagai barang lain (*multi-purpose*). Selain menjelaskan tujuan penggunaan HS, Izaak juga menjelaskan bagaimana HS diperbaharui (*maintenance*) secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pada hari kedua, masih bersama Izaak Wind, peserta diajak berdiskusi tentang penggunaan Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUM HS). Izaak menjelaskan bagaimana melakukan identifikasi barang dan bagaimana implementasi penggunaannya sebelum melakukan klasifikasi barang secara bertahap. Kemudian dijelaskan bagaimana implementasi KUM HS 1 disertai contoh penggunaannya dan kasus yang sering terjadi. Dilanjutkan kemudian dengan KUM HS nomor 3. KUM HS nomor 3 hanya dipakai apabila KUM HS 1-2b tidak bisa digunakan karena beberapa kondisi. Metode klasifikasi untuk penggunaan KUM HS 3 yaitu: penggambaran yang paling spesifik (KUM HS 3(a)), karakter penting dari barang (KUM HS 3 (b)), dan penggunaan pos yang disebutkan terakhir pada urutan secara nomor di nomenklatur HS (KUM HS 3 (c)). Penggunaan KUM HS ini tetap digunakan secara bertahap dari a,b, dan c.

Sesi berikutnya hari ke-2 ini dijelaskan tentang klasifikasi barang berupa suku cadang (*parts*) atau bagian. Dijelaskan definisi dari suku cadang adalah bagian dari sebuah benda atau barang yang

dimaksudkan untuk dirangkai menjadi sebuah benda bersama dengan barang-barang lain untuk dimasukkan ke dalam benda lainnya. Menurut penjelasan lainnya, suku cadang penting dalam operasional sebuah barang.

Pada hari ketiga, Izaak menjelaskan tentang bab 84 dan 85 yang mencakup barang-barang mekanik dan elektrik. Apakah kedua bab tersebut ada kemungkinan tumpang tindih? Dijelaskan bahwa bab 84 mencakup mesin dan peralatan dapat digerakkan secara elektrik dan mungkin mengandung komponen



FOTO : DOK. PUSDIKLAT BC

listrik. Sedangkan bab 85 mencakup mesin dan peralatan mungkin mengandung komponen mekanis. Kemudian dijelaskan beberapa contoh barang dan suku cadang yang dapat diklasifikasikan pada bab 84 dan 85.

Sesi berikutnya pada hari ke-3 membahas tentang perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan *Harmonized System*. Salah satu contoh perjanjian yang dibahas adalah antara perjanjian WCO dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang *Information and Technology Agreement* (ITA), yang merupakan sebuah perjanjian di bawah yurisdiksi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang ditetapkan selama Deklarasi Menteri-Menteri mengenai Perdagangan Produk Teknologi Informasi pada tahun 1996. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1997. Isi perjanjian ini ditambah pada tahun 2015. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menghapuskan semua pajak dan cukai terhadap produk teknologi informasi. Kemudian dijelaskan juga tentang *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), yaitu perjanjian hukum internasional antara semua negara WTO. Perjanjian ini menetapkan standar minimum untuk peraturan oleh pemerintah nasional dari banyak bentuk kekayaan intelektual sebagaimana diterapkan pada negara-negara anggota

WTO lainnya. TRIPS dinegosiasikan pada akhir Putaran Uruguay dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tahun 1994 dan dikelola oleh WTO.

Pada hari keempat, di sesi pertama dibahas tentang *Customs Valuation*, atau Nilai Pabean. Benson Lim (*Technical Attaché WCO Tariff and Trade Affairs Directorate*) mengawali penjelasannya dengan sejarah perkembangan dan dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip dasar nilai transaksi. Lim juga memaparkan tentang penambahan nilai pabean apabila terdapat nilai: *assist, freight, royalty*, dan biaya izin penggunaan merek.

Pada sesi berikutnya, Ian Cremer (*Senior Technical Officer, Valuation Sub-Directorate, WCO Tariff and Trade Affairs Directorate*) menjelaskan tentang *transfer pricing*. Pada sesi ini dijelaskan mengapa banyak perusahaan multi nasional yang menjalankan praktek *transfer pricing*, seperti mempengaruhi jumlah pendapatan dan laba yang diakui di anggota grup multinasional. MNEs dapat menggunakan *transfer pricing* mereka untuk perencanaan pajak, mengakui laba kena pajak di yurisdiksi pajak rendah (atau pajak terlindung). Ian juga menjelaskan perbandingan panduan penelitian *transfer pricing* dari OECD dengan metode valuasi dari WTO. Sesi sore hari ditutup dengan tanya jawab dan diskusi dari peserta.

Pada hari kelima, di sesi pertama Mette Azzam, *Senior Technical Officer, Origin Sub-Directorate, Tariff and Trade Affairs Directorate WCO* menjelaskan tentang aspek-aspek umum dan konsep-konsep penting dari *Rules of Origin (ROO)*. Dilanjutkan dengan pemaparan dari Rika Tokai, *Technical Attaché, Origin Sub-Directorate, Tariff and Trade Affairs Directorate WCO*, tentang peran WCO dalam permasalahan keasalan barang. Rita menyatakan bahwa saat ini komite teknis ROO sudah menerbitkan *Revenue Package Phase I dan II* yang berisi penjelasan tentang perangkat (*tools*) dan panduan yang digunakan untuk melakukan penelitian keasalan suatu barang. Hari kelima ini kegiatan pembelajaran hanya sampai pukul 15.00 waktu setempat dan ditutup dengan penyerahan sertifikat, diskusi bebas, dan ramah tamah.

Agenda hari keenam adalah acara *field trip* mengunjungi pelabuhan Rotterdam dan juga *Netherland Customs Training Center* di lokasi yang sama. Di pelabuhan, peserta diberikan penjelasan singkat tentang pelabuhan Rotterdam dan bagaimana petugas bea dan cukai menangani kegiatan impor dan ekspor. Pelabuhan membentang sepanjang lebih dari 45 km dan memiliki luas 105 km persegi yang berumur lebih dari 700 tahun ini melayani 117,8 juta ton muatan di tahun 2017 atau sekitar 142 juta TEUS (*twenty-foot equivalent unit*). Pelabuhan ini dilayani oleh hanya sekitar 300 lebih personil.

Setelah dari pelabuhan, peserta diajak untuk melihat fasilitas terbaru dari *Netherland Customs Training Center*. Bagian yang didedikasikan khusus untuk pelatihan petugas bea dan cukai terdiri dari beberapa bagian, yaitu replika sebuah tempat penimbunan kontainer dimana segala jenis pelatihan berlangsung, replika sebuah gudang yang memungkinkan untuk menguji kemampuan petugas bea dan cukai untuk memeriksa isi kontainer dan mengidentifikasi barang, serta area seluas 500 M² yang didedikasikan untuk proses pencarian kendaraan-kendaraan yang memiliki tempat menyimpan rahasia dari semua rentang dan ukuran mobil.

Terakhir terdapat ruang yang menyerupai berbagai ruangan dari kapal, dimana semua ruangan dilengkapi dengan kamera video, sistem suara, dan suhu ruangan yang memungkinkan untuk membuat suasana yang realistis.

Salah satu bagian dari bangunan digunakan untuk Pusat Pelatihan *Dog Handling*, yang memiliki area *outdoor* yang besar serta sebuah area dalam ruangan untuk pelatihan deteksi zat-zat terlarang, dan sebuah ruangan replika seperti di dalam rumah untuk mengajari anjing bagaimana caranya untuk bergerak di lingkungan seperti itu.

Setelah dari *customs training center* di pelabuhan Rotterdam, tempat selanjutnya yang dikunjungi adalah *Tax and Customs Museum* di Rotterdam. *The Tax & Customs Museum* adalah

museum nasional sejarah perpajakan di Belanda. Museum ini menggambarkan perkembangan sejarah dari undang-undang pajak dan administrasi pajak serta sejarah adat Belanda. Sejak dimulai sebagai koleksi pribadi pada tahun 1937, *Tax and Customs Museum* telah diperbarui secara berkala dan renovasi terakhir pada tahun 2012, mengubahnya menjadi museum modern dengan banyak *display* interaktif.

Mengingat pentingnya program ini, maka kedepannya diharapkan keikutsertaan BPPK melalui Pusdiklat Bea dan Cukai dapat terus berjalan. Program ini banyak memberikan manfaat kepada administrasi kepabeanan ataupun pihak penyelenggaraan pelatihan kepabeanan di Indonesia sebagai *update* pengetahuan kepabeanan dan menjadi *benchmarking* implementasi peraturan dan proses pendidikan kepabeanan di Indonesia.

DYAH EKAWATI

PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI MELALUI IN HOUSE TRAINING

Pelatihan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Pelaksanaan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan dirumuskan dan dibiayai bersama antara BPPK dengan unit pengguna. BPPK (dalam hal ini Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan) menyediakan biaya penyelenggaraan pelatihan dan unit pengguna menyediakan biaya perjalanan bagi peserta menuju tempat pelatihan. Namun, kondisi yang sering terjadi adalah jumlah anggaran biaya perjalanan yang tersedia di unit pengguna tidak mencukupi untuk membiayai sebanyak jumlah pegawai yang perlu ditingkatkan kompetensinya sehingga disusunlah prioritas pegawai untuk mengikuti pelatihan.

Kadangkala, karena adanya kondisi tertentu, dibutuhkan kegiatan peningkatan kompetensi bagi banyak pegawai di unit pengguna. Penyiapan kegiatan peningkatan kompetensi secara jarak jauh (mandiri atau *e-learning*) bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tidak semua pelatihan dapat tercapai tujuannya hanya dengan menggunakan bentuk belajar mandiri atau *e-learning*. Oleh karena itu, pelatihan dengan model *in house training* dapat menjadi salah satu alternatif penyelenggaraan.

Dikutip dari manajemendiklat.wordpress.com, *in house training* adalah salah satu model pelatihan yang isi materi dan durasinya disesuaikan dengan permintaan perusahaan yang memintanya. Selain itu, waktu dan tempat pelatihan juga bisa disesuaikan dengan permintaan *user*. Apabila dilihat definisi tersebut, *in house training* tidak berbeda dengan dengan pelatihan yang biasanya diselenggarakan di lingkungan BPPK. Satu hal yang paling membedakan *in house training* dengan pelatihan reguler adalah tempat penyelenggaraan. Apabila selama ini pelatihan dilaksanakan di Pusdiklat atau Balai Diklat Keuangan, maka pelaksanaan

in house training seringkali dilaksanakan di kantor *user*. Lokasi pelaksanaan pelatihan ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah penghematan biaya perjalanan dinas untuk peserta. Selain itu, waktu pelaksanaan kegiatan dapat dijadwalkan secara lebih fleksibel sehingga kemungkinan untuk mengganggu aktivitas kerja dapat diminimalisir.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sudah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya dengan model *in house training*. Semula model ini dipilih karena ada kebutuhan insidental dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Kebutuhan peningkatan kompetensi timbul dalam tahun berjalan sehingga biaya perjalanan dinas peserta tidak teralokasi. Berdasarkan hasil pembahasan dengan *user*, maka disepakati lokasi peningkatan kompetensi adalah di kantor-kantor vertikal sesuai kebutuhan. Beberapa unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang sudah difasilitasi oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dengan mekanisme *in house training* adalah DJKN dan DJBC dengan materi peningkatan kompetensi bagi para pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan staf keuangan); BPPK, DJA, DJBC, dan DJKN untuk materi *updating* PBJ sesuai dengan peraturan terbaru; DJP untuk materi peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan negara bagi Kasubbag Umum dan/atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan; serta DJPb untuk materi-materi teknis perbendaharaan.

Pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Kanwil DJPb yang menggunakan model *in house training* mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh Kanwil DJPb. Pada tahun 2017 dilaksanakan kembali peningkatan kompetensi bagi Kanwil DJPb dengan model *in house training*. Ada 2 tipe *in house*

training yang dilakukan pada tahun 2017. Yang pertama adalah penyelenggaraan *in house training* dengan tema yang sama di seluruh Kanwil DJPb. Sedangkan tipe kedua, *in house training* yang hanya diselenggarakan di beberapa Kanwil terpilih dengan materi yang didasarkan pada hasil tes pemenuhan standar kompetensi teknis pada pejabat dan pelaksana di Kanwil terkait.

Tahun 2018 DJPb kembali mengajukan permintaan program peningkatan kompetensi bagi seluruh pejabat di lingkungan Kanwil DJPb. Tema atau materi yang diusung tahun ini adalah peningkatan kualitas laporan yang dihasilkan oleh Kanwil DJPb. Pemilihan materi ini bermula dari usulan beberapa Kanwil yang merasa masih membutuhkan tambahan pengetahuan baik teknis maupun non teknis untuk dapat menyusun laporan yang diminta oleh berbagai Direktorat di lingkungan DJPb. Usulan ini kemudian dikomunikasikan kepada direktorat terkait oleh Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat DJPb dan mendapatkan sambutan positif. Berdasarkan penilaian atas laporan-laporan yang telah diterima, walaupun sudah baik dan mengikuti pedoman penyusunan yang ada, namun masih banyak ruang untuk meningkatkan kualitasnya. Salah satu contohnya adalah belum dilakukannya analisis yang mendalam atas data-data yang tersaji dalam laporan tersebut. Selain itu, sebagian laporan hanya menampilkan data dan/atau informasi tanpa memberikan penjelasan yang memadai.

Penyiapan program pelatihan dilakukan bersama antara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dengan DJPb. Setelah desain program pelatihan berhasil dirumuskan, langkah selanjutnya adalah penyiapan materi dan bahan ajar pelatihan. Rancangan materi dan bahan ajar disiapkan oleh Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan namun

finalisasinya dilakukan setelah dibahas bersama antara calon pengajar dari Pusdiklat dan calon pengajar dari DJPb. Saat pelaksanaan pelatihan, pengajar untuk setiap lokasi adalah *team teaching* antara Widyaiswara dengan pejabat/pegawai kantor pusat DJPb.

In house training terkait penyusunan laporan yang disusun Kanwil DJPb dilaksanakan mulai 26 Agustus s.d. 26 Oktober 2018 dengan 4-5 lokasi penyelenggaraan setiap pekannya. Ada beberapa peristiwa yang membuat dinamika pelatihan semakin terasa. Peristiwa itu antara lain adanya mutasi yang cukup besar bagi pejabat Eselon II dan III di lingkungan DJPb serta musibah gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya. Namun semua hal tersebut tidak menyurutkan semangat peserta dan pengajar untuk melaksanakan proses pembelajaran.

Tantangan yang paling terasa dalam menyelenggarakan pelatihan dengan model *in house training* adalah meminta seluruh peserta hadir tepat waktu saat pelatihan akan dimulai. Hal ini dapat dipahami, karena pelatihan dilaksanakan di kantor, maka ada beberapa hal terkait pelaksanaan pekerjaan yang tidak bisa dihindari. Kendala ini cukup teratasi dengan adanya komitmen dari pimpinan sehingga bawahannya juga tidak merasa tidak enak kalau selama pelatihan sedikit menunda penyelesaian pekerjaan. Namun terlepas dari hal tersebut, secara keseluruhan Kanwil DJPb menyambut gembira kegiatan ini. Jajaran pimpinan merasa terbantu, karena bisa mendapat ilmu dan tetap bisa menyelesaikan tugas kantor. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan di kantor, seluruh pihak yang terlibat mulai dari pelaksana hingga pimpinan bisa mendapatkan pemahaman yang sama karena mendapatkan informasinya dalam waktu yang bersamaan dan bisa langsung berdiskusi. Hal ini tidak akan dapat diperoleh apabila mengikuti pelatihan di Pusdiklat atau Balai Diklat karena peserta dari Kanwil terkait akan dikirim secara bergantian. Banyak pesan positif yang disampaikan oleh peserta melalui testimoni yang diberikan. Diantaranya tetap menyelenggarakan kegiatan serupa di masa-masa mendatang.

Puas rasanya bila kegiatan yang kita selenggarakan mendapat respon yang positif dari *user*. Peserta yang aktif mengikuti kegiatan juga menggembarakan karena berarti peserta merasa membutuhkan materi yang diberikan dan senang dengan metode pelatihan yang digunakan.

NURUL IBNU HIDAYAT

DODI SEPTARIZA

PEGAWAI TELADAN BPPK 2018



“Tenang, ramah dan relijius. Bagi sebagian besar orang, tentu deskripsi tersebut dirasa tepat untuk menggambarkan sosok Nurul Ibnu Hidayat atau yang akrab disapa Ibnu. Intonasi suara yang lirih, tenang dan menyejukkan khas jajaka Bandung, melekat pada gaya bicaranya. Kiprah dan pengabdian yang telah mendedikasikan diri selama 11 (sebelas) tahun pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, membuahkan gelar Pegawai Teladan BPPK 2018. Menarik disimak bagaimana perjalanan hidup dan karirnya yang menggambarkan dukungan orang-orang terdekat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan sikap seseorang”

SPELIALISASI AKUNTANSI PEMERINTAH

Nurul Ibnu Hidayat lahir di kota kembang, Bandung, 33 (tiga puluh tiga) tahun yang lalu. Sampai saat dirinya berkuliah di STAN Bintaro, Ibnu menghabiskan masa kecil dan remajanya di kawasan Antapani, Bandung. Memulai pendidikan dengan bersekolah di SD Griya Bumi Antapani 5, melanjutkan ke SMP 5 Bandung, dan lalu pada SMA 20 Bandung, Ibnu awalnya tidak menyangka akan meninggalkan kota kembang, sampai nasib membawanya menjadi mahasiswa STAN. Saat ini, Ibnu bekerja sebagai pelaksana pada subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Keuangan Sekretariat Badan. Sejak pertama kali ditempatkan di BPPK tahun 2007, selain masa tugas belajar D4-nya pada rentang tahun 2009-2012, praktis Ibnu tidak pernah dipindahtugaskan, “jangan pindah bagian, pindah subbagian saja belum pernah”, seloroh Ibnu.

“Saya pernah bekerja menggunakan *stopwatch*, kalau misalnya saya salat atau ke toilet *stopwatch*-nya saya matikan, ternyata untuk bekerja 7 jam itu berat, maka dari itu saya harus menebus dengan yang lain, dengan apa yang bisa memberikan kontribusi ke kantor, ya salah satunya dengan belajar.”

FOTO : SENO ADI NUGROHO

Menyikapi posisi Ibnu yang tidak pernah dipindahtugaskan dari Subbagian sekalipun, mungkin akan menuai pro kontra pendapat. Namun bagi Ibnu, hal tersebut merupakan sesuatu yang ia sukuri. “karena memang sesuai dengan *passion* saya, sesuai dengan *background* saya juga, jadi ya menyenangkanlah di Akuntansi Pemerintahan ini”, celetuk Ibnu. Karena memang sesuai *passion*, Ibnu tidak pernah kehilangan semangat dan tetap termotivasi untuk selalu meningkatkan kinerja di tempatnya mengabdikan.

Berbicara tentang Akuntansi Pemerintahan, Ibnu tahu betul bagaimana perjalanan reformasi pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan UU Keuangan Negara Tahun 2003. Ibnu berkisah dirinya mengikuti perubahan mulai dari pembukuan yang masih dilakukan secara manual, berganti menjadi semi otomatis sampai akhirnya menjadi *full* otomatis. Aplikasi pendukungnya pun juga ikut bertransformasi, dari SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) yang berbasis kas, hingga menjadi aplikasi berbasis Akrua yaitu SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang digunakan saat ini. “*Alhamdulillah* saya diberi kesempatan untuk berkontribusi pada semua proses tersebut, jadi paham benar historis dan filosofinya”, cerita Ibnu.

Selain menjadi *expertise* atau ahli di bidang Akuntansi Pemerintah, banyak keuntungan lain yang didapat Ibnu, seperti ketika dirinya berhasil mendapatkan beasiswa S-2 LPDP, dimana “spesialisasi” menjadi nilai tambah dalam proses seleksi. Lalu juga bagaimana dirinya kerap diminta untuk menjadi pengajar, baik untuk diklat-diklat maupun menjadi dosen tidak tetap pada Politeknik Keuangan Negara STAN.

Menjadi Dosen di almamaternya merupakan impian Ibnu sejak zaman kuliah, Masa-masa indah di kampus membuat Ibnu jatuh cinta pada STAN. Ketika lulus dirinya pun bertekad suatu saat nanti akan kembali ke kampus dan mengabdikan sebagai dosen. Beruntung tidak lama berselang, Ibnu berkesempatan mewujudkan

impiannya tersebut, walaupun hanya menjadi pengajar atau dosen tidak tetap. Ibnu sangat bersyukur bisa menjadi pengajar di PKN STAN. Berkaca pada pengalaman dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya saat menjadi mahasiswa, Ibnu menyiapkan semua materi kuliah dengan mendetail dan seatraktif mungkin, membuat proses belajar mengajar yang lebih efektif, dan yang paling utama adalah menciptakan pola komunikasi gaya millennial khas mahasiswa saat ini, “pengajar yang baik adalah pengajar yang bisa menjadi teman bagi mahasiswa-mahasiswanya, makanya saya berusaha untuk menjadi teman mereka”, kata Ibnu. Maka tidak heran bila akhirnya Ibnu dinobatkan sebagai pengajar terbaik dari total 269 pengajar Program Diploma I Pajak, PKN STAN pada tahun Akademik 2017-2018.

PEGAWAI TELADAN BPPK 2018

Penghargaan pegawai teladan adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan berdasar Keputusan Menteri Keuangan nomor 7/KMK.01/2016 dan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 25/MK.1/2016. Dalam ketentuan tersebut seorang pegawai teladan diharuskan memenuhi empat kriteria yaitu kinerja, kehadiran, perilaku, dan kompetensi. Tahapan pemilihan pegawai teladan itu sendiri meliputi Seleksi internal pada masing-masing satuan kerja di Balai Diklat/Eselon II, yang kemudian pada tingkat Eselon I, masing-masing calon pegawai teladan tersebut akan melaksanakan sesi wawancara sebagai seleksi tahap akhir.



FOTO : SENO ADI NUGROHO



Ibnu mengisahkan, pada awalnya dirinya menolak dicalonkan sebagai calon pegawai teladan dari Bagian Keuangan, karena merasa masih banyak pegawai yang lebih layak untuk dicalonkan sebagai pegawai teladan. Namun masukan dan dukungan dari atasan juga rekan-rekan membuat Ibnu berubah pikiran dan mantap dicalonkan sebagai wakil pegawai teladan dari Bagian Keuangan.

Seleksi berlanjut dimana Ibnu bersaing dengan 4 calon dari bagian lain di Sekretariat Badan. Melalui sebuah proses *polling* dramatis, Ibnu berhasil mengungguli calon wakil dari Bagian Umum hanya dengan selisih keunggulan 2 suara, dan berhak maju sebagai calon pegawai teladan Sekretariat Badan.

Pada tingkat Eselon I, Ibnu bersama wakil dari Pusdiklat, PKN STAN dan Balai Diklat Keuangan sebanyak 18 (delapan belas) orang melaksanakan tahap wawancara. Yang pada prosesnya, melalui Rapat Penetapan yang beranggotakan Tim Pewawancara dan Pimpinan Eselon II BPPK, Nurul Ibnu Hidayat ditetapkan sebagai Pegawai Teladan BPPK 2018

Ketika ditanya kira-kira apa yang membuat dirinya bisa terpilih sebagai pegawai teladan, Ibnu menjawab “saya bersyukur pertanyaan-pertanyaan yang ditanya pewawancara saat itu saya banget, pewawancara banyak menanyakan hal seputar pembelajaran”. Dengan posisi Ibnu di subbagian Akuntansi dan Pelaporan yang berperan sebagai unit Pembina laporan saterker BPPK, tentunya dibutuhkan banyak pengetahuan yang harus dikuasai, mulai dari *update* peraturan terkait, teori dan Ilmu Akuntansi, Keuangan Negara dan lain sebagainya. Ibnu mengakui, dirinya kerap pulang kerja lebih dari pukul 17.00 untuk belajar, mempersiapkan pekerjaan atau mengajar. Baginya, apa yang dilakukan itu adalah kompensasi dari gaji yang diterimanya setiap bulan. Berdasar kalkulasinya, “Pada Analisis Beban Kerja, pegawai dibayar dengan gaji yang ada itu karena dia telah bekerja setidaknya selama 7 (tujuh) jam pada 1 (satu) hari. Saya pernah bekerja menggunakan *stopwatch*, kalau misalnya saya salat atau ke toilet *stopwatch*-nya saya matikan, ternyata untuk bekerja 7 jam itu berat, maka dari itu saya harus menebus dengan yang

lain, dengan apa yang bisa memberikan kontribusi ke kantor, ya salah satunya dengan belajar itu”.

SOSOK YANG MENJADI INSPIRASI

Ibnu menuturkan ada begitu banyak sosok dan individu yang berpengaruh dan membentuk pribadi dirinya saat ini. Ibnu tak segan menyebutkan nama-nama orang yang menjadi inspirasinya dan berjasa dalam hidupnya selama ini.

Di urutan pertama tentunya adalah kedua orang tua yang menjadi sumber inspirasi terbesar dan peletak nilai-nilai dasar keagamaan yang terus tertanam pada dirinya. Ibnu berkisah sampai saat ini begitu menikmati suasana pagi hari di rumahnya di Bandung yang sudah ramai dengan kegiatan setelah salat subuh. Selain itu, dedikasi orang tuanya dalam memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar juga menjadi satu hal yang diikuti Ibnu. “Bapak itu dari zaman dulu sampai sekarang selalu jadi andalan dalam menjadi pengurus warga, jadi *gantian aja* jadi Ketua RT, RW, sekretaris, bendahara, karena beliau

tidak pernah menolak kalau seandainya ditawari, beliau siap untuk menyerahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk kerja sosial. Pesan ayah saya kepada saya, kalau misalkan punya kesempatan untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar, kenapa *enggak?* tapi jangan meminta dan menawarkan diri”. Hal yang sama yang dilakukan Ibnu saat ini dengan menjadi Sekretaris RT di lingkungan tempat tinggalnya.

Saat kecil dahulu Ibnu mengaku sebagai seorang yang pemalu, namun semua berubah ketika dirinya dekat dengan seorang teman yang bernama Andhika. Ibnu menceritakan Andhika sebagai sosok teman yang berasal dari keluarga berada namun mempunyai sikap yang tidak menuntut banyak kepada orang tuanya. Bahkan dia punya kebiasaan menyisihkan uang sakunya untuk membeli buku. Tak heran Andhika memiliki beragam koleksi buku yang disusun pada sebuah ruangan menyerupai sebuah perpustakaan mini, kebanyakan adalah buku dengan tema agama, pengembangan diri, komunikasi, dan psikologi. Pada fase ini, dimulailah hobi membaca Ibnu, dirinya kerap meminjam dan membaca buku koleksi Andhika dan mendiskusikannya bersama, “dari aktifitas tersebut akhirnya percaya diri mulai tumbuh pada diri saya”, tegas Ibnu.

Ibnu menambahkan, “Andhika menyampaikan sebuah hadis Rosululloh SAW yang menjadi cambuk untuk saya dalam belajar agama, atau setidaknya berusaha mengamalkan apa yang saya yakini dalam keseharian saya seperti berbuat baik kepada sesama.” Hadis tersebut adalah “Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama.”

Ibnu juga bayak menyebutkan nama-nama lain yang memberikan pengaruh positif di perjalanan hidupnya, seperti bagaimana Ahmad Danawi, teman kuliah yang dia anggap sebagai perpustakaan berjalan karena kecintaannya dalam membaca, lalu juga Bang Zulkfly senior satu kost yang setia membangunkannya setiap pagi hari, dan Almarhum Pak Andri Priyatna, rekan kerja Ibnu saat pertama kali bekerja di BPPK. Baginya masa awal di BPPK adalah masa yang paling mengesankan pada perjalanan karirnya, “Jadi waktu itu, kami benar-benar diandalkan di Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, tugas kami tidak hanya mengurus Sekretariat saja, tapi juga sekaligus sebagai unit pembina satker lain, Semua pekerjaan tingkat Eselon I se-Indonesia hanya kami kerjakan berdua saja, dan saya merasa

beruntung dipaksa untuk mempelajari pekerjaan tersebut dengan cepat,” kenang Ibnu.

Yang paling spesial tentunya ketika masa SMA, dimana Ibnu kagum pada sosok perempuan yang membuat dirinya tak berdaya. Sosok yang menurutnya begitu tenang dan tidak banyak menuntut. Ibnu ingat betul pesan yang selalu disampaikan kepadanya “jangan mengeluh, kalau kita bisa mengubah keadaan, maka berusaha untuk mengubahnya, dan jika itu tidak bisa diubah, ubahlah diri kita untuk menyesuaikan keadaan”. Pesan yang selalu dicamkan dalam hati Ibnu dan menjadi sumber kekuatan utama ketika merantau kuliah di Ibu kota. Sosok teman SMA tersebut kini menjadi teman hidupnya dan memberikannya 2 orang anak. Rasa cinta Ibnu kepada sang istri sangat besar, mengutip hadis Rasulullah SAW “Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada istrinya” Ibnu berkeinginan dan selalu berusaha untuk menjadi sosok suami yang baik bagi istrinya dan juga sosok ayah yang baik bagi anak-anaknya.

Tentunya banyak nama yang tidak bisa Ibnu sebutkan satu per satu yang berperan dalam hidupnya. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja, atasan dan masih banyak lagi. Namun yang pasti Ibnu sangat bersyukur bisa bertemu dan bergaul dengan orang-orang baik, sehingga membentuk pribadinya yang positif hingga saat ini.

SIBUKKAN DIRI UNTUK SESUATU YANG BERMANFAAT DAN BERIKAN SELALU BERIKAN YANG TERBAIK

Berdasarkan ketentuan yang mengaturnya, seorang pegawai teladan bertanggung jawab untuk selalu menjaga nama baik Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan menjadi teladan bagi pegawai lain.

Menanggapi hal tersebut, Ibnu berpendapat bahwa sudah seharusnya seluruh pegawai BPPK bertindak seperti itu, tidak hanya terbatas pada pegawai teladan saja. Menurutnya, “kita sebagai

pegawai terutama pegawai muda, setidaknya harus mempunyai 3 karakter utama yaitu pembelajar, peduli dan bijaksana”.

“Pembelajar, berarti seorang pegawai tidak hanya tenggelam dalam rutinitas pekerjaan dan kemudian melupakan pengembangan diri. Belajar saat ini tidak harus dilakukan dengan cara konvensional, ada banyak cara, salah satunya dengan mengakses KLC (Kemenkeu *Learning Center*)”.

“Peduli, berarti seorang pegawai harus mempunyai empati, misalnya ketika disekitarnya ada orang yang merasa kesulitan, dia bisa dengan cepat tanggap dan melakukan sesuatu untuk membantu.

“Bijaksana, saat ini kita berada pada era komunikasi tanpa batas, informasi yang beredar di publik terutama media sosial banyak yang belum terkonfirmasi dan masih diragukan kebenarannya. Kita harus bisa bijak menanggapi informasi tersebut, jangan sampai termakan berita-berita yang tidak benar, apalagi ikut-ikutan menyebarkannya”.

Terakhir pesan Ibnu adalah, “kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan terutama pegawai muda harusnya dapat menyibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat, karena apabila kita tidak sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, maka kita akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan selalu berikan yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu di titik mana kita bisa menginspirasi orang lain”.

“Kita sebagai pegawai terutama pegawai muda, setidaknya harus mempunyai 3 karakter utama yaitu pembelajar, peduli dan bijaksana.”

Serambi Ilmu

NOOR CHOLISH MADJID
WIDYAISWARA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

MENDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI *SHARING ECONOMY*

ABSTRAK

Salah satu tema pembangunan pemerintah Indonesia saat ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah keterbatasan pendanaan. Oleh karena itu, peran swasta, masyarakat, dan perkembangan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut sehingga bisa menyediakan sumber pendanaan alternatif. *Sharing economy* dan perkembangan teknologi menjadi harapan baru untuk berbagi peran dan beban antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya pemerintah diharapkan mampu mengatur perekonomian agar dapat menguntungkan semua pihak. Istilah *sharing economy* dimulai dari dunia digital digunakan untuk mendeskripsikan berbagai bisnis *start up* dan model bisnis yang menggunakan teknologi digital yang menghapuskan peran tradisional dari perantara. Tiga hal yang ditawarkan *Sharing Economy* dan dunia teknologi mutakhir adalah: kekuasaan yang didistribusikan, tatanan baru di bidang ekonomi yang lebih efektif dan efisien, serta penggunaan aset yang inovatif dan optimal. Keterbatasan dana pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup guna menciptakan fondasi perekonomian yang kuat akan sangat terbantu oleh inovasi masyarakat dan teknologi yang terus berkembang. Ketika sistem ekonomi yang berbasis digital mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan efektif, berarti hal tersebut seiring dan sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyatnya.

Kata kunci : sharing economy, ekonomi digital, teknologi

PENDAHULUAN

Salah satu tema pembangunan pemerintah Indonesia saat ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kondisi perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global maka tidak mudah untuk mencapai tema yang telah ditetapkan tersebut. Keterbatasan APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus mengalami perlambatan membuat gerak pemerintah untuk mewujudkan tema tersebut menjadi tidak mudah dan penuh dengan tantangan.

Karena pendanaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas terbatas, maka perlu dicarikan sumber pendanaan alternatif. Peran swasta, masyarakat, dan perkembangan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Akan tetapi, mewujudkan pembagian peran antara pemerintah, masyarakat serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada ternyata sangat tidak mudah. Akhir-akhir ini marak terjadi aksi demonstrasi dari sopir taksi dan angkutan kota di DKI Jakarta yang intinya menolak keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab. Di sisi lain, aksi demonstrasi dari para pelaku bisnis transportasi *online* (pengemudi Gojek dan Grab) juga terjadi. Mereka

menuntut pengakuan dari pemerintah. Demontran yang pada satu sisi menuntut agar pemerintah melarang beroperasinya berbagai jenis layanan jasa transportasi berbasis aplikasi dan di sisi lain adanya tuntutan legalisasi transportasi berbasis *online* menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan yang dahsyat di bidang jasa transportasi terkait dengan perkembangan teknologi.

Meskipun secara faktual keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan konektivitas di tengah keterbatasan sarana transportasi yang mampu dibangun dan didesain pemerintah, ternyata jasa transportasi

Noor Cholis Madjid

MENDONGKRAK
PERTUMBUHAN EKONOMI
MELALUI *SHARING
ECONOMY*

Koko Inarto

MEMAHAMI PENGATURAN
PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN JABATAN

Muhammad Rifky Santoso

HUBUNGAN ISTIMEWA
KARENA PENGUASAAN:
CELAH PERATURAN DARI
KASUS PENGADILAN
PAJAK

tersebut seperti anak haram yang tidak diinginkan. Di satu sisi pemerintah hampir tidak berdaya mengatasi kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur yang ada, namun di sisi lain regulasi yang telah ada dan tercipta sekian lama tidak mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan pergolakan dalam industri transportasi tersebut tersebut, istilah *sharing economy* menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak dari masyarakat baik pakar maupun masyarakat awam yang menggolongkan jasa transportasi berbasis *online* sebagai bentuk dari *sharing economy*. *Sharing economy* adalah model ekonomi yang sering didefinisikan sebagai kegiatan berbasis *peer-to-peer* (P2P) untuk memperoleh, menyediakan, atau berbagi akses ke barang dan jasa yang difasilitasi oleh komunitas berdasarkan platform *online*.

Pendorong utama berkembangnya sistem ini adalah terciptanya kemudahan, efektivitas, dan efisiensi dalam perekonomian. Dengan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam perekonomian tentu saja akan mendorong tumbuhnya produksi yang lebih cepat dan konsumsi yang lebih banyak. Kondisi ini tentu saja sangat menguntungkan bagi perekonomian karena peningkatan konsumsi dan produksi berarti pula peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik bruto.

Sharing economy berkembang pesat seiring dengan perkembangan *e-commerce*. Data Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa industri *e-Commerce* Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar tujuh belas persen dengan total jumlah usaha *e-Commerce* mencapai 26,2 juta unit. Sedangkan berdasarkan riset global dari *Bloomberg* menyatakan, pada 2020 lebih dari separuh penduduk Indonesia akan terlibat di aktivitas *e-Commerce*. Sementara *McKinsey* dalam laporan bertajuk '*Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*' juga menyebutkan, peralihan

ke ranah digital akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga US\$ 150 miliar dolar pada 2025.

Makalah ini dirumuskan dengan menggunakan metodologi kajian literatur dan kerangka konseptual pemikiran secara logis. Kajian literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai fenomena yang ada terkait *sharing economy* yang berkembang di Indonesia dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Peran Swasta dalam Perekonomian

Tujuan akhir dari sebuah pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah belanja negara ditujukan untuk memakmurkan masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga semakin sadar bahwa masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhannya. Keterbatasan anggaran, salah urus, perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat menjadi contoh klasik yang senantiasa dikeluhkan oleh masyarakat.

Sharing economy menjadi harapan baru untuk berbagi peran dan berbagi beban antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya apabila pemerintah mampu mengatur konsep ini dengan baik dan tanpa gejolak yang berarti diharapkan akan menguntungkan semua pihak.

2. Pemanfaatan Teknologi Untuk Mencapai Tujuan Bersama

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi di bidang ekonomi terdapat peluang untuk mencapai tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Apabila kondisi ini dapat dimanfaatkan diharapkan tujuan negara dapat tercapai dengan lebih efektif, efisien dan lebih cepat.

Istilah *sharing economy* dimulai dari dunia digital digunakan untuk mendeskripsikan berbagai bisnis *start up* dan model bisnis

yang menggunakan teknologi digital yang menghapuskan peran tradisional dari perantara. Selain *sharing economy* dikenal juga istilah: *collaborative economy*, *peer economy*, *on demand economy*, *collaborative consumption*, seringkali digunakan bergantian meskipun memiliki makna yang berbeda.

Pada prinsipnya konsep baru di bidang ekonomi yang ditawarkan dunia digital tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain:

Collaborative Economy: sistem ekonomi berbasis jaringan yang menghubungkan individu-individu atau komunitas-komunitas sebagai lawan dari sistem ekonomi yang terpusat pada institusi, yang mempertemukan kebutuhan (*need*) dan kepemilikan (*have*), memanfaatkan aset-aset yang kurang dimanfaatkan serta memotong peranan perantara.

Dalam menggunakan istilah ini, yang perlu dititikberatkan adalah apakah peran dari perantara dihapuskan. Sebagai contoh aplikasi yang memungkinkan konsumen membeli langsung tiket kereta dari PT KAI, tiket pesawat langsung kepada Maskapai Penerbangan (Garuda, Sriwijaya, Lion Group dll) dan juga sedang dikembangkan konsumen dapat membeli produk pertanian dari petani. Dalam beberapa hal konsep ini juga diadopsi oleh para penyedia jasa layanan belanja *online* seperti Blibli.com, Lazada, Bukalapak, Shopee dan lain-lain.

Collaborative economy telah mengubah apa yang dapat kita produksi, konsumsi, sistem keuangan dan sistem pendidikan. Contoh yang telah berkembang di Indonesia antara lain: di bidang konsumsi terjadi utilisasi maksimal suatu aset melalui model redistribusi dan sharing yang efisien. Contohnya adalah Airy atau Reddoorz_ mempertemukan orang-orang yang memiliki tempat atau ruang untuk disewakan (dalam hal ini dapat saja berbentuk apapun mulai dari rumah, kamar yang tidak terpakai, rumah untuk liburan) dengan orang-orang yang memerlukan tempat untuk digunakan.

Begitu juga dalam sistem keuangan, dengan berkembangnya dunia digital masyarakat dapat meminjam uang tanpa perantara bank. Di Indonesia, platform pinjaman secara online tanpa melibatkan perbankan sebagai penghubung antara lain dikembangkan oleh: uangteman.com; duitpintar.com; cekaja.com; kreditgogo.com dan lain-lain.

Dunia pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi model pendidikan terbuka antar individu yang mendemokrasi sistem pendidikan. Contoh: IndonesiaX menawarkan kelas-kelas pelajaran yang dibimbing oleh pengajar dari universitas terbaik Indonesia dan siapapun dapat belajar melalui platform ini. Konsep *Corporate University* yang sedang dikembangkan BPPK juga menawarkan kemungkinan belajar secara *online* tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Peer Economy: sistem ekonomi yang berbasis saling berbagi aset-aset yang kurang dimanfaatkan, secara gratis atau dengan bayaran, langsung dari individu-individu pemilik aset. Saat menggunakan istilah ini titik beratnya adalah apakah kegiatan tersebut membuka peluang untuk memanfaatkan aset (baik itu ruang, keterampilan, atau barang) yang kurang digunakan aset tersebut dilakukan secara *sharing*. Contoh : nebang.com dimana pemilik mobil menawarkan kursi kosong di mobilnya bagi penumpang lain dengan bayaran yang ringan yang cukup untuk menutup biaya tol ataupun bensin.

Collaborative Consumption: sistem yang membangkitkan kembali perilaku-perilaku perdagangan tradisional seperti menyewakan, meminjamkan, pertukaran, berbagi, barter, pemberian hadiah, melalui penggunaan teknologi yang dilakukan dalam skala yang tidak mungkin terjadi di era sebelum adanya internet. Sistem ini tidak hanya mengubah apa yang kita konsumsi tetapi juga bagaimana cara kita mengonsumsi. Ketika menggunakan istilah ini titik beratnya adalah apakah terdapat perilaku saling bertukar aset, yang semakin efisien dengan pemanfaatan teknologi. *Collaborative consumption*

memiliki ciri tertentu sebagai berikut :

- *Redistribution Markets*: meredistribusi barang yang tidak lagi diinginkan atau kurang dimanfaatkan. Contoh aplikasi OLX memungkinkan orang untuk membeli dan menjual barang bekas yang tidak terpakai lagi namun masih dapat dimanfaatkan.
- *Collaborative Lifestyles*: aset selain barang seperti ruangan, alat angkut, ketrampilan dan uang dipertukarkan dan diperdagangkan dengan cara baru. Contoh: Perusahaan Gojek menyediakan jasa antar jemput dokumen melalui aplikasi Go-Send, memesan makanan lewat aplikasi Go-Food, untuk menyelesaikan tugas-tugas ringan perorangan seperti berbelanja melalui aplikasi Go-Mart, membersihkan rumah melalui aplikasi Go-Clean dan lain-lain gaya hidup yang tidak terbayangkan pada awal dekade yang lalu.
- *Product Service Systems*: pengguna aplikasi ini membayar untuk memperoleh manfaat dari suatu barang dan bukan untuk memilikinya. Contoh BMW's "Drive Now" adalah jasa *sharing* mobil yang menawarkan alternatif kepemilikan mobil. Anggota sistem ini dapat menggunakan SIM-nya (yang telah dipasang *chip* khusus) untuk mengakses sebuah mobil pada saat dan tempat mereka memerlukannya dan membayar penggunaan mobil tersebut per menit.

On-Demand Services: Platform yang menghubungkan konsumen dengan penyedia barang/jasa dengan menggunakan teknologi dan menghilangkan peran perantara, sehingga penyedia barang/jasa dapat secara langsung mengirimkan kebutuhan konsumen saat itu juga. Contoh : *Pizza Hut Delivery* akan mengirimkan pesanan konsumen dalam waktu 30 menit, Gojek dan Grab mampu menghubungkan penyedia

layanan transportasi dengan pengguna dalam waktu yang singkat dan cepat tanpa mengenal batasan waktu.

3. Tatanan Baru yang Ditawarkan Dunia Teknologi

Tiga hal yang menyamakan sistem ekonomi yang ditawarkan dunia teknologi terkini adalah :

a. Kekuasaan yang didistribusikan

Di berbagai sektor, kekuasaan bergerak dari institusi besar yang terpusat ke jaringan individu dan komunitas, yang mengubah siapa yang kita percaya dan bagaimana cara kita mengakses barang dan jasa. Dari sudut pandang bisnis, model ini membicarakan mengenai penghapusan peran perantara melalui penggunaan teknologi. Dengan semakin berkurangnya peran perantara dalam sistem perekonomian maka akan mendorong ekonomi semakin efisien.

b. Sistem Baru

Keseluruhan ide terkait dengan kemajuan teknologi informasi menimbulkan sistem tata cara baru dalam perekonomian yaitu:

- Inovasi teknologi: jaringan sosial, pembayaran *online*, sistem identitas *online* serta *gadget* telah menciptakan kepercayaan dan efisiensi sehingga ide-ide ini dapat bekerja pada skala saat ini.
- Pergeseran nilai: masyarakat yang terhubung menyebabkan perlunya pemikiran baru mengenai apa yang dimaksud dengan kepemilikan dan *sharing* di era digital ini.
- Realitas ekonomi: kesadaran yang berkembang bahwa kita perlu berpikir tentang kekayaan dan aset dari sudut pandang baru, serta mengukur pertumbuhan dengan cara yang lebih berarti.
- Tekanan lingkungan: adanya kebutuhan untuk penggunaan yang lebih baik akan sumber daya yang terbatas.

c. Penggunaan Aset yang Inovatif dan Efisien

Teknologi baru memungkinkan kita untuk menggunakan kapasitas terbuang berbagai sumber daya. Kapasitas terbuang ada di mana-mana, meskipun tidak selalu mudah untuk dilihat : seperti kursi kosong di mobil, kamar kosong di rumah yang tidak digunakan, barang bekas layak pakai yang tidak digunakan maksimal, keterampilan terpendam dan lain-lain. Optimalisasi kapasitas aset ini tentu saja akan mendorong terciptanya *output* baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Pro-Kontra

Sebagai hal yang relatif baru, konsep *sharing economy* tentu saja menghadapi banyak tantangan. Salah satu hal yang paling menonjol dari sistem baru ini adalah hilangnya peran perantara dan efisiensi yang ditimbulkannya. Dengan hilangnya peran perantara dan efisiensi yang terjadi, maka banyak pihak yang selama ini menikmati peran sebagai perantara dalam perekonomian menjadi kehilangan pekerjaan. Kehilangan peran tersebut juga berarti kehilangan pendapatan dari proses ekonomi.

Para pihak yang kehilangan peran tersebutlah yang merasa paling dirugikan. Kondisi ini dibuktikan dengan masih banyaknya daerah yang menolak beroperasinya transportasi *online*. Bagi pihak yang dirugikan dengan perkembangan teknologi tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Kemampuan penyesuaian diri justru mendorong kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat luas, karena teknologi baru juga memunculkan peluang baru dan peran baru. Lapangan kerja baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan tercipta dalam jumlah yang justru lebih banyak seperti profesi driver *online*, pemesanan barang dalam jumlah besar melalui toko *online*, jasa kurir dan pengiriman barang juga semakin berkembang pesat.

KESIMPULAN

Sharing economy menghubungkan individu/komunitas dengan individu/komunitas yang lain, mengoptimalkan penggunaan aset yang kurang dimanfaatkan, menghapus peran perantara dan memanfaatkan teknologi. Salah satu titik berat *sharing economy* adalah penghapusan peran perantara, optimalisasi aset yang tidak/kurang termanfaatkan dan pertukaran aset dengan memanfaatkan teknologi.

Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur, menciptakan fondasi perekonomian yang kuat dan penciptaan lapangan kerja baru akan sangat terbantu oleh inovasi masyarakat dan teknologi yang terus berkembang. Ketika sistem ekonomi yang berbasis digital mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan efektif, berarti hal tersebut seiring dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan membantu terciptanya kesejahteraan rakyat. Tidak ada alasan yang kuat bagi negara untuk membendung berkembangnya *sharing economy*, malahan negara harus mendukung dengan segera menciptakan regulasi yang tepat agar semua pihak diuntungkan dan dapat berkembang sehingga mendorong terciptanya kemakmuran bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Jonathan Gruber, 2011, *Public Finance and Public Policy*, third edition, New York,

Worth Publisher;

Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta

Kementerian Komunikasi dan Informasi: Indonesia Akan Menjadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+JADI+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita_satker

Mankiw, Gregory N, 2006, *Macroeconomics*, 6th edition, Worth Publishers, New York.

Rachel Botsman:

<http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition>

Tempo.com: Ekonomi Digital di Indonesia: Raksasa Asia Tenggara

<https://investigasi.tempo.co/193/ekonomi-digital-di-indonesia-raksasa-asia-tenggara>

Liputan6.com: Pertumbuhan *e-commerce* Indonesia Tertinggi di Dunia

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2957050/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>

KOKO INARTO
WIDYAISWARA BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR

MEMAHAMI PENGATURAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN JABATAN

“Perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan pada Kementerian/ Lembaga”

Demikian potongan pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada April 2015 sebagaimana dikutip CNN Indonesia saat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Inti dari PMK tersebut adalah mengatur jumlah maksimal dan spesifikasi kendaraan jabatan yang dapat dimiliki oleh pejabat di suatu unit pada Kementerian/Lembaga.

PMK ini memberikan batasan jumlah maksimal sekaligus spesifikasi kendaraan jabatan yang sebelumnya belum pernah diatur secara jelas. PMK ini diterbitkan sebagai bagian dari kebijakan perencanaan kebutuhan barang milik negara yang mulai dijalankan sejak tahun 2015 untuk menjalankan PMK No. 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Secara umum, perencanaan

kebutuhan barang milik negara dijalankan oleh Kementerian/Lembaga melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) disusun 2 tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (T-2), sehingga secara mudahnya posisi penyusunan RKBMN dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. RKBMN K/L untuk Tahun Anggaran 2020 disusun pada 2018 (T-2) untuk mendapatkan Hasil Penelaahan RKBMN K/L Tahun 2019 dari Pengelola Barang.
2. Hasil Penelaahan RKBMN K/L Tahun 2020 menjadi salah satu dokumen kelengkapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2020 yang disusun pada tahun 2019 (T-1) yang disampaikan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara K/L, Kementerian Keuangan, dan

Kementerian PPN/Bappenas

3. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menghimpun RKA-K/ L Pagu Anggaran hasil penelaahan menjadi himpunan RKA-K/ L untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya.

KENAPA KENDARAAN JABATAN YANG DIATUR?

Dalam penyusunan RKBMN, PMK No. 150/PMK.06/2014 mengamankan bahwa ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN yang diatur dalam PMK tersebut adalah meliputi perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Khusus untuk perencanaan pengadaan BMN, pada pasal 9 ayat (1) PMK tersebut mengatur bahwa penyusunannya hanya dapat dilakukan terhadap BMN yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)-nya.

Saat ini, Menteri Keuangan telah menetapkan beberapa PMK yang

mengatur tentang SBSK untuk pengadaan BMN yang terdiri atas:

1. SBSK untuk pengadaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan untuk gedung kantor dan tanah dan/atau bangunan untuk rumah negara yang diatur dalam PMK Nomor 248/PMK.06/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 7/PMK.06/2016.
2. SBSK untuk pengadaan BMN berupa kendaraan jabatan yang diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.06/2015. Pengaturan standar untuk kendaraan jabatan sendiri merupakan hal yang baru bagi ranah perencanaan kendaraan BMN yang secara rinci adalah sebagai berikut:

Kualifikasi	Tingkatan Jabatan	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Jenis/Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)
A1	Menteri dan yang setingkat	2	Sedan/3.500 cc/6 silinder dan/atau SUV/3.500 cc/6 silinder
A2	Wakil Menteri dan yang setingkat	1	Sedan/3.500 cc/6 silinder atau SUV/3.500 cc/6 silinder
B	Eselon Ia dan yang setingkat	1	Sedan/2.500 cc/4 silinder atau SUV/3.000 cc/6 silinder
C	Eselon Ib dan yang setingkat	1	Sedan/2.000 cc/4 silinder
D	Eselon IIa dan yang setingkat	1	SUV/2.500 cc/4 silinder
E	Eselon IIb dan yang setingkat	1	SUV/2.000 cc/4 silinder
F	Eselon III dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor	1	MPV/2.000 cc bensin/4 silinder atau MPV/2.500 cc diesel/4 silinder
G1	Eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota	1	MPV/1.500 cc/4 silinder
G2	Eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota	1	Sepeda Motor/225 cc/1 silinder

Tabel SBSK Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri ("SBSK Kendaraan Jabatan")

Pengaturan SBSK kendaraan jabatan tersebut ditujukan agar penggunaan kendaraan jabatan dapat terstandarisasi, tertib, serta mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang sudah ada sehingga dapat menekan kebutuhan pengadaan kendaraan jabatan baru.

PERKEMBANGAN PENERAPAN PMK NOMOR 76/PMK.06/2015

PMK Nomor 76/PMK.06/2015 sendiri telah berlaku dan dijalankan mulai 2015 untuk penyusunan RKBMN Tahun 2017. Saat itu, Kementerian Keuangan memberikan modul yang digunakan oleh 15 K/L khususnya satuan kerja vertikalnya masing-masing melalui KMK Nomor 311/KM.6/2015 tentang tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Penerapan RKBMN sendiri dilaksanakan secara bertahap mulai dari 15 K/L pada tahun 2015, 16 K/L pada tahun 2016, serta mulai tahun 2017 yang lalu dan seterusnya seluruh K/L wajib menyusun RKBMN.

Dalam penerapan SBSK kendaraan jabatan antara tahun 2015 dan 2016 pada RKBMN Pengadaan, terdapat beberapa masalah khususnya mengenai bagaimana perlakuan terhadap *existing* kendaraan jabatan apabila terdapat usulan rencana pengadaan kendaraan jabatan baru dari satuan kerja kepada K/L. Secara umum yang diperhitungkan sebagai *existing* dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan kendaraan jabatan adalah data subkelompok kendaraan bermotor pada satuan kerja yang terdiri atas:

1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - a. Sedan (3020101001)
 - b. Jeep (3020101002)
 - c. *Station Wagon* (3020101003)
 - d. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (3020101999)

2. Kendaraan Bermotor Penumpang
 - a. Mini Bus (3020102003)
 - b. Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya (3020102999)
 - c. Kendaraan Bermotor Roda Dua
 - d. Sepeda Motor (3020104001)
 - e. *Scooter* (3020104002)
 - f. Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (3020104999)

Apabila pada satuan kerja pengusul memiliki *existing* kendaraan dengan kodifikasi tersebut di atas maka satuan kerja tersebut harus memberikan bukti dokumen pendukung yang dapat diklarifikasi oleh Pengguna Barang (K/L) saat penelitian RKBMN dan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada saat *review* RKBMN. Penelitian dan *review* untuk usulan RKBMN Pengadaan Kendaraan Jabatan dimaksud adalah untuk memastikan bahwa usulan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh satuan kerja dan tidak menimbulkan pemborosan berupa kendaraan jabatan yang berlebihan.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa SBSK kendaraan jabatan diterbitkan sebagai batas tertinggi standar BMN yang dapat diusulkan pengadaannya maka dibuat modul penyusunan RKBMN Pengadaan kendaraan yang lebih jelas untuk menggantikan KMK Nomor 311/KM.6/2015 yang diterbitkan pada tahun 2017 yaitu KMK Nomor 577/KM.6/2017.

Selain itu sesuai dengan definisi Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, maka KMK Nomor 577/KM.6/2017 memperjelas optimalisasi *existing* kendaraan jabatan dengan beberapa opsi sebagai berikut: menyusun rencana penggunaan.

Rencana penggunaan terhadap *existing* BMN berupa AADB merupakan alokasi terhadap AADB yang telah ada dengan memperhatikan rencana penggunaan antara lain:

1. Status Tetap

Artinya kendaraan jabatan yang sudah ada tetap digunakan untuk menunjang kegiatan dinas operasional pejabat seperti sebelumnya selama ini. Dalam penyusunan RKBMN-nya, kendaraan jabatan tersebut dipertimbangkan sebagai kendaraan jabatan yang dapat dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pejabat yang mengajukan pengadaan tersebut.

2. Kendaraan jabatan dialihkan ke pejabat lain

Dalam mengalihkan kendaraan jabatan kepada pejabat lain, harus tetap memerhatikan Rencana Strategis K/L dan SBSK pejabat yang menerima pengalihan atau dengan kata lain hanya dapat dipenuhi sesuai jumlah dan batasan spesifikasi kendaraan jabatan yang dapat diperoleh pejabat yang menerima pengalihan tersebut. Misalnya seorang pejabat kepala kantor wilayah yang notabene adalah pejabat eselon II A ketika akan mengalihkan kendaraan jabatannya kepada seorang kepala kantor pelayanan yang merupakan pejabat eselon III A, maka pertimbangannya adalah kepala kantor pelayanan tersebut belum memiliki kendaraan jabatan dan tidak dapat kendaraan yang dapat dioptimalkan menjadi kendaraan jabatan serta spesifikasi kendaraan yang dapat dialihkan adalah maksimal berjenis MPV/2.000 cc bensin/4 silinder atau MPV/2.500 cc diesel/4 silinder.

3. Kendaraan jabatan digunakan sebagai kendaraan operasional yang dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:
 - a. Rencana Strategis K/L
Pelaksanaan alih fungsi kendaraan jabatan menjadi kendaraan operasional



FOTO : KOKO INARTO

dilakukan dengan pertimbangan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. Pertimbangannya misalnya tugas dan fungsi selama ini berjalan kurang optimal akibat performa kendaraan dinas operasional yang ada kurang baik (misalnya harus survei melibatkan stakeholders dengan mengelilingi wilayah kerja yang cukup luas) atau terdapat penambahan tugas dan fungsi untuk suatu satuan kerja yang tugas baru tersebut mengharuskan penambahan kendaraan.

b. Kewajaran kendaraan dari segi jumlah dan umur kendaraan yaitu terdiri atas:

- 1) Jumlah kendaraan dinas operasional setelah alih fungsi dengan beberapa asumsi sebagai berikut:
 - Pengalihan kendaraan jabatan menjadi kendaraan operasional dapat dilaksanakan jika jumlah kendaraan operasional kantor setelah pengalihan tersebut tidak melebihi standar jumlah maksimal kendaraan dinas operasional

yang berlaku pada masing-masing Pengguna Barang (K/L), dengan catatan pada Pengguna Barang telah mengatur secara internal mengenai jumlah maksimal yang dapat dimiliki satuan kerjanya. Contohnya di Kementerian Keuangan, telah terdapat peraturan yang mengatur jumlah dan spesifikasi kebutuhan rumah negara dan kendaraan dinas untuk satuan kerja di lingkungannya dengan Surat Edaran (SE) Nomor 9/MK.1/2015. Dengan demikian, satuan kerja di Kementerian Keuangan hanya dapat memiliki jumlah kendaraan operasional maksimal sesuai yang diatur dalam SE tersebut.

- Apabila Pengguna Barang belum mengatur secara internal jumlah maksimal kendaraan yang dapat dimiliki, maka umlah kendaraan operasional dengan adanya alih fungsi tidak boleh mengalami perubahan. Jika alih fungsi direncanakan karena adanya

rencana pemindahtanganan atau penghapusan kendaraan operasional yang ada maka rencana tersebut harus didukung dengan dokumen memadai sesuai ketentuan pemindahtanganan atau penghapusan BMN.

2) Umur kendaraan

Kendaraan jabatan yang direncanakan untuk dialihkan menjadi kendaraan operasional minimal telah berumur 5 tahun pada tahun yang direncanakan. Dasar penghitungan umur kendaraan adalah mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru atau mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. Jadi misalnya untuk RKBMN Tahun 2020 yang disusun pada tahun 2018 ini maka kendaraan jabatan yang dapat dialihkan menjadi kendaraan operasional adalah sekurang-kurangnya diperoleh tahun 2015 jika diperoleh dalam keadaan baru.

3) Jenis dan Spesifikasi

Jenis kendaraan jabatan yang akan dialihkan menjadi kendaraan operasional harus disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah kerja dengan kapasitas mesin tidak melebihi 2.500 cc.

Untuk memastikan PMK Nomor 76/PMK.06/2015 dan KMK Nomor 577/KM.6/2017 dilaksanakan, maka disinilah peran Pengguna Barang dan APIP K/L dalam proses penelitian dan review atas RKBMN Pengadaan yang diajukan oleh satuan kerja-satuan kerjanya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pengadaan kendaraan jabatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait baik peraturan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun yang diterbitkan di internal Pengguna Barang sendiri.

PENUTUP

Secara umum, dalam peraturan terkait perencanaan kebutuhan BMN dan khususnya yang tercantum dalam KMK Nomor 577/KM.6/2017 bahwa rencana alih fungsi kendaraan jabatan dan proses perencanaan kebutuhan BMN secara keseluruhan agar mengedepankan prinsip *value for money* dengan asas 4 E yaitu efisiensi, efektifitas, etis, dan ekonomis. Prinsip *value for money* ini dapat dipahami sebagaimana ditulis oleh Mardiasmo (2009) bahwa suatu pelaksanaan suatu kebijakan publik, program, atau kegiatan pemerintah yang ekonomis adalah *input* dari kegiatan tersebut diperoleh dengan jumlah dan kualitas tertentu yang didapatkan dengan nilai yang terendah, sedangkan efisiensi diukur dari perbandingan *output* dengan *input* kegiatan pemerintah dengan mengoptimalkan sumber daya *input* sampai tingkat kapasitas *output* tertentu, kemudian efektifitas terukur ketika tujuan organisasi pemerintah dapat tercapai dilihat *outcome* dari suatu kegiatan setelah dibandingkan dengan *output*. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan adanya etika dalam perencanaan kebutuhan kendaraan jabatan sebagaimana pendapat Cooper (1991) dalam Denhardt et al. (2003) bahwa seorang pegawai pemerintah (*administrator*) yang berada dalam masyarakat yang demokratis mempunyai peran yang responsif dalam melakukan pekerjaannya dengan selalu mengedepankan nilai profesionalisme dan akuntabilitas.

Singkatnya, dalam menyusun RKBMN Pengadaan kendaraan jabatan, satuan kerja harus benar-benar mempertimbangkan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis K/L-nya, menghitung *input*, *output*, dan *outcome* dari anggaran yang akan digunakan serta memperhatikan nilai dan norma yang ada di masyarakat sehingga RKBMN yang dihasilkan dapat terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan sesuai amanat Menteri Keuangan pada pembukaan tulisan ini.

REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
- PMK Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.
- KMK Nomor 577/KM.6/2017 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.
- Surat Edaran Nomor 9/MK.1/2015 tentang Jumlah Dan Spesifikasi Kebutuhan Rumah Negara Dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt. 2007. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Mardiasmo, Prof. Dr., MBA, Ak. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi IV/Cetakan I). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Supriadi, Agus, CNN Indonesia. *Menteri Keuangan Atur Spesifikasi Kendaraan Dinas Pejabat*. 24 April 2015.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150424091748-78-48915/menteri-keuangan-aturspesifikasi-kendaraan-dinas-pejabat>. (diakses 21 Mei 2018).

MUHAMMAD RIFKY SANTOSO
WIDYAISWARA BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN

HUBUNGAN ISTIMEWA KARENA PENGUASAAN: CELAH PERATURAN DARI KASUS PENGADILAN PAJAK

ABSTRAK

Peraturan perpajakan di Indonesia menetapkan tiga kondisi terjadinya hubungan istimewa. Salah satunya adalah penguasaan melalui manajemen. Untuk membuktikan adanya penguasaan ini kadang sulit karena tidak ada data. Pembuktian adanya hubungan istimewa bisa dilakukan melalui data yang diperoleh dari pihak ketiga, antara lain yang ada di internet. Dengan metode studi kasus dari putusan Pengadilan Pajak, ditelusuri data informasi apa yang bisa diperoleh untuk bisa mendukung ada atau tidak adanya hubungan istimewa. Hasil penelusuran data, diketahui bahwa seorang yang merupakan komisaris perusahaan di Indonesia dan juga merupakan pemilik serta CEO di grup perusahaan di luar negeri bisa menjadi salah satu kondisi adanya hubungan istimewa. Walaupun kondisi ini sedikit berbeda dengan contoh yang ada di PP 94 tahun 2010, secara konsep ada kemampuan untuk melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan. Fakta ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kebijakan dalam menentukan adanya hubungan istimewa karena adanya celah dari peraturan yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak, fakta ini bisa sebagai referensi untuk mengambil keputusan menjalankan usaha yang berhubungan dengan pihak yang ada hubungan istimewa.

Kata kunci : hubungan istimewa, penguasaan manajemen, alamat, Bawazir Group

PENGANTAR

Ketika ada hubungan istimewa (*related party*), maka harga atau nilai transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa harus diteliti ulang, apakah sudah wajar atau belum bila dibandingkan transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah menjelaskan kondisi dan fakta yang menetapkan kapan terjadi hubungan istimewa. Namun demikian, dalam prakteknya, masih terjadi sengketa dalam hal hubungan istimewa. Salah satu sebab adanya hubungan istimewa adalah adanya penguasaan melalui manajemen. Untuk itu akan dibahas masalah hubungan istimewa karena adanya penguasaan melalui manajemen secara langsung melalui metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan pengujian secara

rinci terhadap suatu latar atau peristiwa tertentu. Jenis studi kasus pada tulisan ini adalah studi kasus analisis situasi, yaitu menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Kasus yang akan dibahas terdapat di ringkasan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-61735/PP/M.IIIA/15/2015. Ringkasan Putusan ini Penulis dapatkan dari *website* Sekretariat Pengadilan Pajak.

FAKTA

PT. X diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2011. PT. X melakukan penjualan ekspor ke luar negeri. Menurut DJP, penjualan ini dilakukan terhadap pihak yang ada hubungan istimewa maka harga penjualan harus dikoreksi kewajarannya.

Wajib Pajak (PT. X) menyatakan bahwa penjualan ekspor tersebut tidak dilakukan dengan pihak yang ada hubungan istimewa. Tulisan ini akan membahas mengenai argumen dari DJP dan Wajib Pajak (WP) serta keputusan majelis hakim mengenai hubungan istimewa.

1. Alasan DJP

Beberapa data yang diajukan oleh DJP untuk memastikan bahwa PT.X melakukan penjualan ke pihak yang punya hubungan istimewa antara lain:

- PT. X (WP) melakukan penjualan ke Said Bawazir Trading Corp (SBTC). Alamat SBTC ini sama dengan alamat Marketing Representative for Middle East dari PT. X, yaitu “Bawazir Building, 5th Floor, Hamzah Shatah St, Bughdadiyah, PO BOX 11625 Jeddah 21463”.

- Salah seorang pemegang saham PT. X, yaitu Tn. Faizal Aboud Bawazir, merupakan Direktur Pelaksana di SBTC.
- Terdapat pinjaman/hutang (*short term loan agreement*) PT. X kepada SBTC sebesar USD 6 juta yang diberikan sejak Januari 2006 sampai dengan Desember 2009.
- Dua orang pemegang saham di PT.X mempunyai alamat *official e-mail* di website SBTC, yaitu:
 - Cholid Aboud Bawazir (Komisaris Utama) dengan alamat email: cholidbwz@sbtgroup.com, dan
 - Faizal Aboud Bawazir (Komisaris) dengan alamat email: faisalbwz@sbtgroup.com.

DJP beralasan bahwa alamat email ini hanya boleh dimiliki oleh pihak internal yang berkepentingan di lingkup perusahaan.

2. Alasan Wajib Pajak

Atas argument yang diberikan DJP, Wajib Pajak memberikan bantahan sebagai berikut:

- Said Bawazir Trading Corp. (SBTC) tidak berdomisili di Hamzah Shehata Street, West Bughdadiyah/5 PO Box 11624, melainkan di Villa 249, Hall Street Jeddah.
- Dari Akta Notaris nomor 4 tanggal 19 Maret tahun 2008 yang ditandatangani oleh Yahya Abdullah Waber, SH, notaris di Surabaya, dijelaskan bahwa RUPS menunjuk Saudara Faizal Aboud Bawazir sebagai Komisaris, bukan Pengurus (Direktur Pelaksana) sebagaimana didalilkan DJP atau Terbanding.
- Pinjaman sebesar USD 6 juta diakui ada dengan memberikan jaminan aset. Pinjaman ini merupakan hal biasa dalam hal pinjam meminjam dan bukan merupakan dalil adanya hubungan istimewa.
- Alamat e-mail @sbtgroup.com yang dimiliki Faisal Aboud Bawazir dan Cholid Aboud Bawazir dibantah dan tidak dipahami WP. Dikatakan juga

bahwa DJP tidak bisa membuktikan alamat email ini.

Pada ringkasan putusan pengadilan ini, tidak ada penjelasan apakah DJP melakukan *email forensic* atau tidak dalam untuk pengujian alamat email ini. Selain itu, dalam ringkasan putusan pengadilan ini tidak dijelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alamat email dan *website* yang diajukan DJP sebagai alat bukti.

3. Keputusan Majelis Hakim

Pasal 18 ayat (4) UU PPh menganggap ada hubungan istimewa yang berhubungan dengan kasus dalam Putusan ini bila:

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau samping satu derajat.

Dengan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh ini dan bukti-bukti para pihak dalam persidangan, maka Majelis Hakim meyakini tidak ada hubungan istimewa antara Wajib Pajak (Pemohon Banding) dengan SBTC.

PEMBAHASAN

Dari hasil pencarian di internet, diketahui bawah Wajib Pajak yang mengajukan banding ini adalah PT. Delta Pasific Indotuna. Untuk mengetahui bisnis perusahaan ini dapat dilihat di <http://delpi.co.id>. Kebenaran mengenai Tn. Cholid Aboud Bawazir sebagai Komisaris Utama di PT. Delta Pasific Indotuna

didapat pada berita yang disampaikan oleh www.merdeka.com. Dengan demikian, untuk Tn. Cholid Aboud Bawazir tidak ada perbedaan pendapat antara DJP dan Wajib Pajak. Data dan fakta yang disampaikan DJP benar untuk hal ini.

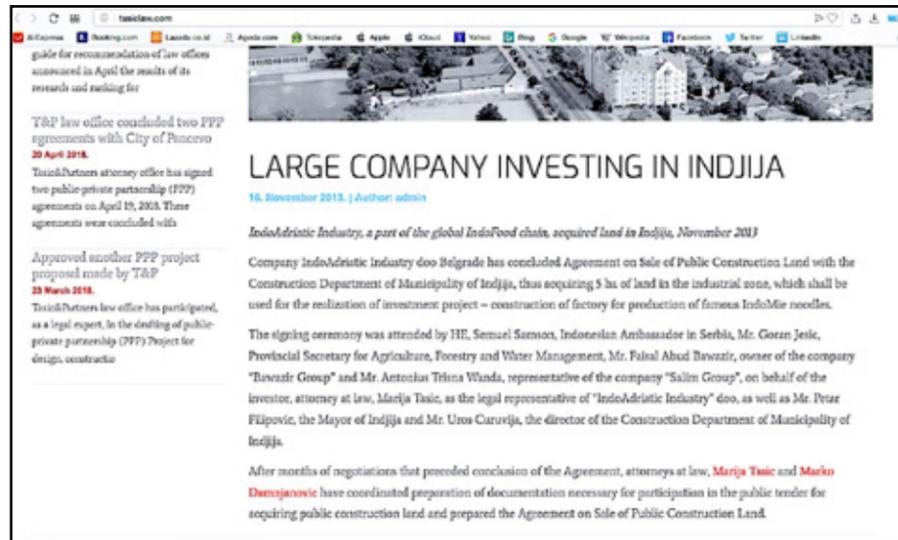
Mengenai posisi Tn. Faisal Aboud Bawazir sebagai Komisaris di PT. Delta Pasific Indotuna, tidak ada perbedaan pendapat antara WP dan DJP. WP memberikan bukti dengan akta notaris dan DJP memberikan data dari alamat email yang didapat dari *website* SBTC. Data mengenai Tn. Faisal Aboud Bawazir sebagai pemegang saham di PT. Delta Pasific Indotuna tidak ada pembelaan dari DJP setelah dibantah oleh WP. Penulis tidak bisa mendapatkan data mengenai pemegang saham PT. Delta Pasific Indotuna. Dengan demikian, disepakati bahwa Tn. Faisal Aboud Bawazir merupakan komisaris di PT. Delta Pasific Indotuna.

DJP menyatakan bahwa Tn. Faisal Aboud Bawazir juga merupakan Direktur Pelaksana di SBTC dan dibantah WP kalau Tn Faisal Aboud Bawazir hanya komisaris di PT. Delta Pasific Indotuna. Hal ini disimpulkan dari bukti yang dibawa WP berupa Akta Notaris yang terdaftar di Surabaya, Indonesia. WP tidak memberikan bukti kalau Tn. Faisal Aboud Bawazir bukan Direktur Pelaksana di SBTC. Penulis mendapat data bahwa Tn. Faisal Aboud Bawazir merupakan pemilik dari “Bawazir Group” (Gambar 1) dan merupakan CEO dari “Bawazir Group” (Gambar 2). Data yang diperoleh mengenai SBTC yang merupakan bagian dari Bawazir Group terdapat pada Gambar 3.

Di Gambar 1, dijelaskan bahwa Tn. Faisal Aboud Bawazir merupakan pemilik dari Bawazir Group. Walaupun data ini diungkapkan pada tahun 2013, namun penulis tidak mendapatkan data bahwa setelah tanggal berita ini ada pengalihan kepemilikan saham Tn. Faisal Aboud Bawazir di Bawazir Group. Dari Gambar 2 yang bertanggal 4 Februari 2013, diketahui bahwa Tn. Faisal Aboud Bawazir merupakan pengurus di Bawazir

Group dan diyakini sampai tahun 2015 masih menjabat CEO. Tahun 2015 adalah saat Putusan ini diucapkan, tepatnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2015. Dari Gambar 3, terlihat bahwa SBTC merupakan bagian dari Bawazir Group. Penulis tidak mendapat data apakah PT. Delta Pasific Indotuna merupakan bagian dari Bawazir Group atau tidak. Jika PT. Delta Pasific Indotuna merupakan bagian dari Bawazir Group, tidak diketahui juga bagaimana hubungan kepemilikan antara PT. Delta Pasific Indotuna dengan SBTC. Dengan demikian, dari sisi penyertaan modal, tidak dapat dipastikan apakah ada hubungan istimewa antara PT. Delta Pasific Indotuna dengan SBTC.

Jika dilihat dari sisi penguasaan, terutama penguasaan manajemen, maka terdapat hubungan istimewa antara PT. Delta Pasific Indotuna dengan SBTC. Dalam hal ini melalui Tn. Faisal About Bawazir yang merupakan Komisaris di PT. Delta Pasific Indotuna dan merangkap sebagai pemilik dan CEO di Bawazir Group. Fakta ini sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Contoh dalam PP No 94 ini tidak menyebutkan kalau pengurus bisa di level group dan hanya di level perusahaan. Namun secara



Gambar 1. Data Tn. Faisal About Bawazir Sebagai Owner dari Bawazir Group

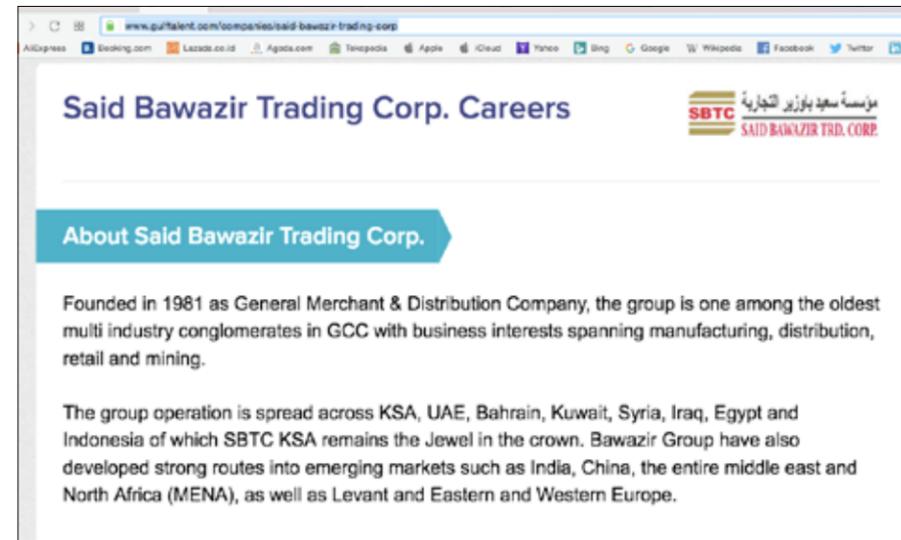
konsep dasarnya adalah adanya kuasa untuk melakukan intervensi dalam melakukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tentunya seorang pemilik merangkap CEO dan komisaris punya kemampuan untuk melakukan intervensi dalam melakukan aktifitas bisnis di perusahaan. Dengan demikian, terdapat hubungan istimewa antara PT. Delta Pasific Indotuna dengan SBTC dari sisi penguasaan manajemen.

Data yang didapat mengenai alamat SBTC terlihat ada Gambar 4.

Dari Gambar 4 yang diunduh pada tanggal 20 Agustus 2018 jam 14.03, diketahui bahwa alamat SBTC yang diberikan oleh DJP dengan penulis tidak berbeda. SBTC beralamat di jalan Hamza Shehata dan di daerah Bugdadiyah. Adapun alamat yang diberi WP, Villa 249, Hall Street, tidak dapat penulis temukan melalui internet. Sayangnya, penulis tidak bisa membuka situs resmi SBTC, yaitu <http://www.sbtcgroup.com> saat membuat tulisan ini. Dengan mencari dari *website* yang lain, diketahui SBTC mempunyai alamat korespondensi yang lain, yaitu Hail St.924, Bab Makkah Dist., P.O. Box: 11625, Postal Code: 214563, Jeddah, Saudi Arabia.

Dari Gambar 4 dan Gambar 5, tidak ada alamat yang sama dengan yang diberikan WP. Penulis tidak mengetahui apa memang ada alamat lain lagi yang diberikan oleh WP. Sesuai fakta yang penulis temukan, SBTC mempunyai alamat lebih dari satu, namun penulis tidak tahu apakah alamat yang diberikan WP termasuk salah satunya atau bukan.

Apakah data yang diperoleh melalui internet ini bisa menjadi bukti di pengadilan? Pasal 5 ayat (1) UU ITE



Gambar 3. Info SBTC

menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 1 butir 1 UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 butir 4 UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjelaskan

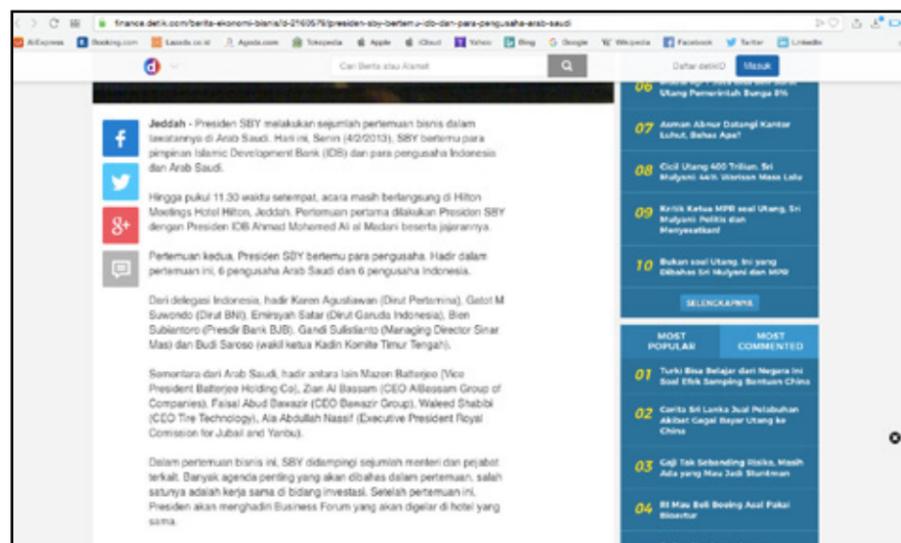
bahwa ada bukti yang tidak bisa dalam bentuk elektronik, yaitu:

- surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dimuat oleh pejabat pembuat akta.

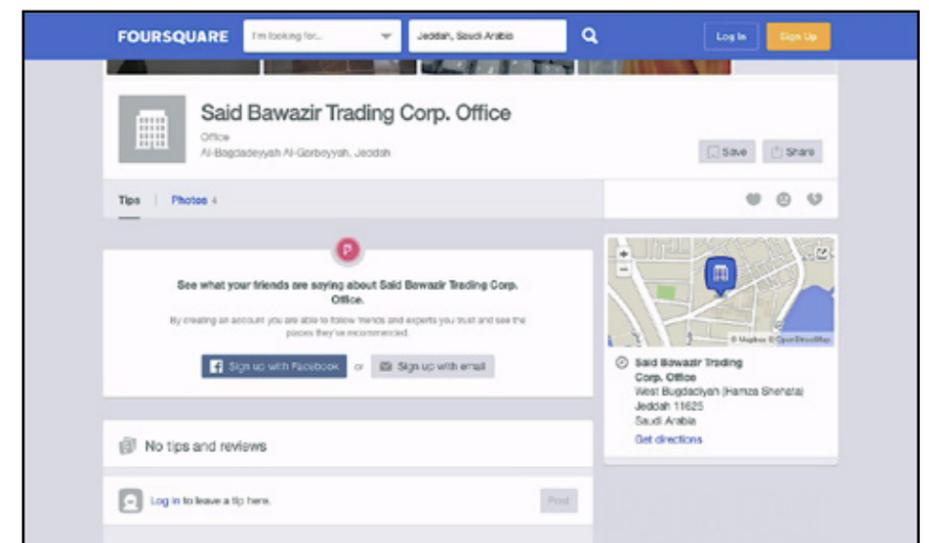
Dalam kasus ini, ingin dibuktikan apakah Tn. Faisal About Bawazir juga merupakan pemilik atau pengurus di SBTC atau di Bawazier Grup. Dari argumen yang diberikan oleh DJP, disebutkan bahwa Tn. Faisal About Bawazir merupakan pengurus di SBTC dan ini tidak dibantah oleh WP. Data elektronik menjelaskan bahwa Tn. Faisal About Bawazir merupakan CEO di Bawazir Grup. Berdasarkan informasi dari internet, diketahui bahwa SBTC merupakan bagian dari Bawazir Grup. Dengan demikian, bukti elektronik ini sebagai pendukung dari argumen DJP mengenai Tn. Faisal About Bawazir sebagai pengurus di SBTC dan tidak dibantah oleh WP.

Berdasarkan UU, bukti kepemilikan harus berdasarkan akta. Namun untuk perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal, tidak perlu ada akte untuk membuktikan kepemilikan, cukup bukti transaksi. Untuk kasus pengadilan ini, tidak ada data yang menjelaskan bahwa perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, diasumsikan semua perusahaan ini belum masuk bursa.

Untuk pembuktian alamat, penulis belum melihat perlu ada akta khusus yang menyatakan alamat satu pihak untuk bisa digunakan di pengadilan.



Gambar 2. Data Tn. Faisal About Bawazir Sebagai CEO dari Bawazir Group



Gambar 4. Alamat Kantor SBTC

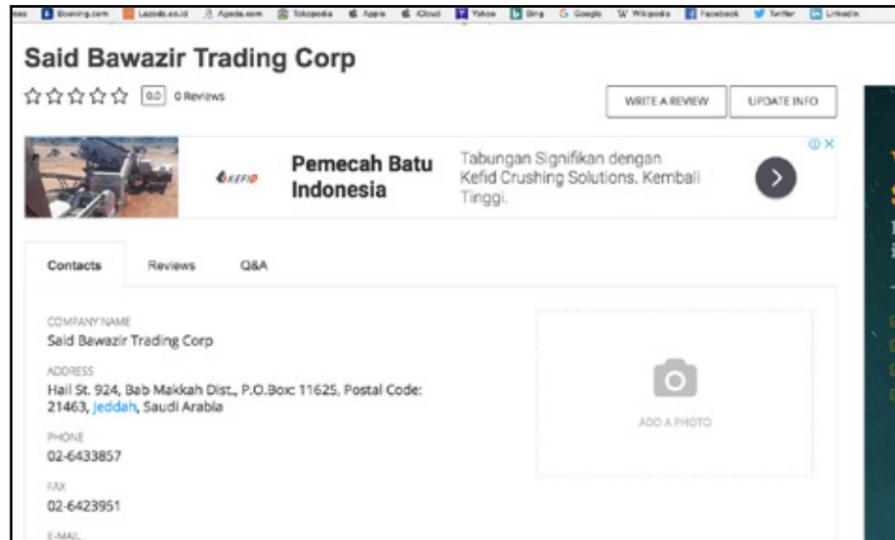
Dengan data elektronik yang diperoleh di internet, data alamat ini bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa sebenarnya SBTC mempunyai alamat lebih dari satu. Alamat yang diberikan WP sebaiknya bisa ditelusuri melalui internet, karena alamat SBTC yang lain juga bisa ditelusuri melalui internet. Alamat email dan website atau URL di internet bisa sebagai petunjuk untuk pembuktian di pengadilan.

Mengenai pinjaman antar perusahaan, sebenarnya bukan menjadi alasan adanya hubungan istimewa untuk tujuan perpajakan. Namun demikian, dengan melihat jenis usaha SBTC yang fokus dibidang distribusi, tentunya memberikan pinjaman sudah melalui beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah adanya kepercayaan yang diperoleh karena ada hubungan bisnis.

Ketika memberikan argumen dalam persidangan di Pengadilan Pajak, tentunya masing-masing pihak yang bersengketa memberikan data pendukung yang akurat dan valid. Data yang diberikan ini kadang bisa diakses oleh pihak lain, seperti di *website* atau internet dan kadang bisa tidak bisa diakses pihak lain. Tentunya Majelis Hakim sudah mempertimbangkan kemungkinan akses data ini. Untuk data alamat, tentunya bukan merupakan rahasia dan seharusnya bisa diakses oleh pihak publik, misalnya melalui google map. Dalam kasus ini, data alamat yang diberikan oleh WP tidak ditemukan melalui google map dan seharusnya menjadi pertimbangan dalam proses persidangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hubungan istimewa melalui penguasaan, terutama penguasaan manajemen, akan sulit dibuktikan karena kurangnya data dan informasi. Dengan tersebarnya data melalui internet, maka dengan mudah didapat data yang dibutuhkan. Bukti ini bisa menjadi alat bukti dipengadilan dan/atau sebagai pendukung alat bukti lain. WP yang bersengketa ini tidak diketahui punya hubungan istimewa



Gambar 5. Alamat SBTC

karena penyertaan modal, tapi hubungan istimewa karena penguasaan manajemen secara langsung terbukti ada. Dengan demikian antara PT. Delta Pasific Indotuna (WP) terdapat hubungan istimewa dengan SBTC. Penguasaan ini terjadi karena Tn. Faisal Aboud Bawazir merupakan komisaris di PT. Delta Pasific Indotuna merangkap owner dan CEO di Bawazir group. SBTC merupakan bagian dari Bawazir group. Tidak didapat data bahwa PT. Delta Pasific Indotuna merupakan bagian dari Bawazir group. Dari jabatan Tn. Faisal Aboud Bawazir di PT. Delta Pasific Indotuna dan adanya pinjam meminjam kedua perusahaan ini, disinyalir bahwa PT. Delta Pasific Indotuna merupakan anggota dari Bawazir Group.

Untuk data yang tidak bersifat rahasia, seperti alamat, ada baiknya bisa di konfirmasi dengan internet yang antara lain google map atau *website*. Ini untuk membuktikan bahwa alamat yang diberikan benar dan jelas. Bisa saja alamat yang ada lebih dari satu tapi masing-masing pihak mengklaim bahwa alamatnya yang benar. Padahal semua alamat yang diberikan bisa saja benar.

Ada perbedaan bentuk hubungan istimewa melalui penguasaan manajemen

secara langsung antara contoh yang ada di PP 94 tahun 2010 dengan yang ada di kasus pengadilan pajak ini. Bila hanya berpedoman pada apa yang ada di PP 94 tahun 2010 ini, maka akan menjadi celah untuk menghindari terjadinya hubungan istimewa. Perlu perbaikan atau tambahan contoh bagaimana terjadi hubungan istimewa karena penguasaan manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.merdeka.com/uang/jk-dapat-aduan-produksi-pengalengan-ikan-turun-produksi.html>

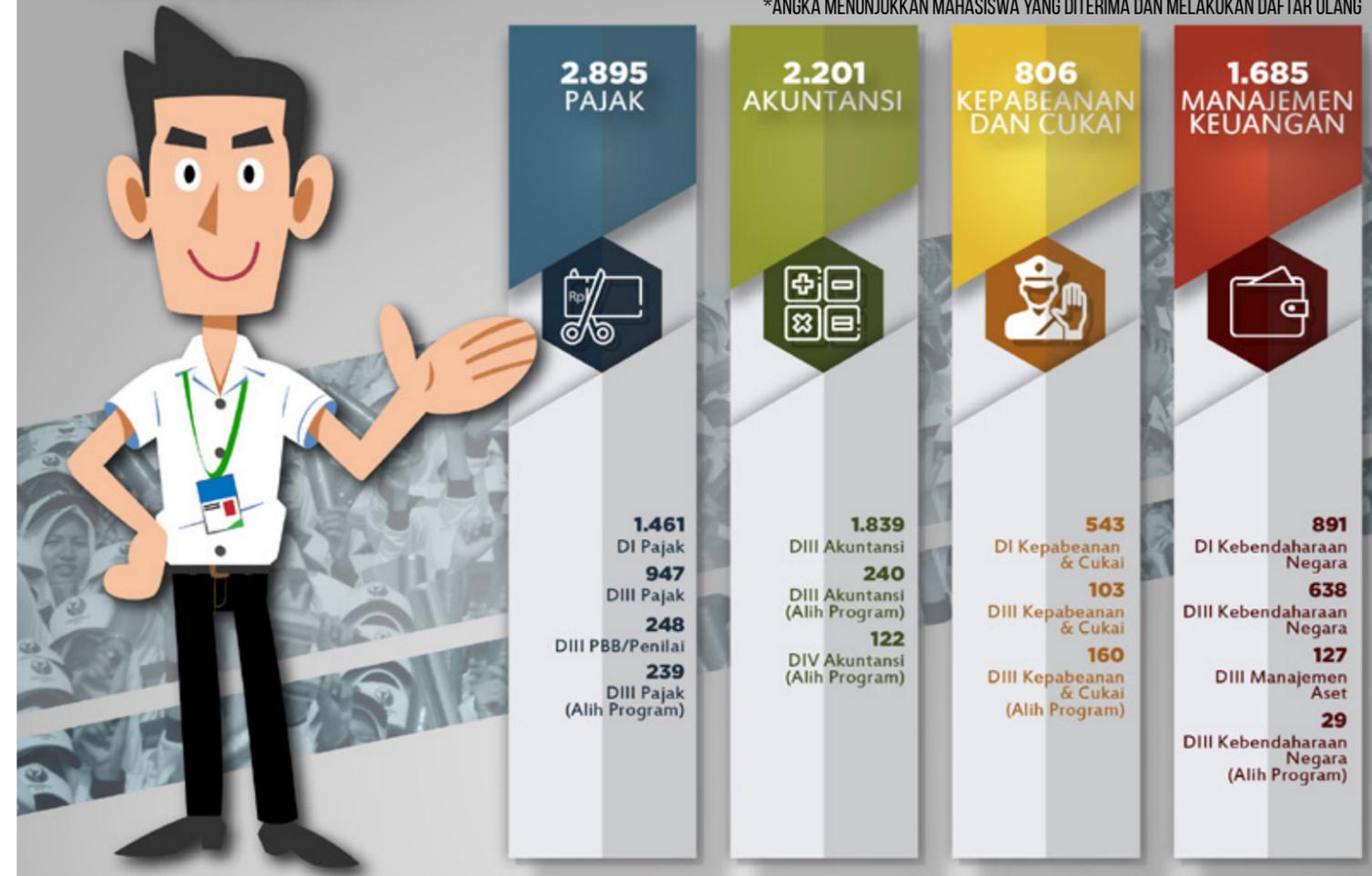
<http://tasiclaw.com/?p=129&lang=en>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2160579/presiden-sby-bertemu-idb-dan-para-pengusaha-arab-saudi>

<https://www.gulftalent.com/companies/said-bawazir-trading-corp>

SEBARAN MAHASISWA BARU PKN STAN TAHUN 2018

*ANGKA MENUNJUKKAN MAHASISWA YANG DITERIMA DAN MELAKUKAN DAFTAR ULANG



SEBARAN LULUSAN PKN STAN TAHUN 2018

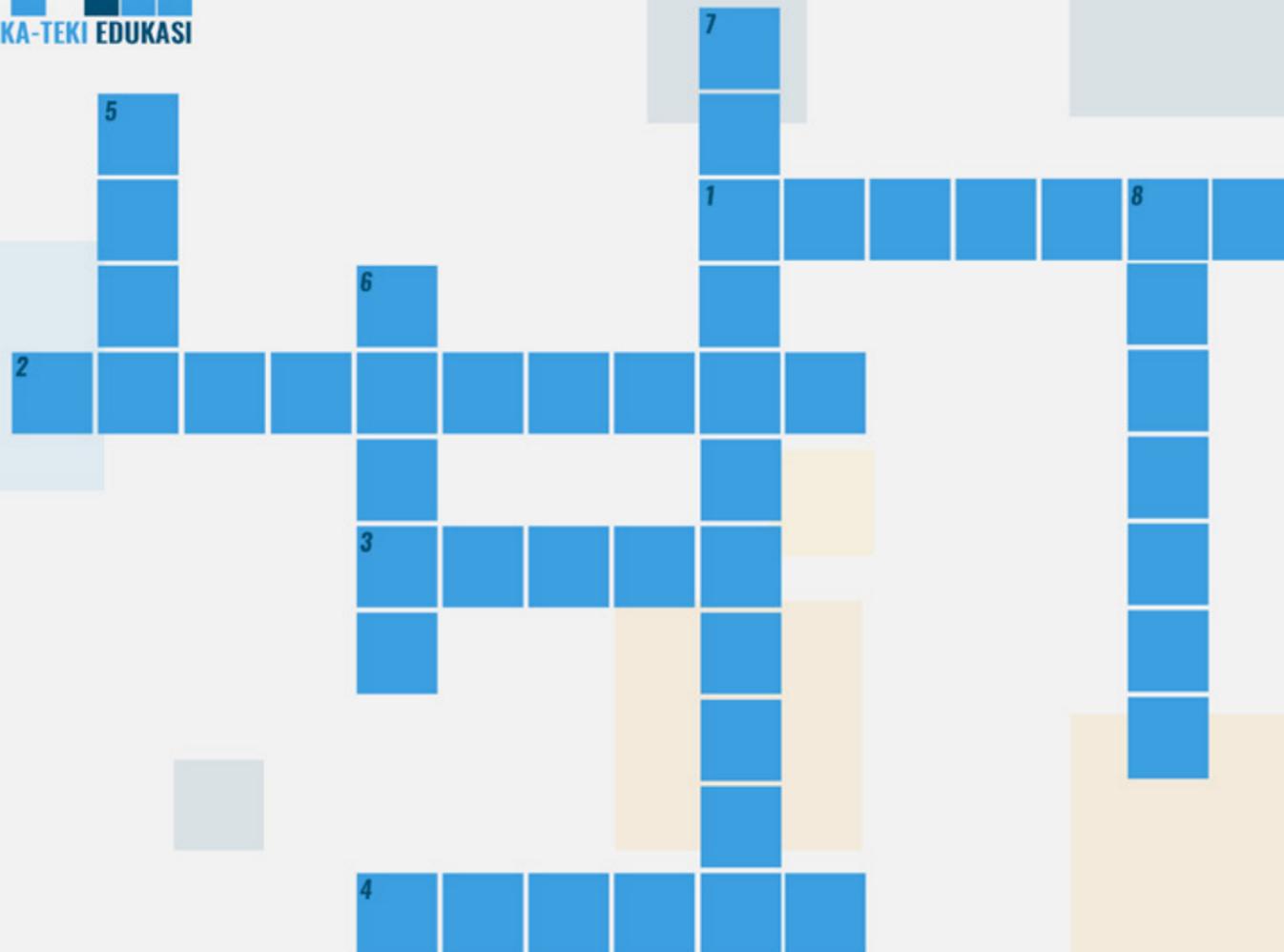


- 41 Kemenko Perekonomian
- 20 Kementerian BUMN
- 7 Kemenko Bidang Kemaritiman
- 34 Kementerian PUPR
- 15 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 10 Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 10 Kementerian Sosial
- 24 Kementerian Desa PDTT
- 15 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 15 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- 37 Kementerian Perhubungan
- 67 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 37 Kementerian Kesehatan
- 30 Kementerian Dalam Negeri
- 14 Ombudsman
- 15 Kementerian PAN-RB
- 22 Badan Pengawas Pemilu
- 12 Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 13 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 36 Kementerian Ketenagakerjaan
- 27 Badan Pemeriksa Keuangan
- 18 Kementerian Perindustrian
- 52 Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 16 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 8 Lembaga Ketahanan Nasional
- 5 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PEMENANG TEKI-TEKI EDUKASI EDISI 47
Ichzan Sobri



TEKA-TEKI EDUKASI



MENDATAR

1. Nama monumen yang merupakan sebuah tugu dan berada di Kalimantan Barat.
2. Kota yang memiliki ciri khas kuliner nasi gami
3. Kegiatan pengenalan instansi di lingkungan Kemenkeu dan K/L lainnya kepada mahasiswa PKN STAN (disingkat)
4. Pelatihan bagi para calon Aparatur Sipil Negara (disingkat)

MENURUN

5. Netherlands Indies Civil Administration
6. Dokumen perencanaan Barang Milik Negara untuk periode 1 (satu) tahun (disingkat)
7. Sebuah nama Jabatan Fungsional BPPK pengisi kolom Serambi Ilmu
8. Nama negara tempat menimba ilmu sang tokoh dari kolom cerita alumni

CARA BERPARTISIPASI:

- Follow akun Instagram BPPK: @bppkkemenkeu;
- Jawaban lengkap dikirim via email ke alamat: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id;
- Anda hanya boleh mengirimkan jawaban satu kali dan tidak diperkenankan melakukan koreksi;
- Cantumkan nama dan alamat lengkap Anda di badan email dengan subjek: Teka-Teki Edukasi 48;
- Ikuti ketentuan tambahan yang tercantum di post promosi majalah Edukasi Keuangan Edisi 48; di akun Instagram BPPK;
- Pengumuman pemenang akan disampaikan di majalah Edukasi Keuangan Edisi 49 dan melalui Instagram BPPK, dan;
- Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari tim redaksi.

Menengok Kisah Perjalanan Lahirnya Mata Uang Pertama Indonesia

RETYAN LAKSITA MUTIARY

Mata uang berfungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat pembayaran yang sah dan lainnya. Siapa pun pasti pernah melihat, memegang, bahkan memilikinya. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia di masyarakat. Kita kerap menggunakan uang untuk aktivitas segala transaksi.

Jika bicara tentang mata uang, khususnya mata uang Indonesia, tentunya kita bicara tentang Rupiah. Namun dibalik keberadaan mata uang ini, mengandung sejarah panjang yang patut kita ketahui. Bila kita buka kembali sejarah bangsa Indonesia pada saat merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah, maka hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sejarah lahirnya mata uang Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bahwa Proklamasi Kemerdekaan berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai bentuk pengumuman kemerdekaan Indonesia, pemerintah memandang perlu menciptakan simbol legitimasi kekuasaan, sebagai pembangkit rasa nasionalisme dan sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Sebuah alat juang yang juga merupakan tanda eksistensi republik baru. Alat itu adalah Oeang Rupiah Indonesia atau disingkat dengan sebutan "ORI".

LAHIRNYA ORI

Indonesia di masa sebelum proklamasi menggunakan mata uang Golden Belanda sebagai alat tukar mulai dari kurun waktu tahun 1610 hingga 1817. Sementara pasca Kemerdekaan 1945, mata uang De Javanische Bank, Gulden Hindia

Belanda, dan uang masa penjajahan Jepang masih beredar. Peredaran uang Jepang yang tak terkendali membuat tingkat inflasi meningkat. Realita yang terjadi di masyarakat, jumlah barang yang ada di pasar semakin langka, maka harga-harga di waktu itu meningkat dan muncullah hyperinflasi. Kondisi yang demikian membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus menyusun sebuah rencana untuk membuat mata uang sendiri yang laju persebarannya dapat segera dikendalikan.

Di saat yang bersamaan juga, Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) tiba di Indonesia dan mengeluarkan mata uangnya yang berlaku di Indonesia, penyebaran uang NICA ini atas saran Direktur Keuangan NICA kepada Dr. HJ. Van Mook. Mereka juga melakukan tindakan yang semakin memperparah keadaan moneter Indonesia. Menurutnya NICA dapat mengambil momentum dari semakin tingginya tingkat inflasi Indonesia, dengan tujuan agar ekonomi Indonesia semakin kacau dan hanya uang NICA yang akan berlaku di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil langkah cepat atas tindakan penyebaran mata uang tersebut. Pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat tanggal 2 Oktober 1945 dan 3 Oktober 1945 yang berisi mengenai pelarangan uang NICA. Namun karena jangkauan Pemerintah Indonesia yang masih tidak terlalu luas untuk menyebarkan maklumat ini, Pemerintah menjadi agak kesulitan meredam persebaran uang NICA terutama diluar wilayah Jawa. Di beberapa wilayah di

FAKTA ORI

Pemakaian nama rupiah dimulai sejak Bank Indonesia berdiri.

Sejak Belanda sepenuhnya mengakui kedaulatan Indonesia, pemerintahan yang sebelumnya disebut Republik Indonesia Serikat (RIS) berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini juga menjadi tonggak sejarah eksistensi Bank Indonesia yang resmi menggantikan De Javasche Bank yang didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Begitu BI mempunyai peran dan fungsi sebagai bank sentral, uang baru mulai dirilis yang hingga kini dikenal dengan sebutan Rupiah.



FOTO : PIXABAY.COM

Pulau Sumatera misalnya, penyebaran uang NICA ini berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat untuk menjadi alat pembayaran yang sah, walaupun di beberapa tempat juga terjadi protes penyebaran uang ini.

Selain masalah penyebaran mata uang, nilai dan harga mata uang itu sendiri masih terus menjadi perdebatan ketika itu. Mata uang Jepang masih populer di kalangan masyarakat walaupun nilainya terus menurun drastis. Di samping itu kebanyakan rakyat memang masih menggunakan uang tersebut sebagai simpanan mereka.

Kementerian Keuangan lewat menteri pertamanya yaitu AA. Maramis telah memulai proses pertama dari rencana pembuatan ORI. Pada tanggal 24 Oktober 1945, beliau memberikan instruksi kepada sebuah tim dari sebuah perusahaan percetakan Serikat Buruh *G. Kolff & Co* di Jakarta. Kondisi Surabaya ketika itu sangat tidak aman mengingat banyak terjadi konflik dan friksi antara tentara Indonesia dan Belanda. Disamping itu kondisi mesin dalam percetakan di Surabaya yang akan digunakan untuk mencetak uang juga tidak layak. Setelah Surabaya, tim ini kemudian menuju Malang, di mana terdapat sebuah percetakan yang layak. Tim kemudian merekomendasikan dua

tempat yaitu percetakan *G. Kolff* sendiri dan tempat kedua berada di Malang yaitu percetakan *Nederlansche Indie Metaalwaren en Emballage Fabrieken* (NIMEF).

Namun dua tempat yang menjadi rekomendasi ini dirasakan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pencetakan uang ORI. Ada beberapa kota lain yang kemudian menjadi rekomendasi setelah diadakan kembali peninjauan ulang, seperti: Surabaya, Solo, dan Yogyakarta, serta beberapa tempat lain di Jakarta. Menteri Keuangan kemudian membuat sebuah tim yaitu Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3 Tanggal 7 November 1945. Panitia ini diketuai oleh TRB. Sabaruddin yang merupakan Direktur dari Bank Rakyat Indonesia, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia dan Serikat Buruh Percetakan *G. Kolff & Co*. Panitia ini bertugas untuk mengatur usaha pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan ORI ini.

Setelah ORI selesai dalam tahap produksi, pemerintah masih belum bisa langsung mengedarkan uang ini. Pemerintah harus menyesuaikan terlebih dahulu kondisi moneter Indonesia dengan melakukan

penarikan mata uang Hindia-Belanda dan mata uang Jepang di wilayah-wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia.

Permasalahan mengenai penarikan uang di masyarakat sendiri bukan pula merupakan perkara yang mudah. Pemerintah tidak bisa secara langsung menarik semua uang yang beredar, karena akan terjadi kekacauan ekonomi ditengah di masyarakat, selain itu masyarakat juga butuh waktu untuk menukarkan uang-uang yang mereka miliki dengan ORI. Maka penarikan dilakukan secara berangsur dan dimulai dengan menarik dua mata uang terlebih dahulu. Golongan yang paling tidak diuntungkan adalah para petani, di mana pada masa Jepang mereka menjadi pihak yang memegang uang dikarenakan tugas mereka yang memproduksi beras. Di samping itu pemerintah juga harus menyesuaikan jumlah uang yang harus beredar, mengingat ada beberapa bagian wilayah Indonesia yang dikuasai oleh NICA yang sangat riskan jika disebarkan banyak uang.

Pemerintah melakukan tindakan lain berupa pelarangan orang-orang untuk membawa uang Jepang dengan nilai lebih dari 1000 dari daerah Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor dan Priangan ke daerah atau wilayah lain di Jawa dan Madura, tanpa izin dari Pemerintah Daerah yang

memiliki wewenang. Selain itu pemerintah juga melarang membawa uang Jepang dari luar Jawa masuk ke Jawa dan Madura dengan nominal melebihi 5.000, tanpa seizin dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pelarangan-pelarangan yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 1946, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya invasi berlebihan uang dari daerah lain yang dikuasai pemerintah Indonesia.

Selanjutnya pemerintah membuat rancangan undang-undang dalam rangka pengedaran ORI. Rancangan ini berisi himbuan agar masyarakat, perusahaan, badan lainnya untuk menyimpan sebagian uangnya di Bank. Kebijakan ini berlaku pada tanggal 15 Juli 1946 untuk wilayah Jawa dan Madura. Kebijakan mengenai keharusan menyimpan uang di Bank ini juga dikukuhkan lewat Undang-undang Nomor 18 tanggal 1 Oktober 1946, dimana salah satu poin dalam undang-undang itu berisi mengenai hari di mana uang ORI berlaku maka uang yang ditarik tidak berlaku lagi.

Pemerintah kemudian menerbitkan kembali UU Nomor 7 Tahun 1946 pada tanggal 1 Oktober 1946 dan UU Nomor 19 tahun 1946 pada tanggal 25 oktober 1946, dua undang-undang ini merupakan dasar yang mendukung penerbitan dan pengedaran ORI. Undang-undang ini mengatur masalah mengenai penukaran uang Jepang dengan ORI. Kemudian juga mengatur masalah cara pembayaran utang yang terjadi pada saat ORI masih belum dan setelah diberlakukan. Salah satu pasal yang mendasar dari UU ini yaitu mengenai aturan bahwa uang Jepang tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah sejak dimulainya pemberlakuan ORI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

FAKTA ORI

Lembaran rupiah tidak berbahan kertas

Meski disebut dengan uang kertas, namun lembaran rupiah nyatanya menggunakan bahan yang sama sekali bukan dari kertas. Bahan yang dipilih untuk membuat lembaran rupiah adalah kapas. Alasan dipilihnya kapas adalah karena menjadikan uang kertas mempunyai elastisitas tinggi sehingga tidak mudah robek dan tahan terhadap air.

FAKTA ORI

Kata rupiah berasal dari Bahasa Mongol. Setelah budaya tukar menukar barang menukar barang mulai dianggap rumit, masyarakat terdahulu lantas menggunakan emas dan perak untuk transaksi jual beli. Antara emas dan perak, yang sering digunakan adalah perak. Perak dalam Bahasa Mongolia disebut Rupia. Dalam Bahasa Sansekerta disebut Ru-pya, sampai di Indonesia disebut Rupiah. Konon akhiran "h" ini berasal dari pelafalan orang Jawa yang kerap menambahkan huruf tersebut di akhir kalimat. Jadilah sampai saat ini mata uang resmi negara kita dikenal dengan nama Rupiah.

Hari penerbitan ORI kemudian ditentukan, pada tanggal 30 Oktober 1945 dan pada hari itu pula ORI secara resmi beredar di Indonesia. Wilayah pertama yang menjadi tempat emisi ORI adalah Jakarta, di mana mata uangnya telah dipersiapkan dan ditandatangani pada November 1945 di Jakarta. Sebelum pemberlakuan dan penyebaran ORI, Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden melakukan pidato yang disiarkan lewat Radio Republik Indonesia satu hari sebelum ORI diberlakukan. Dalam pidatonya Hatta menjelaskan bahwa keberadaan uang ini merupakan sejarah bagi bangsa ini karena akhirnya memiliki mata uang sendiri. Dia juga mengharapkan dengan berlakunya uang ini, akan ada perubahan yang bisa dicapai dalam bidang perekonomian, terutama perbaikan hidup bagi rakyat Indonesia.

ORI terlahir atas gagasan dari Menteri Keuangan Sjafrudin Prawiranegara. Pemikiran mengenai ORI didapatkannya ketika beliau duduk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia. Hatta yang ketika itu menjadi wakil presiden tidak menyetujui sebelumnya gagasan mengenai ORI ini, namun setelah mengadakan semacam diskusi dengan Syafruddin, Hatta kemudian setuju dengan gagasan ini bahkan menjadi salah satu pendukung dari pembuatan uang ini pada perkembangan selanjutnya. Kebijakan mengenai pencetakan uang inilah yang diambil oleh Departemen Keuangan, karena selain berfungsi mengatasi inflasi ketika itu, keberadaan uang baru ini juga menjadi simbol dari negara Indonesia yang merdeka.

Public Speaking ala Socrates

PF SUSANTI
MAHASISWI PASCASARJANA STF DRIYARKARA

Kemampuan berbicara di depan umum atau yang biasa kita kenal dengan *public speaking* bukan lagi kecakapan yang hanya diperuntukan pegawai bidang kehumasan saja. Nyaris semua bidang kerja menambahkan kemampuan *public speaking* dalam daftar kompetensi. Serentetan tugas-tugas pokok pekerjaan kita per detik ini, suka tidak suka akan melibatkan publikasi ke khalayak. Era keterbukaan informasi menuntut setiap orang mampu menjadi komunikator yang baik. Bahkan kalau perlu, sebagai *public speaker* yang handal.

Konon, Socrates tersohor karena kepandaianya dalam mengolah kata-kata sehingga membuat masyarakat di sekitarnya terpengaruh oleh pemikirannya. Socrates memiliki kemampuan retorika yang bagus, setiap ia melontarkan satu atau dua pernyataan dan pertanyaan, siapa saja di sekitar akan suka rela ikut berpikir tujuh keliling bersamanya. Ia mempengaruhi masyarakat dengan masif, bahkan ia punya pengikut fanatik. Ia dianggap sebagai ‘provokator sekaligus orator’ pada masanya, yang membuka celah pengetahuan dan keyakinan baru dalam tatanan masyarakat kala itu. Meski akhir hayatnya dikisahkan berakhir tragis, ia

dinobatkan sebagai guru bagi pengikutnya yang haus ilmu.

Retorika, dalam KBBI adalah kemampuan berbahasa secara efektif; seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Tentu saja, untuk berkomunikasi secara baik, kemampuan retorika ini wajib dikuasai terlebih dahulu. Permainan gramatikal dan semiotika yang apik akan menarik telinga yang mendengarnya.

Kita harus paham juga, bahwa seorang Socrates tidak akan punya banyak pengikut jika ia tidak memiliki ikatan dengan masyarakat di sekitarnya. *Public speaker* yang baik wajib mengenali hadirin-penonton-pendengar yang disasar. Kita harus tahu pemilihan diksi yang tepat dan level pengetahuan yang akan disampaikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, organisasi, dan karakter antroposial pendengar. Minimal, seorang *public speaker* harus sadar dengan siapa ia berhadapan sehingga dapat mencari celah mengambil hati pendengar.

Metode yang digunakan Socrates ketika hendak memantik diskusi dengan masyarakat ialah dengan melontarkan pertanyaan subtansial pada orang yang dikehendaknya. Socrates dikenal dengan metode dialektika. Pastikanlah pada tiga puluh detik pertama, anda sudah mendapatkan perhatian audiens. Melontarkan pertanyaan adalah cara yang digunakan Socrates, satu alternatif paling mudah untuk mendapatkan atensi pendengar. Ada banyak cara untuk menarik perhatian audiens, setidaknya kurang dari satu menit kita harus membuat pendengar menyimak materi informasi yang akan kita sampaikan selanjutnya.

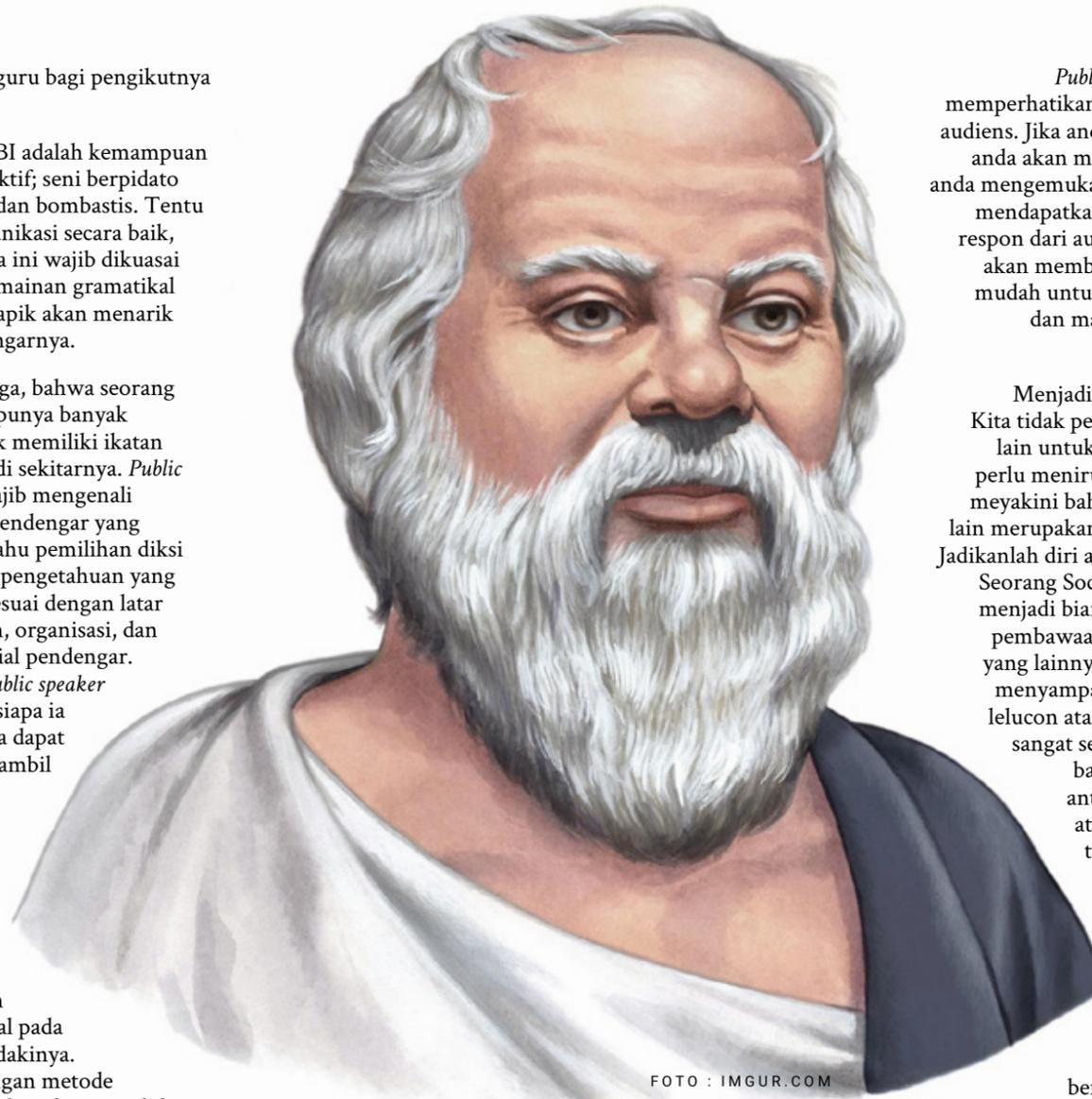


FOTO : IMGUR.COM

Public speaker yang baik harus memperhatikan umpan balik dan respon audiens. Jika anda bertanya pada audiens, anda akan mendapatkan jawaban. Jika anda mengemukakan pendapat, anda akan mendapatkan komentar. Memastikan respon dari audiens berkesinambungan akan membuat seorang *public speaker* mudah untuk memasukkan informasi dan materi. Bahkan kalau perlu, mempersuasi.

Menjadi diri sendiri adalah kunci. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk terlihat hebat. Kita tidak perlu meniru. *Public speaker* yang baik meyakini bahwa berbeda dengan yang lain merupakan keunikan yang berguna. Jadikanlah diri anda pribadi yang *genuine*. Seorang Socrates tidak akan diangkat menjadi biang Sofis jika citra diri dan pembawaan gesturnya sama dengan yang lainnya. Beberapa orang pandai menyampaikan pesan dengan *frame* lelucon atau humor, beberapa orang sangat serius dan antusiasitik, atau bahkan ada pula perpaduan antara keduanya. Pembicara atau penceramah yang baik tahu persis bahwa sesekali humor perlu digunakan untuk memecah suasana.

Ide-ide besar selalu menantang. Konon metode berpikir Socrates ialah induksi; bertolak dari hal-hal khusus untuk mendapatkan kesimpulan atau hukum umum. Dalam kegiatan presentasi, metode ini efektif untuk menyamakan persepsi dan menghasilkan kesepakatan bersama.

Mengerucut soal presentasi, setidaknya seorang *public speaker* memahami bahwa presentasi yang baik ialah presentasi ekstempore; point-point penting harus jelas dan terpilah untuk disampaikan. Namun usahakan untuk tidak terlalu sering membaca teks *power point* meskipun ingin. Semakin banyak anda bertatap mata dengan audiens, semakin baik.

Kita mengenal Steve Jobs sebagai tokoh presentasi populer dan banyak dicontoh. Seminar zaman modern membutuhkan bantuan *power point* yang memudahkan kita untuk memahami garis besar materi. Ketika Socrates mulai banyak pengikut, kelas-kelas diskusi kecil mulai mengadakan seminar yang lebih besar. Socrates tentu tertinggal jauh dari cara manusia modern menayangkan teks dan audio visual di hadapan audiens untuk mempermudah penyampaian materi. Namun ada yang perlu kita ketahui, dalam keterbatasan itu seorang *public speaker* Yunani mulai mencengkeramkan pengaruhnya.

Hingga hari ini, adagium “keutamaan adalah pengetahuan” yang dikabarkan Socrates mendasari pola pikir hampir seluruh umat manusia.

ESRA JUNIUS GINTING
ALUMNI UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

Your Only Limit is You

Do not ever underestimate yourself! You are more than what you are thinking.

Memang terdengar klise bak ungkapan komersil para motivator. Bahkan saya sendiri pun awalnya abai terhadap klausa tersebut setelah jatuh bangun berjuang mengalahkan pesimisme “*mungkinkah saya bisa seperti mereka*”. Bukan tanpa alasan mengingat *so many failures* di beasiswa lain harus dihadapi sebelum mendapatkan *scholarship* dari SPIRIT WORLD BANK. Dengan kata lain, tiket *scholarship* diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa yang mungkin untuk orang tertentu sangat mudah untuk mendapatkannya.

MBA LIFE IN BIRMINGHAM

“*Siapa suruh ambil MBA? Bisa-bisa kapok sekolah lagi.*”

Itulah kebanyakan tanggapan rekan-rekan lainnya. Sangat beralasan mengingat program studi ini memang sangat menantang dengan segunung tugas pribadi, kelompok yang berbeda-beda, tugas proyek, ujian, dan disertasi. Membayangkannya saja saat ini saya seperti tidak percaya sudah menyelesaikannya semua itu. Tetapi di sinilah pemikiran kognitif, *managerial skills*, *interpersonal skills*, *strategy* dan *networking* dibentuk.

Perbedaan budaya dan *way-to-deal with something* menjadi isu utama. Hal ini terlihat pada awal-awal masa studi, rekan kelas dari negara *English speaking country* tampak sangat *talkative and easy*, sedangkan kami yang bukan dari sana, lebih malu berpendapat dan memanfaatkan waktu *break* untuk berdiskusi dengan dosen. Kenapa? Ya, malu nanti dianggap *stupid questions*, nanti dosennya tidak paham apa yang saya tanya, apa kata orang kalau saya tanya ini. *Barriers* itulah yang menghadang perkembangan saya selama seminggu pertama.

Akhirnya saya coba *set the goal* dan tidak tanggung-tanggung: ingin meraih *title MBA with Distinction* di universitas yang saya sangat impikan dari dulu, *University of Birmingham*. ‘Masa bodo’ apa

kata orang. Modal yang saya miliki saat itu hanyalah kepercayaan diri dan tekad teguh untuk melawan pikiran yang menghambat saya mencapai tujuan saya. Memang seperti pungguk merindukan bulan saat itu, mengingat ini MBA dan sangat *challenging*. Tetapi tekad itu semakin kuat karena sudah berkorban untuk berpisah jauh dengan keluarga yang dipisahkan benua dan samudera untuk sekian lama, dan saya sangat ingin mempersembahkan yang terbaik kepada mereka. Sehingga anak saya kelak melihat bahwa ayahnya adalah seorang petarung tangguh. Saya sengaja mengajak keluarga ke Inggris di dua bulan terakhir perjuangan saya dengan berbagai pertimbangan.

Akhirnya dengan cepat saya beradaptasi mengatasi *culture shock* dengan bergaul akrab dengan para pejuang handal di kelas dan masyarakat sekitar. Karena bahasa juga adalah bagian dari budaya, sehingga kalau setiap hari berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris maka bermimpi pun kita akan berbahasa Inggris. Satu masalah teratasi.

Permasalahan lain muncul ketika tugas kelompok dengan orang berbeda-beda di saat menumpuknya tugas pribadi dan persiapan ujian tulis dan presentasi dan dihadapkan dengan yang namanya *Deadline*. Di sinilah saya belajar *manage your time and energy* dengan menggunakan *google calendar* untuk merencanakan setiap jam kegiatan saya setiap hari bahkan sampai sekarang.

Setiap tugas dibuat *time schedule* dan target terukur yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengerjaan. Memang kualitas itu sangat penting, tetapi *speed* pengerjaan dan prioritas juga sangat tidak kalah penting. Di suhu yang hampir nol derajat celsius dan salju yang seharusnya indah, mengiringi pertarungan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai tengah malam di *library*. Tidur nyenyak seperti barang super mewah saat itu.

End of story? Tidak.

Saya mengawali semester dengan nilai yang sangat buruk di bawah rata-rata kelas. Untungnya saya memiliki *partner* belajar yang jauh lebih gigih dan *persistent* dari saya, Kinya Sunagawa, dari Jepang. Kami sangat sadar bahwa kecerdasan kami kalah dibanding yang lain, tetapi tidak dengan kegigihan, strategi, konsistensi, dan daya juang kami. Di sinilah saya belajar *Keep Going!* Kesulitan utama kebanyakan orang adalah *move on* sesegera mungkin dari kegagalan yang ada. Jika sudah merencanakan dan berjuang semaksimal mungkin dan hasilnya tidak sesuai harapan, ya *move on*. *You can not change the past, but you can build perfectly something that will happen*. Selanjutnya, tidak perlu membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain. Bisa *stress*. Haha. Selain itu, muncurlah lebih banyak *resources* dan *concerns* kepada tugas-tugas berbobot tinggi diyakini akan lebih efektif dan ber-*impact* pada hasil akhir.

Seiring berjalannya waktu, keajaiban pun muncul *beyond expectation*. Beberapa kali saya bahkan mendapatkan nilai tertinggi untuk *paper* saya di kelas yang bobot nilainya lebih besar. Nah, ini penting, bahwa setiap mencapai hasil memuaskan, saya dan beberapa rekan menyempatkan waktu untuk *short celebration* sebagai apresiasi diri dan me-*recharge* semangat untuk tugas-tugas lain yang *deadline*. Hal ini mungkin terkesan *useless*, tetapi apresiasi diri itu penting agar ada letupan-letupan warna hidup ini. Bagi saya, nilai tinggi tanpa diimbangi *fun and play* sepertinya *what a boring life!* Bangga? Iya. Senang? Iya. Tetapi setelah itu, lupakan. Konsentrasi lagi dengan semangat berlipat untuk mencetak *achievements* baru yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak cepat puas diri dan *Stay Hungry, Stay Foolish*.

Di tahapan akhir studi, ibarat *game*, ini adalah monster terbesar yang harus ditaklukkan *called dissertation*. Beruntung saya sudah mempersiapkan data sejak awal dari instansi saya Kementerian Keuangan dan sudah dari awal meminta kesediaan para ahli di bidangnya untuk menjadi

narasumber dalam mahakarya saya itu. Mengapa mahakarya? Hal ini dikarenakan dosen pembimbing saya ini terkenal sebagai sosok yang sangat perfeksionis di kalangan dosen Birmingham Business School bernama David Basset. *You know what, style* penulisan pun harus dalam bentuk *British Style*. Tidak heran jika disertasi saya dilakukan *review* tujuh kali sebelum *submit*. Tapi saya tidak kehabisan akal, beruntung saya sangat dekat dengan beberapa keluarga Inggris seperti John Ruck and Anne, ada juga Nick Devas dan Pamela karena sering bergaul dan berkunjung ke rumah mereka hampir setiap minggu. Nick Devas ini merupakan salah satu dosen pembimbing Wakil Menteri Keuangan saat ini Bapak Mardiasmo. Dan gayung bersambut, mereka dengan senang hati mengajari saya *British Style* yang terkenal dengan *pride-nya*. *How lucky I was*.

Mahakarya itu diberi nama ***Analysis of the Change Process in the Directorate General of Taxes of Indonesia: the Institutional Transformation Programme***. Sebuah tantangan yang sangat menarik

karena menurut David pelajar Asia lebih cenderung menyukai angka-angka dan metodologi kuantitatif. Saat itu saya memakai kualitatif *research* untuk *paper* akhir dengan sangat mempersiapkan pembangunan asumsi, teori *development*, filosofi metodologi yang harus terstruktur apik. Dalam penyajian data dan pemaparan analisis pun harus memiliki *logical thinking* yang kuat dan *reasonable*. Beliau selalu mengatakan “*what are you trying to do, and why?*” Apalagi semua itu harus disajikan dalam *British Style*.

Dalam analisis tersebut saya mengombinasikan berbagai teori seperti *Change Context* dan *features* nya, *Organisational Culture*, *Levers for Managing Change and Leadership Style*, *Impact Assessment*, *Stakeholder Management and Communication*. *Tools* analisis yang digunakan berupa *Kaleidoscope*, *Culture Webs Framework*, *Mobilise-Move-Sustain Model*, *Stakeholder quadran*, dan lainnya. Yang tidak kalah penting adalah kejelian dalam mengidentifikasi permasalahan menggunakan *Fishbone diagram* dan penggunaan *time horizon*. Seru sekali



FOTO : DOK. PRIBADI



FOTO : DOK. PRIBADI

mengembangkan kerangka-kerangka tersebut yang dimasukkan ke dalam proses transformasi yang sedang berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak saat itu. Mengingat yang mensponsori biaya kuliah saya di Inggris adalah negara, maka disertasi mahakarya ini pun harus *strongly related* dan meng-*address* isu utama di institusi saya yang saat itu bahkan sampai saat ini sedang melakukan reformasi perpajakan.

Singkat cerita, ketika diumumkan *overall achievement*, Puji Tuhan saya pun dianugerahkan gelar *MBA with Distinction* yang sejujurnya sampai saat ini pun saya seperti tidak percaya mendapatkan *title* yang diidam-idamkan setiap mahasiswa itu. Namun, banyak orang yang berpandangan, 'buat apa berjuang capek-capek meraih gelar *distinction*, toh di organisasi kita tidak ada pengaruhnya, yang penting lulus dan dari luar negeri, sudah'. *Friends*, begini. Ada *value* berwujud *responsibility* dan kebermanfaatannya diri yang melekat ketika kita berjuang habis-habisan dalam studi kita. Dan itu lebih dari hanya sekedar mengharapkan penghargaan orang lain atau organisasi. Kalau di *Mashlow Theory*, itu adalah *self-actualisation* yang merupakan tingkat kepuasan tertinggi manusia.

Sebagai penutup, saya mau mengakhiri cerita ini dengan sebuah kesimpulan sederhana. *No matter what people say, remember, YOUR ONLY LIMIT IS YOU*. Sangat 'wow', ketika orang sibuk membicarakan Anda, sedangkan Anda sibuk mencetak *achievements* baru setiap hari dan menembus sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak mungkin. Kenapa? Karena semangat itu sudah menjadi gaya hidup anda. Selamat berjuang, dan terus berkarya positif.

"Ada value berwujud *responsibility* dan kebermanfaatannya diri yang melekat ketika kita berjuang habis-habisan dalam studi kita. Dan itu lebih dari hanya sekedar mengharapkan penghargaan orang lain atau organisasi."



ANDI NUR SYAMSUDIN

GOOGLE FORM QUIZ ALTERNATIF KUIS ONLINE

Kemajuan teknologi turut membantu para pengajar dalam mengemas materi pembelajaran di kelas. Salah satu bentuknya adalah munculnya berbagai website yang memfasilitasi kuis *online*. Selama ini, *website* yang sering digunakan adalah Kahoot atau Quizizz. Nah, tulisan kali ini akan coba mengupas lebih banyak ke Google Form Quiz.

Dibandingkan dengan aplikasi sejenis, Google Form Quiz memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama adalah tampilan yang sederhana dan tidak dinamis. Kondisi ini membuat Google Form Quiz lebih cocok untuk kelas serius, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai aktivitas untuk menambah nilai aktivitas kelas. Selanjutnya, karena tampilannya yang minimalis, Google Form Quiz tak membutuhkan banyak kuota karena setiap pengerjaan kuis hanya memerlukan sedikitnya 2 kali momen: sekali saat URL masuk ke kuis, kedua saat *submit* (menyelesaikan kuis). Selain itu, dalam satu tampilan Google Form Quiz berisi seluruh atau sebagian pertanyaan kuis. Peserta bebas mengerjakan kuis sampai selesai, baru kemudian klik *submit* untuk mengirim hasil pengerjaan.

Berikut disampaikan langkah-langkah membuat kuis di Google Form Quiz

1. Yuk, Masuk ke Google Form!

Untuk bisa membuat *quiz* di Google Form, langkah awal adalah dengan membuka *browser*, ketik URL dengan: **gmail.com**, ketikkan *username* dan *password*. Setelah itu, klik **drive** sehingga tampilan akan menyerupai *windows explorer*, yaitu kumpulan-kumpulan *folder* dan *file* yang ditanam di *drive/cloud* versi google.

Klik tombol: "Tambah Baru", pilih "Lainnya" atau "Others". Lalu, klik Google Formulir, lalu kita mulai membuat dari form kosong. Tampilan akan berubah menjadi seperti yang terlihat di Gambar 1.

Gambar 1 menjadi fokus utama untuk penjelasan selanjutnya. Perhatikan nomor yang disebut pada gambar tersebut.

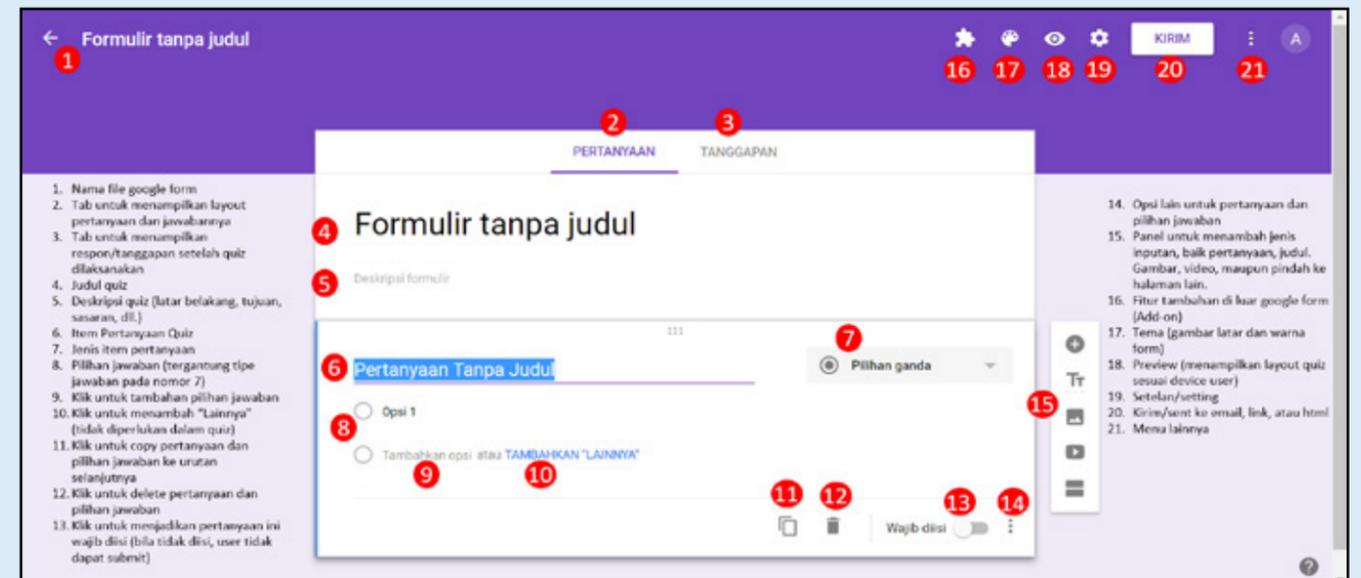
2. Mengaktifkan Fungsi Quiz di Google Form

Setelah memasuki google form, kita perlu memberi nama kuis, yaitu dengan mengklik nomor 4 dan nomor 1 (nama *file form*), lalu beri penjelasan tentang deskripsi kuis pada nomor 5. Lakukan aktivasi bahwa formulir ini adalah *quiz*, yaitu dengan mengklik nomor 19 (setting/setelan), sehingga muncul tampilan seperti pada Gambar 2. Setelah masuk ke tab KUIS, kita aktifkan: "Jadikan ini sebagai kuis."

Lakukan penyesuaian berupa *on-off*: rilis nilai *real-time* apabila peserta bisa melihat nilai segera setelah mengerjakan, serta tentukan pilihan-pilihan yang dapat disaksikan oleh peserta setelah selesai menjawab kuis.

3. Membuat pertanyaan dan jawaban

Langkah selanjutnya adalah secara berulang melakukan penambahan pertanyaan berikut jawaban, yang merupakan konten utama kuis. Langkah-langkah penambahannya seperti yang tercantum pada Tabel 1.



Gambar 1. Interface awal Google Form

No.	Action	Cara
1.	Mengetik soal/pertanyaan	Ketik di nomor 6 isi pertanyaan, contohnya: Apa nama unit yang mengelola pelatihan di Kementerian Keuangan?
2.	Menentukan tipe jawaban	Klik nomor 7 dengan pilihan tipe jawaban. Untuk tipe <i>multiple choice</i> bisa menggunakan <i>button</i> /pilihan ganda, untuk tipe esai bisa menggunakan jawaban singkat/paragraf/teks jawaban panjang. Masih banyak tipe jawaban lain yang bisa ditelusuri di nomor 7 ini.
3.	Mengetik pilihan jawaban untuk tipe pilihan ganda	Ketik masing-masing pilihan jawaban di nomor 8. Jumlah pilihan dapat ditambahkan terus menerus dengan mengklik nomor 9. Nomor 10 tidak digunakan apabila quiz bertipe pilihan ganda.

Tabel 1. Pilihan aksi di Google Form

Tahapan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 1 dilakukan berulang-ulang, sehingga jumlah pertanyaan akan memanjang ke bawah. Apabila direncanakan soal tidak diacak, kita perlu menuliskan angka urut di awal isian pertanyaan.

Apabila pertanyaan wajib dijawab peserta, maka nomor 13 perlu diaktifkan. Bila seluruh pertanyaan, wajib dijawab peserta, cara untuk mengesetnya sekaligus adalah dengan masuk ke menu (klik nomor 21), lalu klik preferensi, pilih: Buat Pertanyaan Diperlukan.

4. Menambahkan Gambar pada Pertanyaan dan Jawaban

Gambar atau video dapat diinput ke dalam *quiz* dengan cara mengklik panel nomor 15 (khusus *icon* gambar atau *icon* video). Akan tetapi, gambar/video tersebut dijadikan panel tersendiri, sehingga tidak dapat ditambahkan pertanyaan atau jawaban di dalam panel tersebut.

Apabila pertanyaan di-*setting* acak/*random* maka panel tersebut akan ikut teracak sehingga gambar dan pertanyaan akan berjauhan. Nah, cara menyiasatinya dengan menggunakan *icon* khusus pada panel pertanyaan. Lalu, mengambil file gambar, baik dengan cara *upload file* komputer, maupun cara lainnya. Adapun untuk menampilkan jawaban berupa visual/gambar, caranya dengan mengklik icon gambar.

5. Mengeset Jawaban yang Benar dan Mengelola Skor

Setelah pertanyaan dan jawaban diketik, klik kiri bawah pada tulisan: KUNCI JAWABAN. Klik jawaban yang benar (bisa lebih dari 1 pilihan) dan tentukan berapa skor yang diperhitungkan bila jawaban benar (pojok kanan panel pertanyaan).

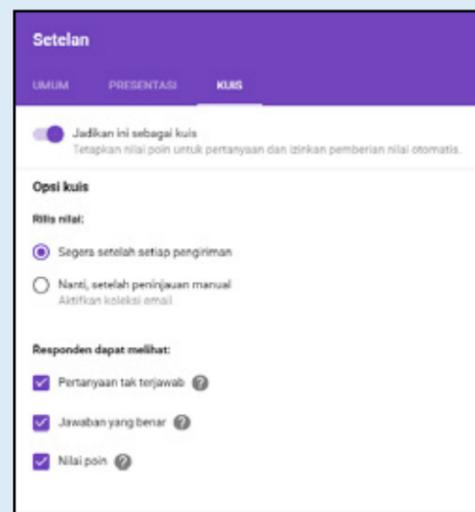
Bila seluruh pertanyaan, berikut form-form berikutnya memiliki skor tertentu (misal 10 poin), cara untuk mengesetnya sekaligus adalah dengan masuk ke menu (klik nomor 21), lalu klik Preferensi, pilih: Nilai Poin Kuis *Default*, tentukan berapa skor *default*-nya.

6. Mengeset Random Urutan Pertanyaan dan Jawaban

Kebutuhan agar tiap peserta menerima urutan pertanyaan berbeda, atau pilihan jawaban berbeda biasanya diperlukan untuk meningkatkan keamanan kuis, terutama agar mempersulit peserta saling mencontek. Google Form menyediakan fasilitas untuk mendukung hal ini.

Untuk mengeset random urutan pertanyaan, kita bisa mengklik nomor 19, lalu masuk ke *tab* Presentasi, klik acak urutan pertanyaan.

Adapun untuk mengeset *random* urutan jawaban, tombolnya terdapat di masing-masing pertanyaan sehingga harus di-*setting* satu-satu (kecuali untuk menambah pertanyaan, kita menggunakan tombol *copy* pertanyaan).



Gambar 2. Pilihan dalam setelan

Caranya dengan meng-klik nomor 14, lalu akan muncul menu berikut, pilih: Acak urutan opsi.

7. Meng-create ID Peserta dan Password

Bila seluruh pertanyaan dan jawaban sudah ditentukan, termasuk skor dan jawaban yang benar, kuis belum bisa dilaksanakan. Mengapa? Karena belum ada *field* unik yang menjadi identitas masing-masing peserta. Caranya dengan menambahkan pertanyaan, lalu ketik judul *field* tersebut dengan: NAMA atau NIP atau ID. Letakkan di awal kuis. Lebih mudah bila kita meng-klik *copy* (nomor 11) lalu mengganti isi pertanyaan, me-nol-kan skor, dan mengubah tipe jawaban menjadi teks singkat.

Bila ID berupa NIP, kita bisa menentukan validasi respon dengan mengklik nomor 14, lalu setelah muncul 4 pilihan (berupa: angka, teks, panjang, ekspresi reguler), klik panjang, kemudian setting sesuai kebutuhan.

Adapun untuk membuat *password*, kita bisa membuat *field* setelah ID/nama (dengan cara meng-copy panel), lalu setelah menamainya dengan password, kita tentukan validasi respon (klik nomor 14) berupa ekspresi reguler. Jangan lupa untuk menjadikan pertanyaan identitas dan password ini "*required*" alias "wajib diisi" oleh peserta.

Untuk mengoptimalkan pengisian identitas dan fungsi password, sebaiknya dilakukan pemisahan bagian, caranya dengan mengklik nomor 15 tombol paling bawah. Maka, akan ada 2 bagian panel yang dipisahkan oleh tombol NEXT atau BACK. Bagian pertama bertajuk "pengisian identitas", sedangkan bagian kedua bertajuk "konten *quiz*" berisi keseluruhan soal dan pilihan jawaban kuis. Fungsi pembagian ini adalah: apabila peserta tidak mengetahui *password* pada bagian identitas, maka ia takkan bisa masuk bagian kedua yaitu konten kuis, sehingga kuis yang kita buat hanya diakses oleh orang-orang yang mengetahui *password* yang kita edarkan.

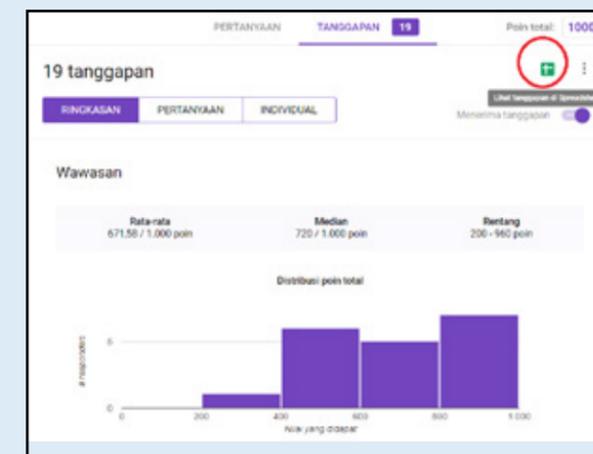
8. Mengedarkan Alamat URL

Setelah seluruh soal dan jawaban selesai ditulis di *form*, begitu pula nama, NIP, password, sekaligus pemisahan bagian, maka kuis kita siap sebar luaskan. Nah, caranya adalah tinggal klik tombol kanan atas bertuliskan: KIRIM (nomor 20), maka akan muncul beberapa opsi pengedaran, yaitu melalui alamat email (dapat lebih dari 1), melalui *link*, melalui HTML (pencantuman di web tertentu), dan media sosial (Google+, Facebook, dan Twitter).

9. Melihat dan Mengunduh Hasil Rekap Otomatis Quiz

Setelah kuis selesai dijawab para peserta, kita bisa melakukan pengelolaan pasca kuis dengan cara mengklik Tanggapan/Response (nomor 3). Untuk dapat melihat rekap kuis bisa dengan mengunduh

spreadsheet dari kolom tanggapan (klik tanda merah di atas), lalu setelah kita buka, maka akan muncul secara otomatis kolom baru berjudul SCORE pada kolom antara waktu *submit* (*timestamp*) dan kolom pertama yang kita buat (nama). Aktifkan filter kolom Score dengan mengurutkan dari yang tertinggi ke terendah, maka tampilan nilai akan seperti pada Gambar 3 dan siapa juaranya pun akan tampak.



	A	B	C
	Timestamp	Score	Nama
1	09/10/2018 22:39:19	960 / 1000	A
2	09/10/2018 22:39:27	920 / 1000	B
3	09/10/2018 22:41:30	920 / 1000	C
4	09/10/2018 22:39:17	880 / 1000	D
5	09/10/2018 22:40:30	880 / 1000	E
6	09/10/2018 22:40:43	840 / 1000	F

Gambar 3. Tampilan nilai dan juara

Demikian langkah-langkah penggunaan Google Form Quiz, selamat mencoba!



ANDI NUR SYAMSUDDIN

SIAPAKAH KITA SAAT MENGIKUTI PELATIHAN?



FOTO : PIXABAY.COM

Motivasi kita dalam mengikuti pelatihan berpengaruh terhadap sikap kita selama pelatihan. Kemampuan peserta pelatihan dalam menyerap materi pembelajaran dapat diibaratkan seperti kemampuan tanah dalam menyerap air.

Mengikuti program pelatihan merupakan hal yang lazim bagi pegawai. Pepatah mengatakan bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Walaupun demikian, ada kalanya kita sebagai peserta merasa sangat antusias dalam mengikuti pelatihan. Mungkin kita merasa materi yang diajarkan sangat menarik dan sejalan dengan kebutuhan pekerjaan atau minat pribadi. Namun ada kalanya pula kita merasa kehadiran kita di pelatihan hanya sekedar saja. Motivasi kita dalam mengikuti pelatihan berpengaruh terhadap sikap kita selama pelatihan. Kemampuan peserta pelatihan dalam menyerap materi pembelajaran dapat diibaratkan seperti kemampuan tanah dalam menyerap air. Dari pengalaman mengikuti pelatihan selama bertahun-tahun, mari kita telisik, sosok “tanah” apakah yang mempresentasikan diri kita.

Berdasarkan kemampuannya dalam menyerap air hujan, ada 3 jenis tanah, yaitu Naqiyyah, Ajadib, atau Qi’an*). Yang pertama bertajuk Naqiyyah, secara harfiah berarti murni. Ia baik dalam menyerap air. Di alam nyata, ia merupakan tanah gembur nan subur dengan cacing tanah sebagai aktor yang berperan meronggakannya. Rongga inilah tempat air bersinergi dengan mineral tanah, menghasilkan zat-zat berfaedah yang membuat banyak vegetasi betah hidup di atasnya.

Alhasil, dari tanah jenis ini lahir banyak jenis tumbuhan. Manusia dan hewan pun bisa mengambil manfaatnya. Dimakan langsung, dipanen, disimpan, hingga dimasak untuk menyambung hidup. Manfaat jenis tanah ini bertaburan, seiring dengan banyaknya tanaman yang dapat ditumbuhkan.

Jenis tanah yang kedua berjudul Ajadib. Ia bukan jenis yang gembur, apalagi subur. Cacing tanah *ogah* hadir menggempur. Jaringannya padat tak berongga. Bila hujan turun, air bukan memasuki rongga, bukan menyedap ke dalam inti tanah, akan tetapi sekedar tertampung menggenangnya. Maka, air itu akan mengumpul membentuk telaga, waduk, atau danau. Air itu terhimpun di atasnya, sehingga makhluk lain bisa mengambil

manfaat darinya. Melalui minumannya, tempat ikan-ikan hidup, atau manusia mengambilnya untuk mandi dan cuci-cuci.

Lain lagi dengan jenis yang ketiga. Qi’an namanya. Ia tanah yang tiada guna. Ketika air hujan turun, tak sedikitpun ia memberi peran terhadap air itu. Tak mampu ia serap agar tumbuh tetanaman. Tak juga mampu ia tampung agar genangnya berfaedah. Air hujan hanya lewat, lantas masuk ke dalam bumi, bergabung dengan air-air tanah yang lain. Tanah jenis Qi’an ini seolah menyia-nyiakan kebermanfaatannya air yang mampir menghampiri dirinya.

Lalu, kita coba kembali ke lintasan tanya di atas. Saat kita menghadiri pelatihan, posisi hati kita sedang berada di mana? Apakah di kantor sedang memikirkan pekerjaan kita? Atau sedang di rumah membayangkan urusan utang dimanamana, hingga permasalahan keluarga?

Kalau terhadap ilmu yang kita sedang mengikuti pelatihan di dalamnya, kemudian hati dan seluruh organ kita fokus, maka diri ini ibarat naqiyyah. Cacing-cacing tanah di dalam hati akan menyediakan rongga, agar tumpahan air yang penuh berkah bertajuk ilmu ini mampu bersemayam di dalamnya. Dari ilmu ini hadir kinerja (perbuatan/amal), sehingga orang lain, terlebih rekan kerja, teman sejawat, bahkan atasan langsung dan tidak langsung, meraih manfaat darinya. Mereka memakan, memanen, hingga memasak hasil-hasil kerja yang kita lakukan.

Kalau terhadap ilmu yang kita sedang mengikuti pelatihan di dalamnya, kemudian hati ini tidak fokus, akan tetapi gerak-gerak tangan kita lincah dan riang menyambut ilmu tersebut. Maka diri kita ibarat ajadib. Kita kumpulkan semua bahan, mulai dari *word*, *slide*, pdf, hingga video. Belum cukup, kita catat dengan saksama, baik apa disampaikan secara klasikal maupun diskusi yang alot berjalan. Belum cukup, minta *file* ke pengajar, lalu hadirilah bagi kita hasil tampungan itu: satu buah map fisik berisi semua bahan pelatihan, plus satu buah

folder di komputer berisi hasil pelatihan selama sehari-hari. Yang mengambil manfaat siapa? Tentu yang hatinya fokus terhadap ilmu yang dipelajari, bisa jadi orang lain yang membaca folder atau map yang dibawa si alumni pelatihan tersebut.

Dan yang terakhir: Bagaimana kalau terhadap ilmu yang kita sedang mengikuti pelatihan di dalamnya, kemudian hati dan seluruh organ kita tidak fokus? Banyak orang bila mendengar kabar buruk, lantas ia mengucapkan, “wassallam”. Sejatinya, ia adalah doa agar yang sedang diberi pelatihan tersebut diberikan keselamatan karena merasa ia belum selamat dalam menyambut ilmu yang sedang dipelajari.

Sebagai khotimah, ada pertanyaan semacam ini: Sekarang sedang zamannya *e-learning*, *online learning*, kemudian juga *blended learning*? Apakah analogi ini masih berlaku? Silakan bertanya ke relung hati terdalam. Bagaimana pun bentuk metode penyampaian ilmu itu sampai kepada kita, adakah sisi kedalaman ilmu tersebut membekas ke dalam hati, mengubah persepsi atau pandangan, hingga idealisme dan visi kita, terhadap kinerja dimana kita membersamainya tiap waktu?

***)Naqiyyah, Ajadib, dan Qi’an merupakan analogi antara ilmu dan hidayah terhadap penerimaan kita terhadapnya, dikutip dari hadits Bukhari dan Muslim, dari Nabi Muhammad Saw.**

DR. ELZA NOVITA
RUMAH VAKSINASI SAWANGAN

KEHAMILAN DAN PERSALINAN BUKAN PENYAKIT

Bagi kebanyakan calon orang tua, kehamilan adalah harapan dan anugerah yang amat membahagiakan. Betapa bayangan untuk menjadi orang tua akan segera terwujud, memiliki seorang bayi yang sehat, membesarkan manusia yang bahagia dan mapan tentu sangat diidam-idamkan.

Faktanya, apakah semua impian yang Anda dan pasangan bayangkan tersebut telah dibarengi dengan upaya persiapan untuk mendapatkan kehamilan dan persalinan yang tetap sehat lahir dan batin? Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa kehamilan dan persalinan harus dipersiapkan? Jawabannya adalah karena masa kehamilan dan persalinan merupakan masa yang penuh keajaiban. Pertumbuhan dan perkembangan bayi yang amat menakjubkan terjadi pada saat kehamilan dan persalinan. Masa tersebut amat menentukan dan tidak akan pernah dapat diulang atau diperbaiki. Apapun yang terjadi pada masa kehamilan dan persalinan akan selamanya mempengaruhi karakter dan kepribadian sang bayi yang menjadi dasar dimana sebuah keluarga dibangun.

Selama proses kehamilan kurang lebih 40 minggu lamanya merupakan masa-masa penantian, kekhawatiran, dan kecemasan. Bijaksana sekali jika Anda mengisi masa tersebut untuk belajar, mengenali tentang fungsi tubuh Anda, bayi Anda, menyesuaikan diri, serta merencanakan dan menyiapkan diri untuk menjadi orang tua. Anda harus tau bahwa pada setiap kehamilan, tubuh didesain dan diciptakan dengan sempurna

untuk hamil, melahirkan, dan memberi makan (menyusui) nantinya. Kehamilan dan persalinan adalah peristiwa alamiah yang fisiologis, itu artinya kehamilan dan persalinan bukan suatu penyakit, maka tetap sehatlah! Tanamkan keyakinan diri Anda untuk bisa beraktifitas wajar selama masa kehamilan bahkan saat persalinan.

Namun kenyataannya, para wanita kini telah banyak kehilangan keyakinan akan desain tubuh mereka sendiri. Hal ini seringkali disebabkan karena wanita-wanita masa kini tidak mengenal bagaimana tubuhnya bekerja, sehingga dengan sukarela menyerahkan "keselamatan" tubuh mereka hanya pada tim medis yang mereka anggap sangat paham akan tubuh mereka. Padahal lebih dari semua itu, tentunya mereka sendirilah yang perlu lebih dulu tau tentang bagaimana tubuh mereka masing-masing dalam menjalankan fungsinya.

Tahukah Anda bahwa di masa lalu kehamilan dan persalinan adalah sebuah peristiwa komunitas. Para tetangga dan keluarga besar, baik yang di atas maupun di bawah tangga generasi, biasanya sangat antusias menghadapi kehamilan dan mereka biasanya datang bersama-sama untuk membantu ibu yang melahirkan. Ketika para gadis muda menyaksikan kelahiran, adalah saat dimana mereka mendapatkan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan jauh sebelum giliran mereka untuk mengalaminya. Kelahiran dianggap sebagai peristiwa alami. Pendidikan kehamilan dan persalinan menjadi bentuk berbagai ilmu dan pengetahuan tidak resmi yang

diteruskan dari generasi ke generasi, yang berdampak baik bagi mereka, sehingga mereka mengetahui dengan baik diri dan fungsi tubuh mereka dan menjadi lebih siap saat gilirannya untuk hamil dan melahirkan nanti.

Saat ini mungkin sedikit sekali yang mengetahui tentang proses alami kehamilan dan persalinan. Perubahan kebiasaan dari generasi terdahulu ini bermula saat seorang dokter berkebangsaan perancis bernama dr. Francois Mauriceau pada tahun 1668 menerbitkan buku *Traite Des Maladies Des Femmes Grosses, et de Celles Qui Sunt Accouches* (Penyakit-penyakit Wanita yang Punya Anak) yang terinspirasi untuk mengamati wanita selama proses persalinan akibat dari kehilangan tragis adiknya sendiri dan anak dalam kandungannya pada saat persalinan pertamanya sekitar abad kedua puluh. Salah satu yang membuat dia terkenal adalah adanya pengenalan tentang posisi perancis untuk mengamati rasa sakit dari kelahiran. Posisi ini adalah posisi diatas tempat tidur yang menyandar dengan kaki terangkat yang dimaksudkan agar tenaga medis lebih mudah mengobservasi pasien. Sebelum dikenalkan posisi seperti ini, pada setiap proses persalinan tidak ada patokan posisi khusus, posisi melahirkan biasa mengikuti naluri masing-masing ibu yang akan melahirkan.

Dengan kemajuan teknologi kesehatan sekarang, muncullah berbagai alat canggih yang digunakan untuk memeriksa kondisi seseorang, termasuk pada pemeriksaan kehamilan dan persalinan.

Pemeriksaan-pemeriksaan ini menjadi suatu hal yang rutin dilakukan hampir pada setiap kunjungan. Nyatanya, terkadang pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dilakukan bukan untuk benar-benar mengambil manfaat kesehatan bagi ibu dan bayi dalam kandungannya. Bijaksananya sebelum Anda melakukan pemeriksaan, Anda harus mengetahui apakah pemeriksaan tersebut dibutuhkan dan akan memberi manfaat positif bagi Anda dan bayi dalam kandungan. Sebagai contoh adalah bagaimana ACOG (The American Collage of Obstetricians and Gynecologists) merekomendasikan paling tidak pemeriksaan USG dalam kehamilan dilakukan hanya satu kali, yaitu pada usia kehamilan 18-22 minggu, atau boleh ditambah satu kali pemeriksaan lagi pada usia kehamilan 10-12 minggu hanya jika memang dirasakan gangguan pada perkembangan kehamilan muda tersebut.

Sangat perlu diingat, karena dalam ilmu pengetahuan apalagi ilmu kedokteran yang mungkin hari ini dianggap aman dan tampak tanpa dampak negatif, bisa saja berubah pada tahun-tahun yang akan datang. Salah satu contoh yang sangat mengemparkan sejarah dunia kedokteran adalah pada penggunaan obat Thalidomide yang awalnya diresepkan buat ibu hamil untuk mengurangi gejala mual, tetapi ternyata sekitar tahun 60-an terbukti menyebabkan kecacatan pada bayi dalam kandungannya.

Dalam perjalanan kehamilan mungkin seringkali Anda mengalami beberapa keluhan yang sebelumnya tidak pernah Anda rasakan. Terhadap keluhan tersebut respon yang dirasakan setiap wanita akan berbeda, mulai dari keluhan ringan hingga berat, yang tentunya hal ini akan mengganggu kenyamanan Anda, termasuk ketidaknyamanan dalam proses persalinan. Semua ini seringkali dianggap sebagai kondisi darurat yang menakutkan dan traumatis yang dianggap butuh segera dilakukan pemeriksaan bahkan pengobatan. Padahal sebetulnya dengan pengetahuan dan pengamatan yang dapat dipahami seringkali kesakitan- kesakitan yang terjadi dalam

proses kehamilan dan persalinan hanyalah proses alamiah tubuh untuk beradaptasi mempersiapkan kondisi senyaman mungkin untuk ibu dan bayi dalam kandungannya.

Nyeri punggung adalah salah satu contoh keadaan yang sering dialami dalam kehamilan. Apa yang sebetulnya terjadi pada keadaan tersebut dan bagaimana cara bijak menghadapinya? Dan apakah perlu dilakukan pemeriksaan khusus atau bahkan pengobatan? Nyeri punggung bisa dirasakan selama masa kehamilan. Rasa sakit di punggung bagian atas ternyata seringkali disebabkan karena kompensasi oleh meningkatnya bobot payudara. Rasa sakit di punggung bagian bawah bisa diakibatkan oleh bertumbuhnya bayi dan kandungan. Hal ini juga bisa disebabkan oleh postur tubuh yang buruk akibat perubahan pusat gravitasi. Untuk mengurangi keluhan ini Anda dapat coba lakukan beberapa koreksi dengan menggunakan bra yang dapat menahan payudara dengan baik. Pakailah sepatu datar dengan sol yang dapat menopang dan menjaga postur tubuh dengan baik. Mintalah bantuan keluarga atau profesional untuk memijat Anda. Rajin-rajinlah melakukan gerakan *pelvic rock* sepanjang hari, berjalan kaki, dan berhati-hatilah untuk tidak membungkuk di pinggang saat mengangkat beban. Akan lebih baik lagi jika Anda meminta pertolongan pada orang lain untuk mengangkat benda-benda berat, seperti barang belanjaan dan menggendong anak yang lebih tua. Dan semua gejala tersebut dapat benar-benar berkurang tanpa pengobatan.

Kenalilah kembali diri Anda, berikan tubuh anda kesempatan untuk menjalankan fungsinya, pastikan intervensi medis hanya dilakukan saat anda benar-benar membutuhkannya, sehingga hanya intervensi medis yang tepat yang nantinya akan dilakukan tim medis. Yakinkan diri anda bahwa kehamilan adalah masa teraman dalam kehidupan wanita, nikmatilah setiap proses penyesuaian dan temukan pelajaran baik dibalikinya.

MELADIA S. W. ISSAK

Danau Cermin Lamaru & Nasi Gami

Pesona Balikpapan yang Belum Banyak Orang Tahu



FOTO : MELADIA S. W. ISSAK



Pulau Borneo menyimpan sejumlah ragam potensi wisata. Salah satu yang menarik dan menakjubkan adalah sebuah danau cantik bagaikan cermin yang memancarkan keindahan. Belum banyak orang yang mengetahui adanya danau ini. Bila menginjakkan kaki di kota Balikpapan, keindahan Danau Cermin Lamaru yang eksotis dan memukau menjadi destinasi yang *recommended* untuk dikunjungi. Di bawah teriknya sinar matahari, air danau yang jernih memantulkan pemandangan alam sekitar dengan sempurna.

Berdasarkan berbagai sumber informasi yang ada, asal terbentuknya Danau Cermin Lamaru adalah tanpa sengaja. Sekitar tahun 2009, dengan kondisi area berbukit, pihak TNI AD berniat membuat proyek pengerjaan tempat latihan lapangan tembak. Lokasi danau ini dikeruk seluas kurang lebih 1 hektar di wilayah Kelurahan Lamaru. Setelah sekian lama tidak digunakan, area tanah yang berbentuk cekung ini pun dipenuhi air hujan dan membentuk danau yang cantik.

Danau buatan ini selain dikenal dengan nama Danau Cermin juga dikenal Danau Rawamangun.

Bagi Anda yang ingin berwisata dan berpetualang di danau ini, Anda dapat menempuh jarak lebih kurang 20 km dari Kota Balikpapan yang memakan waktu sekitar 45 menit perjalanan. Selama menempuh perjalanan, di sisi kanan jalan Anda akan dimanjakan dengan pemandangan pesisir Pantai Lamaru yang dapat menjadi destinasi wisata pilihan lain setelah berkunjung dari Danau Cermin Lamaru. Datanglah pada sore hari saat matahari mulai terbenam karena di waktu itulah cahaya matahari memantulkan gambar di permukaan danau dengan sempurna.

Mengunjungi Danau Cermin Lamaru tergolong murah dan mudah. Anda tidak akan dikenakan biaya masuk, cukup mengeluarkan biaya transport. Danau ini ramai dikunjungi untuk dijadikan pilihan tempat wisata swafoto. *Spot* terbaik untuk berswafoto adalah mencari lokasi

yang agak tinggi dengan cukup naik di sisi berbukit dimana keindahan Danau Cermin terlihat jelas.

Selain wisata alam, pesona lain yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Balikpapan adalah kulinernya. Biasanya, hampir semua orang yang datang ke Balikpapan ingin mencicipi hidangan khas kota ini, yaitu kepiting kenari. Akan tetapi, ada kuliner lain yang tidak kalah enak dan patut untuk dicoba, namanya nasi gami. Kuliner ini sebenarnya adalah salah satu makanan khas dari Kota Bontang yang berjarak 157 km atau 4 jam perjalanan dari kota Balikpapan.

Di Balikpapan sendiri, kuliner nasgam (sebutan populer nasi gami), mulai naik pamor sejak tahun 2017. Salah satu varian dari nasi gami ini adalah nasi gami bawis. Bawis sendiri merupakan jenis ikan laut yang banyak hidup di perairan Bontang. Dalam bahasa Indonesia, gami berarti sambal. Selain namanya yang unik, proses pembuatannya juga menarik karena

menggunakan cobek tanah. Menurut cerita masyarakat Bontang, asal muasal kuliner ini adalah karena dahulu para nelayan pada saat melaut tidak membawa peralatan yang banyak, hanya membawa cobek, jadi mengulek sambal dan memasak ikan bawis hanya menggunakan cobek.

Sebenarnya sambal gami bisa dipadukan dengan sumber protein lainnya, seperti kerang, atau jenis ikan lainnya seperti cumi, udang, ayam, telur dan bebek. Bahkan, kalau apabila sedang tidak ingin makan nasi, bisa diganti dengan singkong rebus atau goreng yang rasanya tak kalah nikmat.

Memasak nasi gami bawis sebenarnya cukup mudah karena tak jauh berbeda dengan memasak sambal pada umumnya. Bahan yang diolah mulai dari bawang merah, terasi khas Bontang, tomat, cabe rawit, gula, garam, serta minyak goreng. Ikan kemudian diletakan di atas cobek

dan dilumuri sambal bumbu, lalu dipanaskan. Proses ini memungkinkan bumbu terserap dengan sempurna ke daging ikan. Tidak heran, proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama.

Aroma sambal yang disajikan dalam keadaan panas mengepul langsung membuat perut keroncongan. Hal yang membuatnya unik juga adalah penyajiannya. Sambal yang telah diulek, diletakkan dalam cobek tanah liat bersama ikan bawis, lalu dipanaskan di atas kompor. Saat panas, sambal akan meletup-letup dengan aroma sedap yang menyeruak, mirip penyajian *hot plate*. Di beberapa kedai ada juga yang menyajikan dengan menggunakan *hot plate*. Dimakan bersama nasi hangat dan tentunya tak lupa segelas es teh manis, dijamin membuat Anda ketagihan. Harga seporsi nasi gami bawis terbilang murah dan ramah di kantong. Hanya dengan mengeluarkan 25.000 hingga 35.000 rupiah saja, Anda sudah dapat mencicipi dahsyatnya sambal dengan rasa ikan yang lembut nan gurih.

FOTO : MELADIA S. W, ISSAK



ARDES M. Y. SITANGGANG

DISRUPTION

PENGARANG : RHENALD KASALI
PENERBIT : GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA
JUMLAH HALAMAN : 512
TAHUN TERBIT : CETAKAN PERTAMA 2017

Laporan keuangan konvensional menunjukkan banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Perusahaan – perusahaan yang terkenal satu persatu rontok dan dinyatakan bangkrut. Data menyebutkan bahwa penurunan pendapatan tersebut disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Namun, hasil penelitian lain menyatakan hal sebaliknya, ada perusahaan yang membukukan kenaikan pendapatan dan diimbangi dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Kedua data berikut menimbulkan pertanyaan: apa yang menyebabkan penurunan laba dan mengakibatkan perusahaan semakin kesusahan bahkan sampai gulung tikar? Rhenald Kasali menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya “*disruption*” yang sudah dikemukakan oleh Christensen berpuluh–puluh tahun sebelumnya.

Disruption, sebagaimana halnya judul buku ini, memberikan gambaran dinamisnya perkembangan ekonomi yang disokong oleh teknologi. Pengaruh teknologi tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran, perubahan, ataupun inovasi karena adanya pendatang (perusahaan baru). Perubahan dan inovasi tidak hanya berdampak pada harga yang lebih murah dan produk yang lebih beragam, tetapi juga pada perubahan pola distribusi, pemasaran, dan gaya belanja masyarakat. Hal inilah yang mendisrupsi perusahaan – perusahaan saat ini. Disrupsi ini seringkali tidak terlihat sehingga perusahaan – perusahaan tidak dapat langsung menyadari akan hal tersebut dan pada akhirnya bisa mengganggu dan membahayakan perusahaan.



Penjelasan yang runut dimulai dari penggambaran munculnya tatanan baru, lawan yang tidak terlihat, serta bentuk pasar yang baru dan berbeda sehingga menimbulkan perubahan ekonomi saat ini. Kemudian dalam bagian selanjutnya dibahas mengenai aplikasi dan teori yang mendasari perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini. Teori yang dipakai adalah teori *Disruption* yang dikemukakan oleh Christensen dan disertai dengan pembuktian teori tersebut baik dari segi kritik ilmuwan, pelaku bisnis, maupun bukti nyata atas perubahan ekonomi yang terjadi. Bab selanjutnya membahas tentang menyerang (*disrupting*) atau diserang (*disrupted*), bagaimana inovasi dan perkembangan teknologi sebagai *enabler* yang menjadi faktor *disruption*. Disebutkan bahwa *disruption* merupakan suatu strategi, sehingga tidak hanya perusahaan baru, perusahaan yang sudah mapan juga harus bisa mendisrupsi diri sendiri untuk dapat bertahan dalam bentuk yang baru. Proses disrupsi diri sendiri memerlukan *mindset*/pola pikir yang berbeda, antara *Disruptive Mindset* dan *Steady Mindset*. Hal inilah yang dibahas dalam bab selanjutnya. Buku ini ditutup dengan pembahasan tentang efek disrupsi baik terhadap pangan, pemerintahan, olahraga, dan pendidikan.

Cerita Kodak vs FujiFilm, Perlombaan Ekspedisi Inggris vs Norwegia, dan bangkrutnya Seven Eleven dijelaskan dengan gamblang dan mudah. Pembahasan teori dan kasus yang ringan dan berisi tentang kondisi yang aktual saat ini berlangsung, sangat bermanfaat jika dibaca dan dijadikan pertimbangan, tidak hanya oleh pebisnis ataupun pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat umum. Pembahasan tentang disrupsi ini juga bermanfaat bagi pihak pemerintah, dimana pemerintahan perlu menyikapi dan ikut melakukan “*disrupsi*” pelayanan/ tata kelola yang mendukung peningkatan ekonomi negara.

Disruption merupakan suatu strategi, sehingga tidak hanya perusahaan baru, perusahaan yang sudah mapan juga harus bisa mendisrupsi diri sendiri untuk dapat bertahan dalam bentuk yang baru.

FOTO OLEH BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK

Pontianak

MERASAKAN ATMOSFER MULTIKULTURALISME DI KOTA SERIBU PARIT



MONUMEN SEBELAS DIGULIS

Monumen Sebelas Digulis Kalimantan Barat, disebut juga sebagai Tugu Digulis merupakan salah satu tengaran Pontianak yang letaknya di tengah kota. Monumen ini didirikan sebagai peringatan atas perjuangan sebelas tokoh Sarekat Islam di Kalimantan Barat, yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Barat karena khawatir pergerakan mereka akan memicu pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan.



VIHARA BODHISATVA KARANITA METTA

Vihara Bodhisatva Karanita Metta konon kabarnya merupakan vihara tertua di Pontianak yang mulai dibangun pada tahun 1829, Vihara ini sebagian besar materialnya menggunakan kayu ulin tanpa paku.

PANGLIMA DAYAK

Salah satu kostum Suku Dayak, mengenakan mahkota kepala burung enggang yang sarat makna berhiaskan bulu-bulu dari ekornya.



MASJID JAMI PONTIANAK

Masjid Jami Pontianak atau dikenal juga dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman adalah masjid tertua di Kota Pontianak, Masjid yang terletak di Kompleks Keraton Kadariyah Pontianak ini menjadi salah satu penanda berdirinya Kota Pontianak pada 1771. Tampak masyarakat beraktifitas di Sungai Kapuas menggunakan sampan sebagai salah satu sarana transportasi.



BURUNG ENGGANG

Patung burung enggang/rangkong, burung yang dikeramatkan oleh Suku Dayak dan menjadi maskot Provinsi Kalimantan Barat

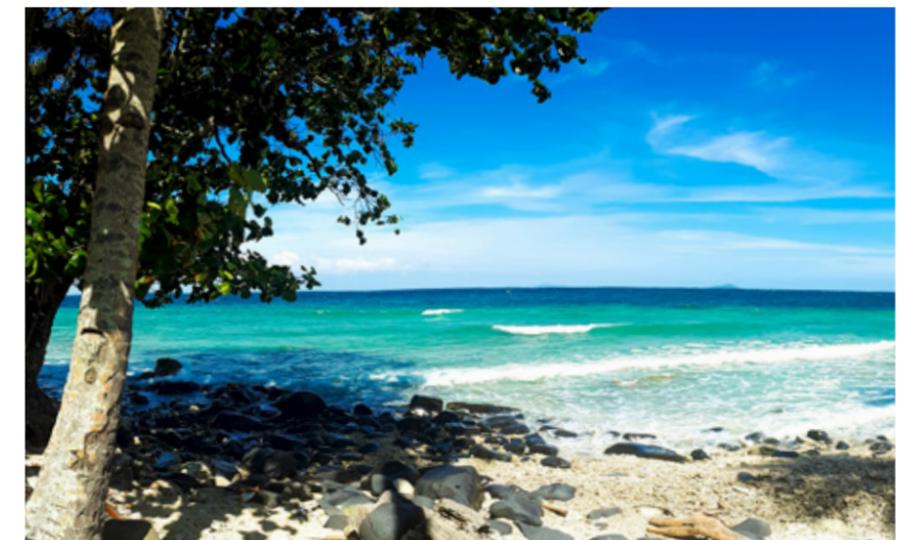
GEREJA KATEDRAL SANTO YOSEPH

Berdiri sejak 9 Desember 1909 merupakan gereja tertua di Paroki Keuskupan Agung Pontianak.



PULAU RANDAYAN

Berjarak kurang lebih 150 km dari Kota Pontianak, Pulau Randayan yang terletak di Kabupaten Bengkayang ini dapat ditempuh menggunakan kapal atau perahu 90 menit dari daratan. Pantainya menawarkan pemandangan pasir putih yang bersih dan air laut yang masih jernih menjadi alternatif wisata bagi masyarakat Kalbar.



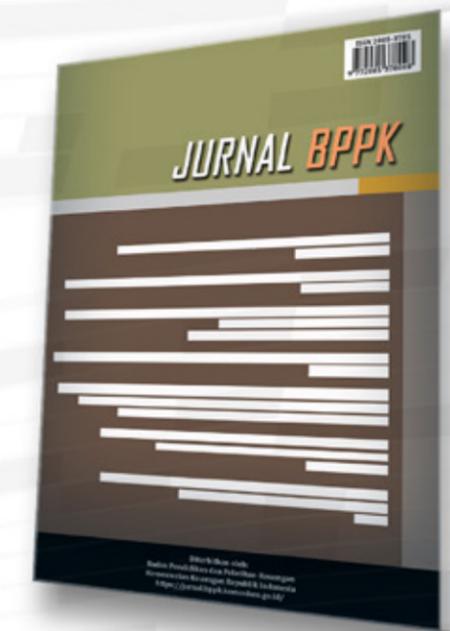
KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



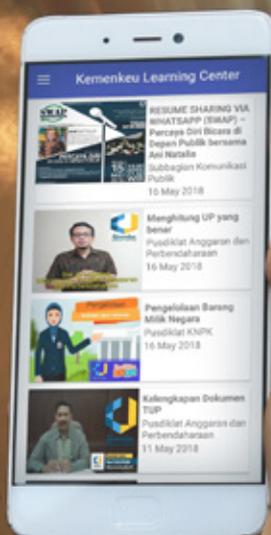
Telah Terbit! JURNAL BPPK Volume 1 No.1 2018

ISSN 2085-3785



Anda dapat membacanya di:
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk>

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja



KLC klc.kemenkeu.go.id
KEMENKEU LEARNING CENTER

ISSN: 2086-4833



9 712086 483008